

PERMUKIMAN YANG HARMONIS

Tantangan Membangun Ruang Bermukim di Bali

Penulis:

I Gusti Putu Anindya Putra; I Komang Gede Santhyasa;
I Putu Gede Suyoga; Wahyudi Arimbawa; Made Novia Indriani;
I Nyoman Suta Widnyana; Ni G.A. Diah Ambarwati Kardinal;
Ida Bagus Wirahaji; I Putu Laintarawan; Ida Ayu Putu Sri Mahapatni;
I Made Gde Sudharsana; I Nyoman Harry Juliarthana;
Komang Ayu Sari Galih; Cokorda Putra; A.A.A Made Cahaya Wardani

Editor:

I Komang Gede Santhyasa
I Putu Laintarawan

UNHI PRESS

Bekerja sama dengan

Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia

2019

Permukiman yang Harmonis:

Tantangan Membangun Ruang Bermukim di Bali

ISBN 978-602-52255-9-8

Penulis

I Gusti Putu Anindya Putra; I Komang Gede Santhyasa;
I Putu Gede Suyoga; Wahyudi Arimbawa; Made Novia Indriani;
I Nyoman Suta Widnyana; Ni G.A. Diah Ambarwati Kardinal;
Ida Bagus Wirahaji; I Putu Laintarawan; Ida Ayu Putu Sri Mahapatni;
I Made Gde Sudharsana; I Nyoman Harry Juliarthana;
Komang Ayu Sari Galih; Cokorda Putra; A.A.A Made Cahaya Wardani

Editor

I Komang Gede Santhyasa
I Putu Laintarawan

Tata Letak

Wayan Iwan Suryawan

Desain Sampul

Made Sanjaya

Foto Sampul Depan dan Belakang

fb. Tenganan Pengringsingan Bali

Penerbit

UNHI PRESS
Jl. Sangalangit, Tembau Penatih, Denpasar – Bali
Telp. (0361) 464700 / 464800 Email: unhipress@unhi.ac.id

Bekerja sama dengan

Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia

Cetakan pertama, Juni 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit



SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HINDU INDONESIA



Om Swastyastu,



Atas berkat karunia Ida Sang Hyang Widhi
A
Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), akhirnya buku
berjudul: “Permukiman yang Harmonis: Tantangan
Membangun Ruang Bermukim di Bali”, berhasil
disusun dan diterbitkan. Menerbitkan buku referensi
menjadi tradisi intelektual dan karya monumental
yang patut dikembangkan dalam mendialogkan
pemikiran atau gagasan keilmuan yang ditekuni. Buku
ini merupakan kumpulan pemikiran atau gagasan

dari dosen-dosen Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia. Hadirnya buku ini, sekaligus sebagai kado HUT yang ke-26 untuk Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia tahun 2019.

Bali dalam konteks nasional bahkan dunia selalu menjadi daya tarik untuk diteliti dan menjadi rujukan sebagai tempat belajar tentang budaya lokal khususnya budaya bermukim (*human settlement*). Penciptaan ruang bermukim adalah usaha untuk secara lebih akurat mengakomodasi norma dan nilai manusia sebagai individu maupun anggota kelompok dalam ruang bermakna. Pada ruang tersebut, seseorang memiliki keterikatan emosional-spiritual dan kultural-

material, sehingga permukiman dapat dijadikan tempat oleh manusia untuk mewujudkan eksistensinya sesuai dengan budaya setempat.

Pemikiran inilah yang menjadi pijakan awal sebagai salah satu bentuk usaha manusia menyelaraskan hubungannya dengan lingkungan bermukimnya untuk mencapai tujuan (*religius*) yang lebih tinggi, dan pada gilirannya menciptakan kualitas lingkungan permukiman yang harmonis. Namun demikian, perkembangan ruang-ruang bermukim di Bali mengalami dinamika yang semakin dinamis sebagai bentuk pengakomodasian terhadap kebutuhan ruang bermukim dengan aktivitas yang semakin modern. Melalui berbagai tulisan yang tersaji, buku ini mencoba memberikan pemikiran baru dalam menciptakan kualitas lingkungan permukiman yang harmonis dan mengungkap tantangannya dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Bali.

Pada kesempatan ini, Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini bisa terwujud. Semoga hadirnya buku ini bisa menjadi pemantik diskursus yang lebih serius ke depannya mengenai isu-isu permukiman di Bali.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Juni 2019
Dekan Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia

I Komang Gede Santhyasa, ST., MT



DAFTAR ISI



Sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel, Gambar dan Foto.....	vii
Pengantar Editor	xi
1 Peran Budaya Bali sebagai Landasan Pembentukan Ruang Permukiman dalam Masyarakat Multikultur: Sebuah Kajian Teoretis	
I Gusti Putu Anindya Putra dan I Komang Gede Santhyasa	1
2 Deskripsi Kritis Identitas Arsitektur Tradisional Bali dalam Perspektif Kekerasan Simbolik	
I Putu Gede Suyoga.....	23
3 Aspek Sosio-Kultural dalam Tatahan Ruang Permukiman Tradisional di Desa Adat Penglipuran, Bali: Sebuah Referensi Penciptaan Permukiman yang Adaptif Bagi Penghuninya	
Wahyudi Arimbawa	31
4 Pengembangan Permukiman Berbasis Budaya	
I Gusti Putu Anindya Putra	45

5	Ekspresi Keruangan Budaya Lokal: Tinjauan Diakronik Spasial Permukiman Desa Adat Kesiman, Denpasar - Bali	
	I Komang Gede Santhyasa	59
6	Makna Kultural “Bale Jineng”	
	Made Novia Indriani dan I Nyoman Suta Widnyana.....	71
7	Ruang Budaya yang Hilang di Desa Pegayaman, Buleleng - Bali	
	Ni G.A. Diah Ambarwati Kardinal.....	83
8	Strategi Penanganan Permukiman Kumuh dan Lingkungan Perumahan di Kota Denpasar	
	Ida Bagus Wirahaji dan I Putu Laintarawan.....	95
9	Eksistensi Penerapan “Telajakan” di Desa Pakraman Cengkilung, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara	
	Ida Ayu Putu Sri Mahapatni.....	109
10	Sanitasi Bersih, Hidup Lebih Sehat dan Berkualitas	
	I Made Gde Sudharsana.....	123
11	Konsep Multikultural pada Pola Permukiman di Kota Denpasar	
	I Nyoman Harry Juliarthana dan Komang Ayu Sari Galih.....	133
12	Perumahan Tradisional Bali dan Indeks Kualitas Kenyamanan Hidup Rumah Terhadap Penghuninya	
	Cokorda Putra dan A.A.A. Made Cahaya Wardani	143
	TENTANG PENULIS.....	155



DAFTAR TABEL, GAMBAR DAN FOTO



Bab I

Tabel 1.	Unsur-Unsur Tri Hita karena dalam Susunan Kosmos.....	3
Gambar 1.	Hubungan yang Harmonis dalam Konsep Tri Hita Karena.....	4
Gambar 2.	Ukuran Dasar (<i>human scale</i>) Bangunan Tradisional Bali.....	6
Gambar 3.	Tata Nilai Pola Ruang Natak.....	7
Gambar 4.	Jarak Bangunan dalam Pekarangan dan Perubahannya.....	7
Gambar 5.	Ukuran Pekarangan	8
Gambar 6.	Konsep Rumah Bali.....	16
Gambar 7.	Variasi Besaran Ukuran Besaran Pekarangan.....	17
Gambar 8.	Perubahan Bentuk dan Fungsi Bangunan pada Rumah Tinggal.....	19

Bab III

Gambar 1.	Tatanan Ruang Permukiman Tradisional Desa Adat Penglipuran.....	36
Gambar 2.	Orientasi Simbolik Gunung-Laut Desa Adat Penglipuran.....	38
Gambar 3	Orientasi Simbolik Matahari Terbit dan Terbenam Desa Adat Penglipuran.....	39
Gambar 4.	Perpaduan Orientasi Sumbu Bumi dan Sumbu Religi Desa Adat Penglipuran.....	40
Gambar 5.	Konsep Panca Mandala Pada Tatanan Permukiman Tradisional.....	45

Bab IV

Gambar 1.	Hubungan Filosofi dan Konsep Ruang Tradisional Bali.....	48
Gambar 2.	Bentuk Umum Tipologi Lingkungan Tradisional Bali.....	48
Gambar 3.	Penerapan Konsep dalam Fisik Lingkungan (PR)	49
Gambar 4.	Penerapan Konsep dalam Fisik Lingkungan (SR).....	49

Bab V

Tabel 1.	Matrik Diakronik Spasial Desa Adat Kesiman.....	65
Tabel 2.	Tema-tema yang Terdapat Dalam Topik Diakronik	66
Gambar 1.	Orientasi Wilayah Studi; Desa Adat Kesiman, Kota Denpasar-Bali.....	62
Gambar 2.	Perkembangan pola spasial pusat permukiman Desa Adat Kesiman	67
Foto 1.	Elemen-elemen ruang di Desa Adat Kesiman	63

Bab VI

Gambar 1.	Contoh <i>Lay Out</i> Rumah Tradisional Bali	72
Gambar 2.	Bagian-Bagian Konstruksi Jineng	75
Gambar 3.	Tolak Ukur Makna Kultural	77
Foto 1.	<i>Bale jineng</i> dalam rumah tradisional Bali	73
Foto 2.	Bagian <i>bale jineng</i>	74

Bab VII

Gambar 1.	Peta Pola Permukiman Desa Pegayaman	87
Gambar 2.	Perubahan Pada Rumah Tinggal Keluarga Bapak Ibrohim Setelah Adanya Penambahan Bangunan di Halaman Depannya	92
Foto 1.	Pola permukiman yang mengikuti jalan.....	85
Foto 2.	Gang-Gang Penghubung Yang Tercipta Karena Aturan Teritisan 75 Cm	86
Foto 3.	Rumah-Rumah Tua di Pegayaman Dengan Halaman Depannya Yang Luas	86
Foto 4.	Letak Masjid dan Kuburan Islam yang berada di bawahnya	88
Foto 5.	Pengunaan Halaman Samping Rumah Bapak Penghulu.....	89
Foto 6.	Tradisi Main Gangsing di Pegayaman Saat Menunggu Bedug Magrib	90
Foto 7.	Tidak Ada Lagi Ruang (Foto: Penulis).....	90
Foto 8.	Suasana Rumah Tua Milik Keluarga Bapak Ibrohim	91

Foto 9.	Rumah Asli yang Akhirnya berada di Bagian belakang Bangunan Baru	93
Foto 10.	Ruang Jalan yang Menjadi Ruang Budaya Penting di Desa Pegayaman	93
 Bab VIII		
Tabel 1.	Identifikasi Faktor-faktor Kekumuhan Berdasarkan Indikator Kumuh.....	98
Gambar 1	Pembobotan kriteria Prasarana dan Sarana.....	98
Gambar 2	Pembobotan Prioritas Penanganan.....	99
Gambar 3	Penyebab Langsung dan Tak Langsung Permukiman Kumuh .	102
Gambar 4	Penyebab dan Dampak Perumahan dan Permukiman Kumuh	102
Gambar 5	Pola-pola penanganan Permukiman Kumuh.....	103
Gambar 6	Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman Kumuh	103
 Bab IX		
Gambar 1.	Tata Letak <i>Telajakan</i> menurut Arsitektur Tradisional Bali.....	113
Foto 1.	Telajakan dari Arah Timur ke Arah Barat.....	116
Foto 2.	Telajakan dari Arah Selatan ke Arah Utara.....	116
Foto 3.	Selokan Alami.....	117
Foto 4	Perubahan <i>Telajakan</i>	118
 Bab X		
Tabel 1.	Progres Pelayanan Sanitasi 2008	125
Tabel 2.	Proyeksi Layanan Sanitasi Bali Tahun 2019	128
Tabel 3.	Perkembangan Peserta PPSP di Provinsi Bali.....	129
Gambar 1.	Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia.....	126
Gambar 2.	Grafik Pelayanan Sanitasi Provinsi Bali Tahun 2017	127
Foto 1.	Masih ada masyarakat kita yang memanfaatkan air sungai	124
Foto 2.	Banjir akibat tersumbatnya drainase	124
Foto 3.	Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Suwung.....	124
Foto 4.	IPAL DSDP Suwung	129
Foto 5.	Sanitary Landfill TPA	129
Foto 6.	Drainase lingkungan.....	130

Bab XI

Tabel 1.	<i>Uses of the concept of multiculturalism as they apply to the multicultural cities.....</i>	135
Tabel 2.	<i>Three readings of issues related to urban cultural diversity.....</i>	137
Gambar 1.	Peta Tata Ruang Kota Denpasar.....	138
Gambar 2.	Konsep Multikultural Pola Permukiman di Kota Denpasar.....	141

Bab XII

Tabel 1.	Kebutuhan Luas Minimum Bangunan dan Lahan untuk Rumah	150
Tabel 2.	Parameter Quality of Life dalam konteks Urban and Regional	150



PENGANTAR EDITOR



Harmoni dalam Ruang Kultural

Ruang bermukim pada dasarnya merupakan pencerminan budaya masyarakat setempat, antara satu wilayah dengan wilayah lain dapat sangat berbeda, dan Levi-Strauss (1963), menyatakan bahwa ruang bermukim merupakan pencerminan dari struktur sosial masyarakat. Selanjutnya Rapoport (1970), menunjukkan bahwa ruang dapat dimaknai secara berbeda oleh masyarakat yang berbeda pula. Ruang juga dapat bermakna simbolis, makna ruang hanya dapat dimengerti berdasarkan simbolisme sesuai dengan budaya setempat. Ruang kognitif atau ruang kultural merupakan ruang yang dimaknai oleh kelompok tertentu, dipengaruhi oleh pengalaman lampau, ingatan, dan katagori mental kelompok.

Perencanaan ruang adalah suatu kegiatan manipulasi yang secara terencana dan terarah untuk mendapatkan kondisi ruang yang lebih baik. Adapun kondisi yang lebih baik merupakan suatu situasi yang sangat subyektif, namun dalam kerangka kajian lingkungan-perilaku (*environment-behavior study*), kondisi ini didefinisikan sebagai ruang, atau secara lebih spesifik lingkungan bermukim yang suportif terhadap budaya setempat (*local core culture*), dalam pengertian terdapat tingkat kongruensi yang tinggi antara lingkungan bermukim sebagai *system of setting* dengan budaya manusia penghuninya (Rapoport, 1979).

Lingkungan bermukim dikatakan 'baik' jika lingkungan tersebut terkait dengan cara hidup penghuninya, yang pada gilirannya berkaitan dengan variabel-variabel sosio-kultural. Masalah yang mendasar dalam hal ini adalah mengenali

variabel-variabel sosio-kultural mana yang penting bagi suatu komunitas atau kelompok dan bagaimana kaitan variabel tersebut dengan lingkungan fisiknya. Menurut Rapoport (1979), seringkali variabel sosio-kultural adalah faktor primer dalam interaksi antara manusia dengan lingkungan bermukimnya.

Ruang eksistensial dalam pembentukan identitas ruang bermukim dapat menampung ekspresi emosional-spiritual dan kultural-material dari 'pemiliknya' atau 'pemilik-pemiliknya' dalam sistem manusia-lingkungan yang bermakna (*meaningful person-environment system*). Lebih lanjut, Parimin (1986) menyatakan bahwa spasial merupakan aspek meruang dalam pengertian bahwa ruang dipahami bukan semata bersifat geometris, bebas nilai, atau ruang dalam pengertian ruang *euclidean*, melainkan ruang dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial dan budaya ruang memiliki makna, nilai, bersifat heterogen, mempunyai pengertian metaforik, dan erat kaitannya dengan aspek-aspek sosial serta kultural.

Setiap kultur dibangun menurut nilai-nilai dan norma-norma yang dimilikinya, yang meniru dan meminjam dari apa yang telah ada sebelumnya, mengembangkan gaya berbeda, yang kemudian menghasilkan generasi baru yang pencapaiannya terbukti bermanfaat. Sebuah kawasan permukiman dapat digambarkan sebagai kumpulan artefak-artefak kultural yang dihasilkan oleh generasi warga bermukim dan dianggap sebagai alat kontinuitas kultural. Artefak-artefak semacam itu membentuk struktur lingkungan berbasis kota dan terdiri dari apa yang disebut sebagai *cultural landscape*.

Setiap kultur di dalamnya memiliki karakteristik-karakteristik berbeda berdasarkan pada aspek-aspek utama kehidupan manusia, seperti religi, filosofi, etika, kebiasaan, tradisi dan sikap. Secara ringkas, kultur adalah "cara hidup", yang memiliki kosakata elemen-elemen desain dan identitas yang diinterpretasikan dan dimanifestasikan dalam bahasa *landscape* khusus yang memberikannya perbedaan, karakter, dan kepribadian.

Setiap kultur sepanjang waktu membawa pola-pola dan generalitas yang dipadukan dan kekhususan dibedakan. Generalitas tersebut adalah aspek dan ciri-ciri mendasar yang terbukti di dalam lanskap kultural yang sebagian membentuk sebuah tradisi, terdapat adat istiadat lokal yang menawarkan keunikan yang membedakan satu lanskap kultural dari yang lainnya yang tentunya memberikan warna identitas secara khas dan spesifik.

Beberapa tradisi penataan ruang permukiman dan penciptaan tempat memastikan bahwa dalam menyesuaikan lingkungan yang dibangun dengan kebutuhan-kebutuhan kultural mengalami keberhasilan dengan baik dan lingkungan masyarakat membawa banyak makna kultural. Beberapa tradisi yang

dapat dan seharusnya terus didorong untuk memperbaiki kualitas penyesuaian, khususnya budaya itu sendiri mengalami perubahan. Jadi, sepanjang prinsip-prinsip budaya esensial (konstanta kultural) tidak terancam, adanya lingkungan dan tradisi yang dibangun dapat berguna untuk memahami dan membantu proses baru yang dihasilkan. Ketika tidak terdapat kontinuitas kultural dan temporal, lingkungan yang terbangun akan kehilangan kemampuannya untuk mengekalkan identitas kulturalnya, dan kemudian menghambat usaha seseorang untuk memahami lingkungannya.

Khususnya dalam kasus Bali secara etnis-kultural yang cenderung homogen, usaha untuk menjaga kelestarian budaya inti merupakan konsepsi yang mendasar bagi masyarakat Bali dan merupakan landasan dasar mewujudkan permukiman yang harmonis (Salija, 1975; Parimin, 1986; Samadhi, 2001).

Tantangan Membangun Ruang Bermukim di Bali

Secara fisik dan sosial kemasyarakatan, Pulau Bali berkembang secara beriringan dengan budaya lainnya yang telah masuk dan tanpa disadari juga menjadi budaya masyarakat lokal. Ketika masyarakat semakin terdesak dengan kebutuhan yang berkaitan dengan ruang, maka akan terjadi pergeseran pola pikir dari yang bersifat tradisional menjadi moderen (fleksibel). Ruang-ruang yang pada awalnya di 'cap' masyarakat memiliki fungsi dan makna khusus yang sulit diubah karena terikat dengan aturan budaya setempat bahkan agama (nilai-nilai kosmologis), secara perlahan dapat digantikan dengan jenis ruang lain yang kebanyakan lebih mengandung nilai komersial tinggi dan fenomena tersebut seolah-olah disahkan oleh masyarakat setempat.

Ruang-ruang desa, kota dan wilayah yang memiliki nilai-nilai kosmologis yang menjadi ciri visual kawasan, keberadaannya seharusnya dipertahankan sebagai suatu identitas tempat. Dengan berjalannya proses perkembangan pembangunan, apalagi di kawasan perkotaan, identitas ruang tersebut cenderung terancam dan mengalami perubahan sehingga terjadi pergeseran pemanfaatan ruang dari perkotaan sampai ke kawasan pinggiran perkotaan dan hingga sampai ke pedesaan.

Saat ini, kawasan-kawasan permukiman telah jauh berbeda dengan keadaan terdahulu. Hamparan sawah/ladang telah banyak berubah menjadi perumahan penduduk serta berbagai fasilitas yang menunjang kehidupan modern. Masyarakatnya tidak lagi homogen, tetapi telah menjadi heterogen, baik dari segi mata pencaharian, suku bangsa, agama, pendidikan, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan fisik tidak dapat dihindarkan menyangkut sistem spasial, bentuk-bentuk visual, baik pada skala lingkungan

permukiman maupun rumah tinggal. Nampaknya, konsep-konsep permukiman tradisional tidak seluruhnya mampu lagi untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan hidup saat ini, sehingga masyarakat merasa perlu untuk melakukan modifikasi-modifikasi.

Bali adalah tujuan wisatawan internasional yang terkenal di seluruh dunia. Ini memunculkan dilema manfaat ekonomi wilayah di Bali dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan kultur yang dihasilkan dari manfaat yang diperoleh. Di sisi lain, nilai-nilai *post*-tradisional menyebabkan aktivitas-aktivitas pariwisata membentuk ruang dan artefak kontemporer, yang menurut frase Giddens, adalah reflektivitas moderen (Gauntlett, 2002), walaupun bertentangan dengan tradisi yang diciptakan di Bali itu sendiri. Sebagai satu dari beberapa tujuan pariwisata internasional terbaik, secara alamiah menjadi tempat munculnya kekuatan moderenitas yang menyebabkan terbentuknya kemas identitas bagi wisatawan (Askew & Logan, 1994; Picard, 1990). Identitas ini kerap kali menjadi gabungan identitas 'tradisional' dan 'eksotik' yang sekarang ini bisa menstabilkan dan menjadi pendapatan vital bagi Indonesia. Penataan permukiman sebagai proses sosio-spasial adalah satu dari beberapa agen dari fenomena ini, dan mungkin digunakan untuk membawa kembali lanskap ke-Bali-an ruang bermukim manusia Bali (Samadhi, 2005).

Sumardjan (1987), mengatakan bahwa perubahan kebudayaan dari desa tradisional ke moderen membutuhkan waktu yang lama dan tidak sama antara wujud budaya satu dengan yang lainnya atau antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka diasumsikan bahwa terdapat perbedaan perubahan budaya yang terjadi antara desa-desa di luar kawasan perkotaan dan di dalam kawasan perkotaan di Bali.

Dalam konteks demikian, permukiman tradisional di kota menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan kultur perkotaan (*urban culture*). Masalah tersebut antara lain adalah kepadatan penghuni, keterbatasan lahan, urbanisasi/migrasi, masalah ketenagakerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini tentunya berbeda dengan permasalahan yang dihadapi permukiman tradisional di daerah perdesaan. Oleh karena itu, perlu diketahui unsur-unsur yang *ajeg* (tetap bertahan), yang berubah dan sebab-sebab perubahannya, karena dalam kebijakan pembangunan Bali, yang dipentingkan bukan hanya kontinuitas produksi, tetapi juga kontinuitas kebudayaannya. Ini penting dilakukan mengingat bahwa kebudayaan Bali merupakan sumber daya yang sangat dominan dalam produksi, di samping sumber-sumber daya alam lainnya.

Pentingnya kajian-kajian ini dapat juga dilihat dalam konteks semakin dramatisnya perubahan-perubahan yang terjadi pada kebudayaan manusia pada

akhir-akhir ini dan mungkin akan bertambah cepat pada masa-masa mendatang. Khususnya pada budaya bermukim, perjalanan sejarah suatu masyarakat terekam dalam lingkungan fisiknya. Dalam hal tersebut terjadi proses perubahan dan adaptasi terus menerus dan penting untuk dipahami serta dicermati apalagi pesatnya perkembangan dalam segala bidang kehidupan masyarakat saat ini terkadang mampu mengubah lingkungan dalam waktu sekejap. Seringkali artefak lingkungan binaan beserta nilai-nilai kulturalnya, dan tatanan lingkungan fisiknya sirna ditelan peradaban baru.

Oleh karena itu, agar terhindar dari kebutaan tentang ide-ide cemerlang setiap jaman yang dilalui, maka perlu adanya usaha untuk mengkonstruksikan secara konseptual fenomena-fenomena yang terjadi kedalam sistem nilai ruang permukiman yang terbentuk. Dalam hal ini, terutama sebagai masukan dalam usaha mempertahankan kontinuitas budaya yang dalam konteks proyek pelestarian budaya lokal dapat dikatakan sebagai usaha pelestarian ekspresi nilai-nilai budaya inti Bali.

Penutup

Sebagian jawaban dari tantangan dan permasalahan dalam membangun ruang bermukim di Bali tertuang dalam buku ini. Di sini dibahas dua belas topik menarik, mulai dari aspek-aspek budaya sebagai landasan pembentukan ruang permukiman, kritik arsitektur tradisional, strategi penanganan permukiman kumuh, hingga persoalan-persoalan lingkungan permukiman seperti masalah sanitasi dan lain sebagainya. Kajian-kajian dalam buku ini menyajikan ulasan yang lebih bersifat makro atau multi aspek dalam konteks ruang permukiman Bali.

Kontributor tulisan dalam buku ini merupakan dosen tetap dan tidak tetap yang mengajar di Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia (I Gusti Putu Anindya Putra, I Komang Gede Santhyasa, I Putu Gede Suyoga, Wahyudi Arimbawa, Made Novia Indriani, I Nyoman Suta Widnyana, Ni G.A. Diah Ambarwati Kardinal, Ida Bagus Wirahaji, I Putu Laintarawan, Ida Ayu Putu Sri Mahapatni, I Made Gde Sudharsana, I Nyoman Harry Juliarthana, Komang Ayu Sari Galih, Cokorda Putra, dan A.A. Ayu Made Cahaya Wardani).

Semoga buku ini bisa mengisi kebutuhan referensi kajian-kajian permukiman, dan tentunya sebagai bahan bacaan kuliah-kuliah yang terkait dengan topik permukiman. Selain itu, kajian dalam buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberikan dorongan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan-permasalahan permukiman di Bali dan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Askew, Mark and Logan, William S. (eds.) 1994. *Cultural Identity and Urban Change in Southeast Asia: Interpretative Essays*. Geelong: Deakin University Press.
- Gauntlett, D. 2002. *Media, gender and identity: an introduction*. London: Routledge.
- Levi-Strauss, Claude. 1963. *Structural Anthropology*. New York: Basic Book Inc.
- Parimin, Ardi P. 1985. Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village: Environmental Hierarchy of Sacred-Profane. *unpublished doctoral thesis*. University of Osaka.
- Picard, M. 1990. Kebalian orang Bali: tourism and the uses of 'Balinese culture' in new order Indonesia, *Review of Indonesia and Malaysia Affairs*, 24, pp.1-38.
- Rapoport, Amos. 1970. The Study of Spatial Quality, *Journal of Aesthetic Education*, Vol 4 No 4 October 1970.
- _____. 1979. An Approach to Designing Third World Environments. *Third World Planning Review*, 1 (1): 23-44.
- Salija, Juswadi. 1975. Spatial Concepts in Balinese Architecture Its Possibilities for Further Development. *Unpublished master thesis*, University of Hawaii.
- Samadhi, T. Nirarta. 2001. The Urban Design of a Balinese Town: placemaking issues in the Balinese urban setting. *Habitat International*, 25/4: 559-575.
- _____. 2005. Reinforcing Identity: urban design concept for achieving Balinese cities with culture identity. In *proceedings international conference of the Asian Planning Schools Association*, Penang 11-14 September 2005.
- Soemardjan, Selo. 1987. Perjumpaan Kebudayaan dan Pariwisata di Pulau Bali. *Makalah seminar dalam rangka Jubiliun Perak Universitas Udayana*, Denpasar.

Selamat membaca buku ini dan semoga bermanfaat.

Editor,

I Komang Gede Santhyasa

I Putu Laintarawan

Peran Budaya Bali sebagai Landasan Pembentukan Ruang Permukiman dalam Masyarakat Multikultur: Sebuah Kajian Teoretis



I Gusti Putu Anindya Putra dan I Komang Gede Santhyasa

1. Latar Belakang.

Hubungan manusia dengan tempat tinggalnya selalu menarik untuk digali dalam penelitian-penelitian dari berbagai bidang ilmu. Salah satunya adalah hubungan yang menjelaskan bahwa manusia dalam berinteraksi berada dalam konteks budaya, artinya adalah sekelompok masyarakat dalam berinteraksi berada dalam tatanan budayanya. Sekelompok masyarakat didalam berinteraksi memerlukan wadah atau ruang dan jaringan yang menghubungkan satu sama lainnya.

Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara penduduk, baik sebagai individu ataupun kelompok dengan tempat/lokasi/wilayah dimana mereka beraktivitas, dan kesemuanya akan membawa 'perubahan' baik pada perilaku manusianya maupun wujud lingkungannya dari sisi budaya. Perilaku individu maupun kelompok masyarakat dalam tatanan tradisi dan budayanya yang tercermin dalam wujud fisik lingkungan.

Arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan penduduk kota menjadi semakin beragam, datang dari berbagai daerah Bali bahkan luar Bali dan luar negeri dengan membawa budaya masing-masing, menetap dalam kota membentuk komunitas-komunitas dengan beragam budaya, menjadikan sebuah budaya multikultur. Perkembangan teknologi dan tingkat pelayanan kota yang semakin meningkat, mendorong pertumbuhan pembangunan yang tidak terkendali dan

budaya mengalami krisis identitas.

Disisi lain, peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan ruang tidak banyak memberikan kontribusi bagi kearifan lokal untuk berperan dalam perencanaan dan pengendalian ruang kota. Walaupun ada peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berisi tentang arsitektur bangunan Bali, namun belum menyentuh tentang struktur ruang dan pola ruang tradisional yang diimplementasikan dalam pembentukan ruang.

Dari sisi budaya, keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan: (1) menurunnya kemampuan budaya lokal dalam menerima masuknya budaya luar, dan menjadikannya sebagai bagian dari budaya lokal yang diwujudkan dalam bentuk fisik lingkungan; (2) ketidakberdayaan budaya lokal menghadapi ketentuan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) yang tidak mengatur dan mengakomodasi potensi budaya lokal, sehingga kekuatan budaya lokal sebagai pembentuk jati diri/identitas tidak dapat berperan sebagai *mainstream* kehidupan multikultur; (c) munculnya keragaman budaya yang berpotensi kontradiktif dan dapat memicu terjadinya konflik sosial maupun dalam bentuk wujud ruang.

Budaya Bali yang dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran Agama Hindu bersifat fleksibel dan selektif dalam menerima dan mengadopsi pengaruh budaya luar. Budaya Bali tidak akan pernah berhenti atau akan terus menerus menyerap budaya-budaya diluar dirinya yang terekspresikan dalam lingkungan fisiknya, tanpa meninggalkan jati dirinya. Dengan derasnya arus urbanisasi yang melibatkan banyak penduduk pendatang dari berbagai daerah dengan ragam budayanya, menyebabkan kemampuan menyerap budaya dari luar semakin berkurang, sehingga menimbulkan konflik tatanan dan visual yang semakin mengaburkan identitas budaya Bali.

Oleh karena itu, budaya Bali melalui konsep-konsep yang melandasi pembentukan ruang harus tetap ditelusuri sesuai dengan perkembangan permukiman dan perkotaan, untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan kemampuan menyerap budaya luar dan kemungkinan perannya dalam wujud ruang yang beridentitas.

Secara umum tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa budaya Bali dapat menjadi landasan pembentukan ruang permukiman dan pengikat multikultur bagi masyarakat didalamnya. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk menemukan penjabaran nilai-nilai budaya Bali yang dapat menjadi landasan pembentukan ruang dan sebagai pengikat kehidupan masyarakat multikultur didalamnya.

2. Budaya Bali dalam Konsep Ruang.

Konsep ruang tradisional Bali yang bersumber dari filosofi religi kosmos Agama Hindu diwujudkan dalam bentuk keseimbangan antara manusia (*bhuana alit*) dengan alam (*bhuana agung*) yang dipandang sebagai sesuatu yang berbeda (*Rwa Bhineda*) namun saling berpengaruh dalam membentuk kesatuan. Dimana kedua kosmos tersebut dibentuk dari unsur-unsur yang sama (*Panca Mahabhuta*) untuk mencapai tujuan hidup *Mokshartam jagadhita ya ca iti dharma* melalui simbol-simbol sebagai upaya menyelaraskan diri dengan lingkungan kehidupannya.

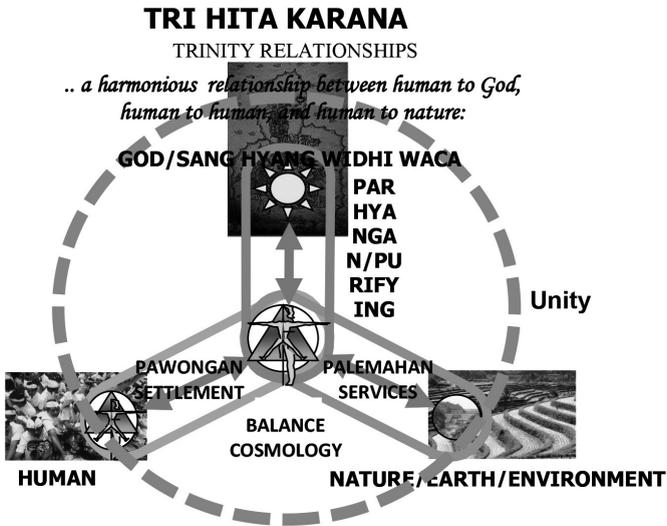
Landasan konsep ruang yang diturunkan dari filosofi ini secara menerus sampai pada elemen terkecil pada hakikatnya merupakan penjabaran bentuk keselarasan kosmos melalui unsur-unsur *Tri Hita Karana* (*purusa, perana, prakerti*), dan melalui hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama makhluk, manusia dengan lingkungan hidupnya, serta manusia dengan Tuhannya. Kedudukan filosofi dan landasan konsep ini bersifat kontekstual, dimana dalam penjabaran selanjutnya akan timbul keragaman bentuk tatanan, baik tatanan lingkungan maupun tatanan sosial (Tabel 1).

Tabel 1. Unsur-Unsur Tri Hita karena dalam Susunan Kosmos

SUSUNAN/ UNSUR	JIWA	TENAGA	FISIK
ALAM SEMESTA	Paraatman	Tenaga yang menggerakkan Alam	Unsur-unsur Pancamahabhuta
LINGKUNGAN	Kahyangan Tiga	Sima Krama Desa	Palemahan/ teritorial Desa
TEMPAT TINGGAL	Sanggah/Pemerajan	Manusia penghuni	Pekarangan
MANUSIA	Atman/Jiwa	Perana/tenaga	Sarira/Badan

Sumber : Anindya, 1991.

Filosofi *Tri Hita Karana* sebagai landasan konsep menjelaskan bahwa keselarasan kosmos yang terbentuk mulai dari unsur terkecil merupakan turunan dari unsur kosmos yang lebih besar, dimana dalam setiap unsur kosmos melambangkan adanya tiga aspek (jiwa, tenaga, dan fisik) yang mempengaruhi bentuk keselarasan hubungan.



Gambar 1. Hubungan yang Harmonis dalam Konsep Tri Hita Karana
Sumber: Sudarsana, 2016

Keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya disimbolkan dalam kawasan suci (*Parahyangan*), keselarasan hubungan manusia dengan alam disimbolkan dengan dimensi yang membentuk ruang (*Palemahan*), sedangkan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia ditunjukkan dalam tatanan sosial/*adat* (*Pawongan*), dimana terdapat struktur kemasyarakatan (organisasi) dan hukum (*awig-awig*) yang mengatur perilaku masyarakat (Gambar 1).

Seperti yang tersirat dalam landasan filosofi bahwa unsur-unsur keselarasan berlaku dari unsur-unsur terkecil sampai yang terbesar, ini memberikan pengertian bahwa lingkungan kota terbentuk dari turunan lingkungan desa dan *banjar*. Dengan kata lain kota adalah bentuk keselarasan kosmos dalam skala makro, dimana desa dan *banjar* adalah bentuk keselarasan kosmos dalam skala mikro, sehingga kota terdiri dari beberapa desa dan *banjar* (ruang permukiman), demikian seterusnya sampai pada elemen terkecil.

Berdasarkan filosofi dan landasan konsep ruang tradisional Bali, maka perwujudan ideologi perencanaan terarah pada: (1) pengaturan lingkungan sosial yang selaras dengan lingkungan hidupnya; (2) pengaturan ruang sebagai wadah kehidupan yang selaras dengan lingkungan sosial budayanya; (3)

keselarasan ke dua lingkungan tersebut diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol untuk mencapai keselarasan spiritual (*Moksartam Jagadhita ya ca iti Dharma*)/ keselarasan hubungan dengan Tuhan. Penjabaran lebih lanjut dari landasan konsepsi diatas diwujudkan dalam hubungannya dengan tata bangunan, pekarangan, dan lingkungan desa (permukiman).

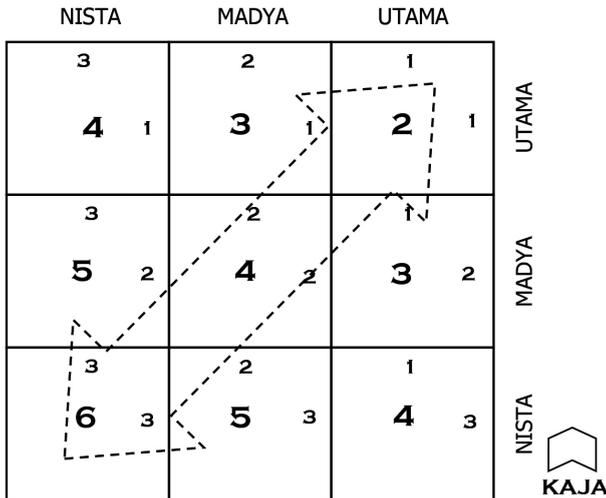
2.1 Hubungan dengan Tata Bangunan

Dalam lingkup tata bangunan, konsep ruangnya diturunkan dari konsep-konsep sebelumnya, dimana pada dasarnya tiap bangunan dibedakan ke dalam tiga bagian, yakni (1) atap, menyimbolkan *utama angga*; (2) kerangka tiang dan dinding menyimbolkan *madya angga*, dan (3) bataran dan lantai bangunan menyimbolkan *nista bangga*. Dasar ukuran yang dipakai untuk menjaga keserasian antara ketiga bagian tersebut adalah lengan dan tangan atau disebut *gegulak*, sedangkan standar ukuran yang dipakai disebut *rai* (lebar tiang), satu *rai* sama dengan jarak antara ujung telunjuk sampai pangkal ruas ketiga atau disebut juga *Tri Adnyana* sampai dengan *Sangga* (Gambar 2).

Keserasian ukuran antara panjang, lebar, dan tinggi disesuaikan dengan fungsi dan status pemakainya. Sebagai modul dasar (a) dipakai ukuran *a musti* untuk *bebaturan*, yang dalam matriks setara dengan ± 15 cm, dengan urutan simbol mulai dari *candi*, *watu*, *segara*, *gunung*, dan *rubuh*, kelipatan dihitung mulai dari bawah, masing-masing ditambah dengan *pengurip*; (b) untuk tiang dipakai ukuran *rai* (diagonal lebar tiang) yang dalam matriks setara dengan ± 10 cm, panjang tiang berkisar antara 19 sampai 23 *rai*, masing-masing ditambah dengan *pengurip*. Jarak tiang ke arah panjang bangunan adalah setinggi tiang ditambah *pengurip*, sedangkan ke arah lebar $2/3$ panjang tiang ditambah *pengurip*; (c) untuk atap dipakai ukuran *rai*, dimana sisi penampang konstruksi atap berkisar antara $1/4$ sampai 1 *rai*.

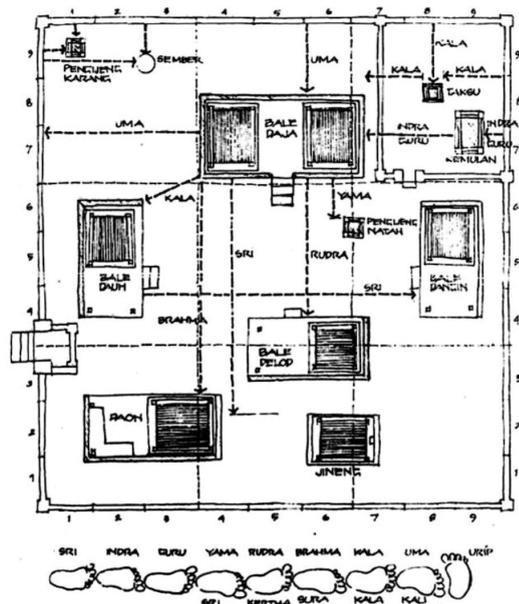
Pada masing-masing bangunan terdiri dari unsur *angga* (kepala, badan, kaki), yakni pada (a) *bebaturan* terdiri dari *sari*/kepala, *batur*/badan, *tepas*/kaki; (b) pada tiang terdiri bagian *canggahwang*/kepala, tiang/badan, sendi/kaki; (c) pada atap terdiri dari *petaka* atau *dedeleg*/kepala, *pemucu-pemade-raab*/badan, *sineb* dan *lambang*/kaki, demikian seterusnya pada bagian-bagian *bebaturan*, tiang maupun atap akan merupakan bentuk pengulangan-pengulangan.

dengan *Paduraksa* (*padu* artinya pertemuan, *raksa* artinya memegang/menjaga), dari arah kaja kangin ke arah kauh berturut-turut disebut *Sri, Aji, Rudra, Kala* (Tonjaya, 1982). Antara jalan dengan pagar pekarangan terdapat area kosong yang disebut dengan *Telajakan* yang lebarnya $\frac{1}{2}$ depa, dan ruang peralihan di depan pintu masuk disebut *Lebuh* dengan lebar 1 *depa* dari tepi jalan.



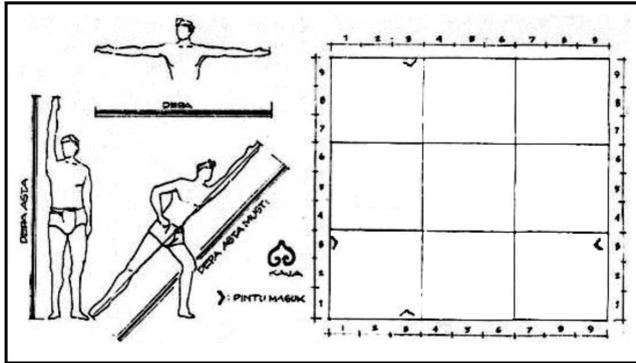
Gambar 3. Tata Nilai Pola Ruang Natah.
Sumber: Anindya, 1991.

Gambar 4. Jarak Bangunan dalam Pekarangan dan Perubahannya
Sumber: Anindya, 1991



- 2) Dasar pengukuran perletakan bangunan dengan memakai tapak kaki, atau disebut juga dengan *Asta Wara*. Jarak antar bangunan ditentukan dengan kelipatan ukuran dasar yang diberi urutan nama (simbol) dimulai dengan sebutan *Sri, Indra, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kala, Uma, Urip* (telapak kaki melintang).

UKURAN PEKARANGAN.



Gambar 5. Ukuran Pekarangan
 Sumber: Anindya, 1991

2.3 Hubungan dengan Desa (Adat)

Pengertian Desa dalam konteks di atas, mengandung adanya unsur-unsur *Tri Hita Karana* dimana *Kahyangan Tiga* sebagai *Utpati, Sima Krama/Pawongan* sebagai *Sthiti*, dan *Palemahan* sebagai *Prakerti* serta unsur-unsur *Tri Angga* (*utama/sakral, madya/profan, dan nista/teben*) pada lingkungan desa. Desa merupakan pemenuhan konsep tata ruangnya dengan terpenuhinya: (1) atribut-atribut yang terdiri dari unsur kemasyarakatan, morfologi, fungsional, dan simbolis (Parimin, 1986); (2) pemenuhan syarat-syarat adanya wilayah teritorial/*palemahan*, warga desa/*pawongan, Kahyangan Tiga*, pemerintahan adat dan *awig-awig*; (3) simbol-simbol (Geriya dkk, 1981).

Secara konsepsi, desa merupakan *bhuana*/lingkungan kehidupan yang memenuhi filosofi *Tri Hita Karana* dan *Tri Angga*, dimana unsur *Kahyangan Tiga* sebagai perwujudan *utpati, sthiti, dan pralina, palemahan* desa sebagai perwujudan *bhuana agung* yang membentuk pola ruang sesuai dengan landasan konsep *Sanga Mandala*, serta *pawongan* desa atau *sima krama* desa sebagai perwujudan *Catur Purusaartha* melalui *Panca Yadnya* yang membentuk struktur masyarakat berdasarkan *Catur Asrama* dan *Catur Warna* sehingga terbentuknya

organisasi masyarakat sebagai pengelola kesatuan dan keharmonisan kehidupan untuk mencapai *Mokshartam Jagadhita ya ca iti Dharma*.

Dengan demikian terlihat adanya keterpautan antara tata ruang dengan tata kehidupan masyarakatnya, keterpautan ini menjadi penting dalam usaha melakukan akulturasi konsep ruang tradisional Bali ke dalam kehidupan modern. Konsepsi *Tri Pramana*, khususnya *Desa-Kala-Patra* dan *Desa-Mawa-Cara* menjelaskan adanya fleksibilitas yang tetap terarah pada substansi dasar filosofinya, dan hal ini ditunjukkan dalam keragaman pola-pola desa di Bali yang secara garis besar dapat dibedakan dalam 5 (lima) tipologi pola desa, yakni Desa Bali Kuno, Desa Bali Pegunungan, Desa Bali Dataran, Desa Bali Pantai, dan Desa Pusat Kerajaan.

Sistem kemasyarakatan sebagai pengelola desa melahirkan berbagai tipe organisasi yang berperan dalam kehidupan masyarakat, yakni (1) organisasi pemerintahan yang meliputi (a) pada tingkat desa, terdiri dari *Bendesa/Kelihan Desa*, *Penyarikan/Sekretaris*, *Bendahara Desa*, *Pemijian/Penghubung*; (b) pada tingkat *banjar*, terdiri dari *Kelihan Banjar* dan *Kesinoman* atau *juru arah*; (2) organisasi yang mengelolan tata air pada pertanian disebut *subak*; (3) organisasi sosial/*sekaa*, yakni organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi seperti *sekaa manyi*, kopi, *memula*, dan sebagainya; yang bergerak dibidang kemasyarakatan seperti *sekaa ngerabin*, gong, barong, dan sebagainya; yang bergerak dibidang religi seperti *sekaa pemangku*, *patus*, *dadia*, dan sebagainya; serta *sekaa pemuda-pemudi/sekaa teruna* dan *daha*.

Sistem organisasi ini melahirkan adanya wadah kegiatan, baik dalam bentuk bangunan maupun ruang terbuka yang menjadi kelengkapan suatu lingkungan permukiman dan penempatannya berdasarkan hierarki fungsi dalam konsep pembentukan ruang, beberapa diantaranya mengelompok dan menjadi ciri sebagai pusat lingkungan. Tata letak peruntukan fasilitas sosial mencerminkan makna yang dikandung dalam konsep harmoni, dan ini melahirkan variabel ruang yang meliputi: (1) orientasi, memberikan pengertian tentang seleksi terhadap lingkungan, pilihan-pilihan yang memberikan arah untuk mencapai harmoni; (2) proporsi, sebagai simbolisasi alam yang selaras dan penjajaran sekumpulan atau sekelompok fungsi yang sesuai dengan kebutuhan ruangnya; (3) kronologi, sebagai wujud ketertiban susunan atau bentuk ruang keduniawian yang terbentuk karena adanya urutan dari suatu prosesi. Prosesi sendiri memberikan makna adanya proses kegiatan yang tersusun secara selaras guna mencapai tujuan; dan (4) *pengurip*, memberikan dua makna yakni sebagai simbol menempatkan 'hidup' dalam suatu tatanan yang telah tersusun menjadi

satu kesatuan yang utuh/harmoni dalam tatanan kehidupan sebagai upaya menyeimbangkan berbagai bentuk (fisik) tatanan kedalam satu kesatuan yang harmoni.

Berdasarkan filosofi, konsep, dan ideologi perencanaan, maka tatanan yang memberikan makna keselarasan antara ruang dengan isinya, dalam lingkup desa memberikan pengertian adanya (1) ruang utama/*utama mandala*, yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat sakral, berada di tempat yang lebih tinggi dari area sekelilingnya, terletak dari arah *kaja-kangin* ke arah *kelod-kauh*; (2) ruang madya/*madya mandala*, diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat keduniawian (sosial, ekonomi, dan budaya), letaknya lebih rendah dari ruang utama, dari arah tengah ke arah *kauh* dan *kelod*; (3) ruang nista/*nista mandala*, diperuntukkan bagi kegiatan utilitas atau kegiatan lainnya, letaknya di bagian *kelod-kauh*.

Selanjutnya memberikan pengertian adanya teritorial sebagai wujud tempat kedudukan/wilayah dari sekelompok masyarakat yang terikat oleh kesamaan kepentingan, seperti teritorial *desa adat*, *subak*, *banjar*, *sekaa*, dan sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut berdasarkan kepentingannya memiliki wilayah/teritorial yang berbeda satu sama lainnya, sehingga menjadi tumpang tindih membentuk lingkungan sosial yang unik.

Secara spesifik, gambaran perwujudan ruang dijabarkan melalui bentuk perletakan pekarangan, fungsi peruntukan, dan jarak antar fungsi peruntukan.

- 1) Perletakan pekarangan, posisi pekarangan dalam tatanan ruang diletakkan sedemikian rupa sesuai dengan konsep harmoni dengan menghindari pantangan-pantangan seperti (a) *numbak rurung*, dimana suatu pekarangan berada diujung jalan; (b) *ngeluanin*, dimana suatu pekarangan berada di arah 'utama' dan berbatasan langsung dengan *bale banjar* atau Pura; (c) *teledu nginyah*, suatu pekarangan yang terletak diantara dua jalan dan disamping pekarangan tersebut terdapat tanah kosong yang berbatasan langsung dengan jalan melintang, memotong dua jalan tadi; (d) *ngapit*, adalah suatu pekarangan yang berada diantara dua pekarangan yang pemiliknya sama/bersaudara; (e) *kelebon amuk*; (f) *karang kelingkuhan*, adalah pekarangan yang dikelilingi oleh pekarangan sebuah keluarga lain (Bagus, 1970).
- 2) Fungsi peruntukan, ditunjukkan oleh bentuk bangunan, ketinggian, bahan, ornamen sebagai perwujudan fisiknya, sedangkan makna fungsi ditegaskan dengan *pedagingan* (perletakan unsur-unsur *pancamahabhuta* sebagai simbol memberikan 'hidup' sesuai dengan fungsi yang diharapkan) melalui proses upacara. Ketiga hal tersebut dijalankan dengan selaras sehingga

menyimbolkan keharmonisan antara *bhuana agung* dengan *bhuana alit*, membentuk karakter fungsi yang kokoh, seperti terlihat pada bangunan *Pura, Puri, Griya, Jero, Umah, Pakubon, Peken*, dan sebagainya.

- 3) Jarak antar fungsi peruntukan, dalam skala lingkungan desa dinyatakan melalui (a) dimensi tak terukur, seperti *apenimpuk* (sejauh lemparan batu), *apeneleng* (sejauh pandangan mata), *apangebahan* (sejauh tinggi bangunan direbahkan), dan sebagainya; (b) dimensi terukur, adalah ukuran dengan memakai anggota badan seperti *depa*, tapak kaki, tangan sebagai dimensi dasar. Untuk setiap fungsi peruntukan memiliki batasan kelipatan-kelipatan dari dimensi dasar, dan untuk itu diperlukan adanya perantara, atau seorang yang menguasai dan mampu menafsirkannya, yang disebut *undagi*. Seperti dikatakan oleh Salija (1975), selanjutnya peranan *undagi* sangat penting dalam proses perencanaan dan perancangan bangunan atau elemen ruang lainnya, sebagai mediator yang dapat mengatur keselarasan antara manusia dengan alam lingkungannya dalam menuju hubungan keselarasan dengan Tuhannya.

Untuk menjaga keteraturan dan ketertiban pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat, maka kesemuanya dituangkan dalam aturan-aturan yang berisi hak-hak dan kewajiban anggota masyarakat yang disebut dengan *Awig-Awig Desa*.

3. Budaya Bali dalam Masyarakat Multikultur.

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut.

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Multikulturalisme dan pluralisme memegang peranan penting dalam upaya pencapaian pembangunan. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk berkaitan dengan sistem sosial dan politik. Pluralisme adalah gagasan mengenai kemajemukan, yaitu keberadaan kesadaran mengenai keanekaragaman sebagai suatu keniscayaan yang hidup dan tumbuh dalam sebuah masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan beberapa hal berkaitan dengan pluralism yaitu: (1) sebagai sebuah interaksi (sosial) antar kelompok dalam suatu masyarakat; (2) meniscayakan adanya penghormatan dan toleransi diantara kelompok tersebut; (3) mengembangkan hidup berdampingan (ko-eksistensi); dan (4) dalam berinteraksi dilakukan tanpa (keinginan) berkonflik dan pembauran. Kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan keanekaragaman kepentingan dalam pembentukannya saling berinteraksi, mempengaruhi dan membentuk budaya bersama. Interaksi tersebut tidak selalu harmonis atau akur, gesekan atau benturan merupakan kewajaran karena masing-masing kelompok mempunyai karakteristik unik. Disharmoni tidak menutup peluang terjadinya budaya bersama yang merupakan hasil kesepakatan bersama dalam menjalin interaksi. Kesadaran bahwa masing-masing kelompok berbeda akan mendorong mencari persamaan yang bisa berguna untuk membangun budaya bersama.

Harmoni sosial dapat terbentuk ketika masing-masing kelompok dan individu dalam kelompok tersebut mengembangkan penghormatan dan toleransi. Toleransi menjadi inti penting dalam pluralisme. Pluralisme tanpa toleransi adalah jargon atau *lips service*. Penghargaan terhadap pluralisme juga harus disertai dengan semangat toleransi, tanpa toleransi maka pluralisme tidak akan terjadi atau terjaga dalam sebuah masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat memiliki aneka budaya dan setiap budaya mempunyai hak untuk hidup dan berkembang. Penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dikenal dengan multikulturalisme. Pengertian multikulturalisme sendiri memiliki tiga unsur yaitu budaya, keragaman budaya dan cara khusus untuk mengantisipasi keragaman budaya.

Tujuan hidup masyarakat Bali yang beragama Hindu adalah bersatunya *Atman* dengan *Paraatman* (*Moksartam*), melalui penyelarasan secara harmoni yang dituangkan dalam filosofi *Tri Hita Karana*. Tindakan manusia dalam usaha menyelaraskan diri dilaksanakan melalui 3 (tiga) *sarana* atau disebut juga dengan *Tri Kaya Parisuda*, yakni (1) *Kayika*, dengan menggerakkan anggota badan seperti kaki, tangan, kepala, dan sebagainya; (2) *Wacika*, melalui perkataan; (3) *Manacika*, melalui gerak fikiran (Kemenuh, 1974; Sura, 1985). Pelaksanaan penyelarasan diri tersebut di atas didasarkan pada 3(tiga) kerangka dasar, yakni:

- 1) *Tattwa*/filsafat, sebagai hakekat dari keselarasan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan yang diuraikan secara metafisis melalui tiga kriteria yang disebut Tri Pramana (Punyatmadja, 1984);
- 2) *Susila*/etika, yang merupakan aturan tingkah laku yang baik, menguraikan bentuk pemahaman benar-salah, baik-buruk, dsb. Susila ini menjadi penting

- karena mengatur pola berfikir serta tingkah laku yang meliputi fikiran, perkataan, dan perbuatan manusia (Punyatmadja, 1984; Sura, 1985);
- 3) *Upacara*, adalah merupakan rangkaian segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia (Darsana dkk, 1982).

Filosofi tersebut akan sangat mempengaruhi sikap hidup dan struktur kemasyarakatan, aktivitas/kegiatan, dan pengaturan lingkungan kehidupan masyarakat. Ketiga hal tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya yang digambarkan sebagai *manik ring cecupu* (bayi dalam kandungan) dalam membentuk sikap hidup, pola kemasyarakatan, dan lingkungan kehidupannya secara terstruktur dan runtut dari skala makro sampai komponen terkecil.

Atas dasar keselarasan hubungan kosmos tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai digambarkan dalam filosofi *Moksartham Jagadhitaya ca iti Dharma*, dan penjabaran dari tujuan ini dijelaskan dalam *Catur Purusaartha* (keselarasan empat unsur tujuan hidup yang saling terjalin dengan erat), yakni (a) *Kama*, sebagai suatu naluri hidup, keinginan, nafsu duniawi; (b) *Artha*, harta atau benda yang dapat memenuhi dan memberi kepuasan *Kama*; (c) *Dharma*, sila-sila dan budi yang luhur sebagai pengendali *Kama* dan *Artha*; (d) *Moksa*, ketentraman rohani sebagai dasar kebahagiaan abadi (Punyatmadja, 1984).

Sikap hidup untuk mencapai tujuan tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) jalan atau '*marga*' yang disebut *Catur Marga*, yakni (1) *Bhakti Marga*, adalah jalan dan usaha yang mengutamakan pencurahan rasa, dimana cinta sebagai alat dan cinta sebagai tujuan semua daya yang bergerak kearah menyatu itu adalah perwujudan cinta kasih (Cudamani, 1990); (2) *Jnana Marga*, adalah suatu jalan dan usaha untuk mencapai kesempurnaan dengan mempergunakan kebijaksanaan filsafat (Punyatmadja, 1984); (3) *Raja Marga*, suatu jalan dan usaha yang menggunakan pikiran dan pengendalian diri (Cudamani, 1990); (4) *Karma Marga*, menekankan pada pengabdian dalam wujud kerja tanpa pamrih untuk kepentingan diri, tetapi mengabdikan untuk kesejahteraan bersama (Punyatmadja, 1984; Cudamani, 1990).

Untuk dapat melaksanakan jalan/marga dengan baik dan benar, dilakukan dengan berpedoman pada 3 (tiga) kriteria/ukuran atau yang disebut dengan *Tri Pramana*. Diantaranya adalah *Desa-Kala-Patra* (tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan tempat-waktu-keadaan), *Pratyaksa-Anumana-Agama* (tindakan yang didasarkan atas pengamatan langsung-logika berpikir-pertimbangan orang lain yang dapat dipercaya), *Sa stratah-Gurutah-Swatah* (tindakan atas dasar ajaran/teori-ajaran guru-pengalaman). Karena pada dasarnya kemampuan

manusia terbatas dan pada hakekatnya manusia adalah baik, maka dalam memilih ukuran/kriteria di atas didasarkan pada kata hati yang jujur (Sura, 1985) dan dilandasi atas keyakinan terhadap *Panca Sradha* (lima bentuk keyakinan) yang meliputi (1) *Widhi Sradha*, keyakinan terhadap adanya Tuhan; (2) *Atman Sradha*, keyakinan terhadap atman yang bersumber dari *Paraatman*; (3) *Karmaphala Sradha*, keyakinan terhadap hukum sebab-akibat; (4) *Punarbhawa Sradha*, keyakinan terhadap adanya rangkaian kehidupan dalam bentuk kehidupan lainnya; (5) *Moksa Sradha*, keyakinan terhadap bersatunya *Atman* dengan *Paraatman*, atau yang disebut dengan *Moksartham Jagaditaya ca iti Dharma* (Punyatmadja, 1984).

Kondisi yang demikian ini mewujudkan struktur kemasyarakatan yang terbagi dalam 4 (empat) tipe yang didasarkan atas profesi (*Catur Warna*), yakni ilmuwan dan agamawan (*brahmin*), politisi dan militer (*kshatriya*), pedagang dan wiraswasta (*waisya*), serta kaum buruh (*sudra*), yang kesemuanya merupakan anggota badan alam (*cosmic being*) yang walaupun berbeda dalam status dan peranannya, keempat warna ini sama tingginya dalam bidangnya masing-masing, memiliki 'semangat' yang sama dalam menjalankan kewajiban dan saling membutuhkan (Chandra Bone dalam Sadya, 1990; Cudamani, 1990).

Bentuk efisiensi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilaksanakan sesuai dengan disiplin/hukum alam (*rta*) yang didasarkan atas 4 (empat) tahap kehidupan (*Catur Asrama*), yakni (1) *Brahmacarya*, adalah tahap mempersiapkan diri dalam kehidupan atau disebut juga tahap belajar dan melatih diri, bentuk disiplin pengendalian diri terhadap *indriya*; (2) *Grihastha/Garhapatya*, adalah tahap pengabdian (*yadnya*) yang merupakan masa pengamalan dari pengetahuan yang didapat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara; (3) *Wanaprastha*, adalah masa perenungan dengan memperdalam pemahaman terhadap *Dharma* dengan melepaskan diri dari keduniawian; (4) *Bhiksuka*, adalah masa penyerahan diri dengan mengajarkan pemahaman keagamaan dan hidup sederhana sebagai *Sanyasin*, mengendalikan diri dan memusatkan diri pada ketenangan (Sadya, 1990; Cudamani, 1990).

Adapun bentuk-bentuk *Yadnya* sebagai kewajiban *Grihastin* adalah *Panca Yadnya* yang meliputi: (1) *Dewa Yadnya*, penyalarsan hubungan terhadap *Paraatman* melalui *Widhi Widana*; (2) *Rshi Yadnya*, penyalarsan hubungan dengan pemuka Agama; (3) *Pitra Yadnya*, penyalarsan hubungan dengan leluhur melalui *Sawawedana*, *Astiwedana*, dan *Atmawedana*; (4) *Manusha Yadnya*, penyalarsan hubungan dengan sesama manusia, dan (5) *Bhuta Yadnya*, penyalarsan hubungan dengan unsur-unsur *Panca Mahabhuta* (Mantra, 1983).

Dalam kaitannya dengan masyarakat majemuk/plural dan multikultur adalah tantangan bagi *grihastha/garhapatya* dalam menjalankan *manusha yadnya*, dimana budaya dari luar sangat berpengaruh dalam interaksi sosial dengan masyarakat Bali. Didalam prakteknya, segala bentuk *yadnya* dikoordinir oleh Lembaga Adat sesuai dengan aturan yang diberlakukan untuk itu (*awig-awig*). *Awig-awig* mengatur hak-hak dan kewajiban masyarakat adat termasuk didalamnya adalah hukuman atas pelanggaran terhadap kewajiban-kewajibannya.

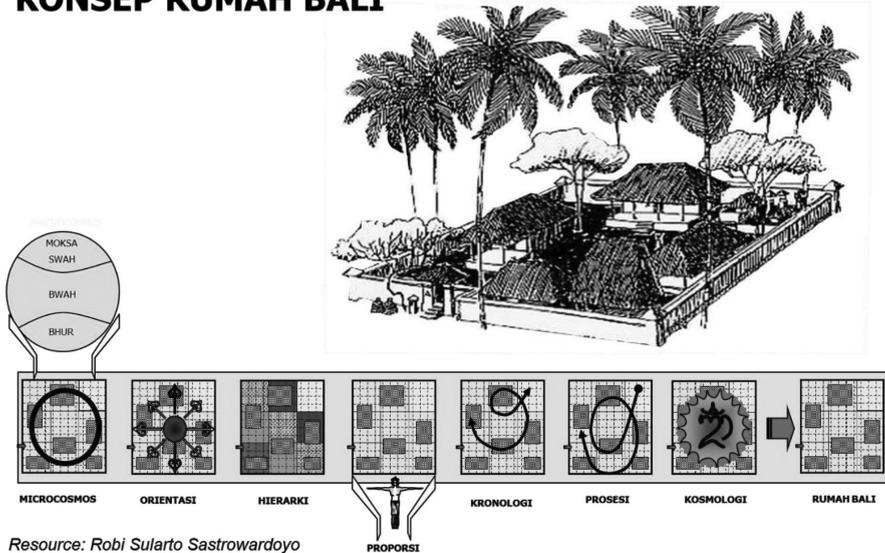
Untuk tetap menjaga eksistensi budaya Bali dalam masyarakat multikultur diperlukan adanya re-intepretasi, re-integrasi, dan adaptasi hal-hal yang terkait dengan kegiatan *yadnya* dan konsep ruang tempat tinggal. Re-intepretasi, memaknai kembali esensi budaya Bali dalam masa kini baik dalam bentuk *yadnya* dan konsep ruang tradisional Bali. Re-integrasi, menyesuaikan dengan perkembangan peradaban baru terutama peranan teknologi dalam memposisikan kembali budaya Bali dalam konteksnya. Adaptasi, memasukkan unsur-unsur baru atau unsur-unsur dari luar yang sesuai dengan budaya Bali menjadi bagian dari budaya Bali tanpa harus kehilangan akar budaya aslinya.

4. Peranan Budaya Bali sebagai Landasan Pembentukan Ruang dalam Masyarakat Multikultur

Peranan budaya Bali dalam pembentukan ruang menjadi sangat penting untuk menjaga ketahanan budaya dalam komunitas terkecil yakni keluarga. Pembentukan ruang terwujud karena adanya kesinambungan antara filosofi dalam memaknai fungsi dan wujud ruang, konsep yang disandarkan kepada dimensi yang ditetapkan berdasarkan anggota badan, sehingga besaran ruang disesuaikan antara fungsi dan kelipatan dimensi, demikian pula tata letak bangunan dalam pekarangan memakai dasar ukuran telapak kaki, sehingga besarnya merupakan kelipatan dari perhitungannya.

Gambar 6 memperlihatkan adanya sebuah proses yang memberikan makna harmoni, dimulai penggambaran bahwa rumah/tempat tinggal dimaknai sebagai mikrokosmos (*bhuana alit*) didalam alam tengah (*bwah*), filosofi ini kemudian dijabarkan dengan mempertemukan antara filosofi *luan teben* (gunung-laut) dengan sumbu bumi (matahari terbit-terbenam) sehingga memberikan gambaran adanya sembilan petak, dibagian tengah merupakan titik orientasi, dimana arah *kaja-kangin* merupakan yang tertinggi nilainya. Sembilan petak tersebut kemudian menggambarkan adanya hierarki ruang diawali dari *kaja kangin* merupakan arena *utamaning utama* (UU), kearah *kauh* merupakan

KONSEP RUMAH BALI



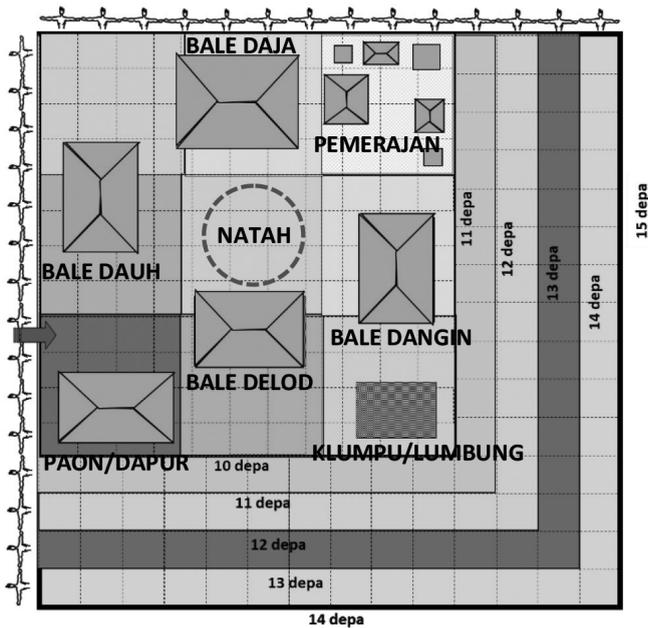
Gambar 6. Konsep Rumah Bali.
Sumber: Sudarsana, 2016.

area *utamaning madya* (UM), kemudian area *utamaning nista*. Dari arah *kangin* merupakan area *madyaning utama* (MU), tengah area *madyaning madya* (MM) yang merupakan titik orientasi, kemudian area *madyaning nista* (MN), mulai dari *kelod kangin* merupakan area *nistaning utama*, kearah *kauh* merupakan area *nistaning madya* (NM), dan *kauh* merupakan area *nistaning nista* (NN).

Proporsi menunjukkan adanya keseimbangan antara besaran dimensi dengan kondisi tubuh penghuni, ukuran disesuaikan dengan profesi dan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan kelipatan-kelipatan dimensi, ini akan menentukan tata letak bangunan, pemesian (pintu), jarak antar bangunan, besaran jenis bangunan, dan sebagainya. Kronologi menjelaskan bahwa bangunan rumah/tempat tinggal dibangun melalui proses yang menceritakan jalan kehidupan penghuninya, diawali dengan membangun dapur sekaligus tempat tidur, karena dalam hidup berumah tangga yang utama adalah bisa memasak untuk kehidupan, kemudian apabila penghasilan sudah mencukupi dibangun *bale dauh* yang dipakai untuk tempat bekerja sekaligus tempat tidur (pindah dari dapur), kemudian karena akan memiliki anak maka dibangun *bale dangin*, sebagai tempat upacara (dari bayi dalam kandungan sampai meninggal)

sebagai persiapan apabila sang bayi akan lahir, dalam proses perjalanannya sang anak semakin besar maka dibangun *bale delod* yang berfungsi sebagai tempat tidur anak. Dari awal proses sampai terbangunnya *bale delod*, *Pemerajan/sanggah*/tempat persembahyangan masih bersifat sementara (*turus lumbang*), dan dibelakang dapur dibangun kandang babi sebagai tambahan penghasilan, demikian pula dibangun lumbang (tempat penyimpanan padi) di area *nistaning utama* (NU) sebagai simbol tabungan. Kemudian dimasa tua maka dibangun *bale daja* sebagai tempat tidur orang tua, baru membangun *pemerajan/sanggah* secara permanen.

Prosesi menceritakan sebuah proses kehidupan yang ditunjukkan melalui urutan pembangunan, dimana fungsi bangunan merupakan simbol proses kehidupan manusia *grihastha* (berumah tangga). Kosmologi ingin menjelaskan tempat tinggal masyarakat Bali adalah merupakan simbol mikrokosmos/*bhuana alit* (alam kecil) yang merupakan perwujudan dari makrokosmos/*bhuana agung*/alam besar yang selaras, seimbang, dalam harmoni. Sekaligus juga merupakan simbol makrokosmos/*bhuana agung*/alam besar bagi penghuninya yang disimbolkan sebagai mikrokosmos/*bhuana alit*/alam kecil.



Gambar 7. Variasi Besar Ukuran Besar Pekarangan
 Sumber: Sudarsana, 2016.

Variasi besaran pekarangan yang diukur berdasarkan anggota badan penghuninya, dasar ukuran yang dipakai adalah *depa* (selebar rentangan tangan, diukur dari ujung jari ke ujung jari). Besaran pekarangan akan diikuti dengan besaran bangunan dan perhitungan jarak antar bangunan, kesemuanya akan saling menyesuaikan sehingga tetap terjadi keseimbangan, keselarasan yang harmoni, antara penghuni dengan keseluruhan proporsi jarak antar bangunan, besaran dan wujud bangunan.

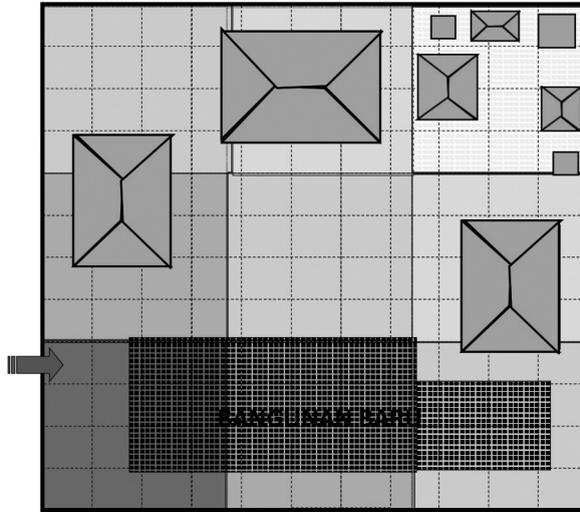
Dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi menyebabkan kebutuhan didalam bangunan rumah tinggal sudah mulai bergeser dan tidak dapat lagi memenuhi tuntutan sebagaimana diatur dalam konsep budaya Bali. Pengaruh arus urbanisasi yang semakin deras, menyebabkan bangunan di kawasan kota menjadi semakin berubah baik bentuk maupun fungsinya.

Pertama faktor perkembangan teknologi, pengaruhnya sangat kuat dan bersifat mendasar, terutama adalah dasar ukuran yang dipakai, berubah dari bagian anggota badan penghuninya menjadi metrik. Pemakaian metrik ini sangat dipengaruhi oleh kesepakatan dunia dalam penggunaan ukuran, sehingga bangunan Bali mengalami perubahan dalam penentuan dimensi dasar, dari *depa* menjadi meter, dari *lengkat* menjadi cm. Kemudian diikuti dengan pemakaian material dan ornamen, sistem konstruksi berubah total, dari konsep struktur bidang menjadi struktur kerangka, demikian pula dengan fungsi ruang, pengaturan ruang, dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, pada tempat tinggal lama, beberapa bangunan bentuk dan fungsinya berubah, yang pertama adalah *bale delod* dan dapur yang dijadikan satu dan kemudian menjadi bangunan bertingkat. Struktur bangunan barupun berubah menjadi struktur rangka, disamping karena bertingkat, juga karena pembagian fungsi ruang menjadi berubah.

Perubahan terus berlanjut, sampai tersisa adalah *bale dangin* dan *Pemerajan*, sedangkan bangunan lainnya sudah berubah menjadi bangunan *monolith*, tidak lagi bangunan *compound*. Untuk bangunan baru, hanya dicirikan adanya *Pemerajan* dan *Tunggu Karang* saja, sisanya sudah menjadi bangunan modern, kondisi ini cukup mengkhawatirkan ditinjau dari sisi budaya, karena ketahanan budaya menjadi rapuh dan mudah untuk dirubah, sehingga kehilangan makna dari konsep yang dibangun.

Dengan semakin derasnya arus urbanisasi menyebabkan pembangunan yang tidak lagi mengindahkan konsep budaya Bali, terutama bagi para pendatang yang non Bali. Ini menyebabkan masyarakat Bali meniru pembangunan seperti yang dilakukan oleh warga pendatang. Pembangunan perumahan dengan



Gambar 8. Perubahan Bentuk dan Fungsi Bangunan pada Rumah Tinggal
Sumber: Sudarsana, 2016.

fasilitas perbankan mempercepat proses kehilangan makna budaya tersebut, karena mereka membangun dengan seefisien mungkin untuk menekan harga dan memenuhi skema perbankan.

Dalam era teknologi dengan masyarakat multikultur seperti saat ini dan dengan mempertimbangkan ketahanan budaya masyarakat serta kebutuhan masa depan, kiranya aspek filosofi dan konsep budaya Bali didalam pembentukan ruang menjadi memiliki nilai strategis. Filosofi dan konsep dimaksud dapat memberikan gambaran pemahaman kepada generasi muda dalam keluarga, bagaimana proses keseimbangan dan keselarasan dalam harmoni itu diwujudkan dalam bentuk tempat tinggal (*home*), bukan rumah (*house*).

Untuk itu peran pemerintah dan perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan re-intepretasi, re-integrasi dan adaptasi filosofi dan konsep budaya Bali dalam perwujudan ruang melalui penelitian mendalam dan menetapkannya dalam hukum formal sehingga menjadi acuan bagi masyarakat, terlepas dari sudut pandang Agama, filosofi dan konsep ini dapat dimaknai sebagai bentuk penerapan keselarasan dan keseimbangan dalam harmoni antara manusia dengan alam dan manusia dengan sesama.

Dari sisi dimensi, kiranya perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kesamaan dimensi dasar antara *sikut* (Bali) dengan metrik (modern). Secara ergonometri, sebenarnya dapat dicari titik temu besaran dimensi dasar dengan

menetapkan unit fungsi terkecil, kemudian menetapkan kelipatannya sesuai dengan filosofi dan konsep budaya Bali. Sebagai contoh unit fungsi terkecil adalah 0,1 kalau kita persepsikan adanya tiga hal yakni: *utama*, *madya*, *nista*, menjadi 0,3 cm, maka untuk mengukur lahan tinggal, *depa* pemilik dihitung merupakan kelipatan berapa x 0,3 cm, sehingga dapat disinkronkan dengan konsep budaya Bali, dengan demikian 0,3 cm dapat dijadikan dimensi dasar (guru) untuk sikut/ukuran sesuai budaya Bali.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Ketahanan budaya Bali sebagai landasan perwujudan ruang harus dimulai dari keluarga, karena didalam keluarga sudah ditunjukkan dalam bentuk perwujudan bangunan tempat tinggal, bagaimana proses sebuah kehidupan dijalankan secara harmoni. Filosofi Bali yang mendasari perwujudan tempat tinggal (*Karang Paumahan*) memberikan pemahaman sebagai simbol *bhuana alit* dalam konteks alam semesta (lingkungan) sebagai *bhuana agung*. Dilain pihak juga memberikan pemahaman bahwa tempat tinggal merupakan *bhuana agung* bagi para penghuninya sebagai *bhuana alit*, keselarasan hubungan diantaranya menunjukkan keseimbangan dalam harmoni.

Konsep budaya Bali dalam kaitannya dengan keselarasan hubungan tersebut diturunkan dalam penetapan dimensi dasar yang memakai anggota badan (*bhuana alit*) untuk menyelaraskan dengan *bhuana agung* (tempat tinggal), selanjutnya menempatkan dirinya (manusia) sebagai pusat (titik orientasi) penyelarasan dengan *bhuana agung* secara terstruktur (dengan bangunan, pekarangan, lingkungan, desa, sampai pada alam semesta).

Perkembangan teknologi menyebabkan pemakaian dimensi dasar menjadi berubah dari ukuran anggota badan menjadi metrik, menjadikan filosofi dan konsep budaya Bali semakin rentan terhadap perkembangan. Namun demikian masih terdapat titik temu untuk mendapatkan penyelarasan diantara keduanya, sehingga filosofi dan konsep masih dapat diterapkan.

Perwujudan tempat tinggal berlandaskan budaya Bali tersebut juga memberikan gambaran pembelajaran terhadap proses kehidupan manusia, proses pembangunannya berceritera tentang tahapan kehidupan yang dilalui setiap manusia (*grihastha asrama*). Oleh karena itu, dalam masyarakat multikultur seperti saat ini diperlukan pendalaman penelitian terhadap filosofi dan konsep agar dapat diterapkan dan menjadi landasan hukum formal untuk dapat dipakai sebagai acuan bagi masyarakat (multikultur).

5.2 Saran

Dalam kaitannya dengan pembangunan beridentitas, maka budaya lokal dapat dipakai sebagai *mainstream* dalam masyarakat multikultur, sehingga tatanan bermasyarakat dapat menjadi lebih harmonis dengan tetap menerapkan budaya masing-masing, untuk itu diperlukan adanya peran dari tiga pilar: (1) Perguruan Tinggi melakukan penelitian mendalam terhadap filosofi dan konsep budaya Bali yang dapat dipakai sebagai landasan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat, menuju masyarakat yang harmoni; (2) Pemerintah melakukan penetapan hasil kajian akademik dari Perguruan Tinggi untuk menjadi landasan pembangunan yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh masyarakat dalam bentuk hukum formal; (3) Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa penerapan filosofi dan konsep budaya Bali ini bukan dalam konteks Agama, tetapi suatu cara untuk mendapatkan keselarasan dan keseimbangan dengan alam dan sesama mahluk dalam bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Anindya Putra, I Gusti Putu. 1991. Kajian ke arah pendekatan konsep ruang tradisional Bali dalam penataan ruang kota dan penelusuran syarat-syarat ruang dari masyarakat sebagai landasan perwujudan ruang kota berwawasan identitas (studi kasus Kota Gianyar). (*Tesis*). Fakultas Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung.
- Geriya, I Wayan dkk. 2010a. *Kebudayaan Unggul, Inventori unsur unggulan sebagai basis Kota Denpasar Kreatif*. Denpasar: Bappeda Kota Denpasar.
- _____. 2010b. *Pusaka Budaya, Representasi Ragam Pusaka dan Tantangan Konservasi di Kota Denpasar, Bali*. Denpasar: Bappeda Kota Denpasar.
- Haryadi dan Setiawan, B. 1995 *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Teori Metodologi dan Aplikasi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud RI.
- Koentjaraningrat. 1997a. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 1997b. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lucas, D.,P. Mc. Donald, E. Young, and C. Young., 1990. *Pengantar Kependudukan* (terjemahan), Yogyakarta: Gajahmada Univ. Press.
- Rapoport, Amos. 1969. *House Form and Culture*. Englewood Cliff: Prentice Hall.
- _____. 1977. *Human Aspect of Urban Form: Towards Man-Environment Approach to Urban Form and Design*. Oxford: Pergamon Press.
- _____. 1979. An Approach to Designing Third World Environments. *Third World Planning Review*, 1 (1) : 23-44.

- Sudarsana, I Made Gede. 2016, Traditional Balinese Architecture. *Paper* (tidak dipublikasikan).
- Triguna, Ida Bagus Gde Yudha, editor. 2008. *Kebudayaan dan Modal Budaya Bali dalam Teropong Lokal, Nasional, Global (Memori Purnabhakti untuk Antropolog dan Budayawan I Wayan Geriya)*. Denpasar: Widya Dharma.

Deskripsi Kritis Identitas Arsitektur Tradisional Bali dalam Perspektif Kekerasan Simbolik



I Putu Gede Suyoga

*Tradisi, sosial, dan politik menjadi tempat persembunyianmu
Terajut cantik di kedalaman tradisi stratifikasi sosial
Bahkan meresap dalam panduan dan praksis arsitektural
Tiada terasa sebagai dominasi
Karena memang tidak menyakiti fisik
Halus dan meninabobokan
Dalam kenyamanan dan kemapanan
Bahkan terasa natural-alamiah
Sampai heterodoxa menyadarkannya
lewat wacana era kolonial sampai milenial*

1. Pendahuluan

Kekerasan simbolik merupakan istilah yang dikenal dalam pemikiran Pierre Bourdieu, mengacu pada dipergunakan kekuasaan atas simbol-simbol untuk melakukan kekerasan. Kekerasan dalam konteks ini dipahami bukan dalam arti kekerasan fisik radikal, misalnya dipukul, perang terbuka, atau sejenisnya, namun lebih bersifat persuasif. Kekerasan simbolik bersifat halus, bahkan tidak dirasakan sebagai “kekerasan”, karena sudah menjadi habitus suatu masyarakat.

Kekerasan simbolik telah memasuki hampir segala aspek kehidupan termasuk ranah arsitektur. Arsitektur Tradisional Bali (ATB) juga sarat akan

kekerasan simbolik. Hal ini dapat dilihat dari dasar pembentukannya yang didasari oleh status sosial (kasta) pemiliknya. Kelompok *Triwangsa* (*Brahmana*, *Ksatrya*, dan *Wesia*) sebagai bangsawan tradisional Bali menempati hunian bernama *griya*, *puri* dan *jero*. Ketiga tipe hunian ini dibangun dengan standar ukuran paling besar, berbeda dengan hak penggunaan standar hunian (*umah*) untuk kaum *prabali* dan *jaba wangsa* sebagai masyarakat biasa, hanya berhak atas standar ukuran kecil (Asta Kosala Kosali).

Ketentuan standar ukuran berdasarkan status sosial tradisional ini, kemudian mewujudkan menjadi berbagai tipe bangunan yang hanya boleh atau berhak dipakai oleh golongan tertentu saja. Setiap kelompok warga memiliki hak penggunaan jenis ukuran dan tipe bangunan yang menjadi identitas pembeda satu dengan lainnya. Hal ini mengindikasikan praktik kekerasan simbolik dalam ranah ATB sudah berlaku sejak era Bali Pertengahan, yakni sejak ditetapkannya ketentuan dalam bahasa manuskrip *Asta Kosala Kosali* 'panduan arsitektur tradisional' tersebut sebagai kebijakan politik *Dalem* 'raja tertinggi' Bali pada era kerajaan dulu.

Relasi bahasa dan kekuasaan sebagai hubungan kekuatan simbolis yang membentuk realitas inilah disebut Bourdieu (1995: 66) sebagai kuasa simbolik. Kekuasaan simbolik inilah yang pada akhirnya menuntut terbentuknya legitimasi untuk diakui, diyakini, ditaati, dan dianggap sebagai kebenaran. Ada suatu bentuk persetujuan terhadap sudut pandang kelompok dominan yang ditanamkan secara halus. Situasi seperti itu diistilahkan oleh Bourdieu (1994:129) sebagai *doxa*. *Doxa* merupakan sudut pandang penguasa atau yang dominan yang menyatakan diri dan memberlakukan diri sebagai sudut pandang yang universal. Dominasi simbolik membuka peluang untuk terciptanya kekerasan simbolik.

Kekerasan didefinisikan oleh Lardellier (dalam Haryatmoko, 2010: 127) sebagai prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Di dalam kekerasan terdapat unsur dominasi kepada pihak lain dalam berbagai wujud, bisa verbal, fisik, gambar, atau psikologis. Ungkapan nyata kekerasan bisa berupa manipulasi, fitnah, pemberitaan yang tidak benar, kata-kata yang menyudutkan, penghinaan, atau kata-kata kasar yang merendahkan dan mengancam. Kekerasan yang paling sulit di atasi adalah kekerasan simbolik yang beroperasi melalui wacana. Kekerasan ini disebut simbolik karena dampak yang biasa dilihat dalam kekerasan fisik tidak tampak. Tidak terdapat luka, tidak ada akibat traumatis, tidak muncul kecemasan, tidak tampak adanya ketakutan, bahkan korban tidak merasa mendapatkan kekerasan dan tidak merasa didominasi. Kekerasan simbolik berjalan karena pengakuan,

kesediaan dan keterlibatan suka rela pihak yang didominasi (Bourdieu, 1991: 56). Kekerasan simbolis, menurut Bourdieu adalah pemaksaan sistem simbolisme dan makna (misalnya kebudayaan) terhadap kelompok atas kelas sedemikian rupa sehingga hal itu dialami sebagai sesuatu yang sah (Jenkins, 2004: 157). Dampak kekerasan simbolik itu halus, berlangsung melalui ketidaktahuan, pengakuan, atau perasaan korbannya (Haryatmoko, 2010: 128).

Sejauh mana praktik kekerasan simbolik tersembunyi dalam praktik arsitektur yang beridentitas Arsitektur Tradisional Bali yang sudah mapan selama ini, menjadi sesuatu yang penting dan menarik untuk dikaji. Berdasarkan pernyataan tersebut maka fokus studi ini adalah mengkaji aspek-aspek kekerasan simbolik dalam identitas Arsitektur Tradisional Bali di Bali.

Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif interpretatif. Pengumpulan data dilakukan dari kepustakaan, wawancara, serta observasi lapangan. Data dianalisis dengan menggunakan Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu. Studi hanya dibatasi pada panduan bangunan tradisional Bali yakni *Asta Kosala Kosali* khususnya bagian dimensi tata ruang dan jenis bangunan berdasarkan tradisi stratifikasi sosial yang berlaku di Bali, dan praksisnya menjadi identitas jenis-jenis bangunan tradisi yang berstil Arsitektur Tradisional Bali yang ada di Bali.

2. Stratifikasi Tradisional Masyarakat Bali

Stratifikasi atau status sosial tradisional “kasta” menjadi acuan dalam penentuan standar ukuran tata ruang dan bangunan Arsitektur Tradisional Bali. Konsep *catur warna* yang kemudian didegradasi sebagai *catur kasta* menekankan perbedaan hak penggunaan standar ukuran dalam rancang bangun. Dengan demikian standar ukuran menjadi sebuah simbol yang dapat dibaca sebagai status sosial (modal simbolik). Selanjutnya perbedaan status sosial akan membedakan cara pandang dan tata prilaku masyarakat tradisional Bali (kuasa simbolik).

Standar ukuran mendasari pembentukan identitas fisik arsitektural. Secara semiotik, bentuk fisik karya arsitektur berupa ruang dan bangunan merupakan sebuah penanda. Penanda ‘bentuk’ secara epistemik mengandung petanda ‘makna’. Interaksi makna melalui simbolik inilah menjadi salah satu pergulatan identitas simbolik dalam masyarakat tradisional Bali. Upaya-upaya penguasaan modal simbolik sejatinya adalah dalam rangka kuasa simbolik. Selanjutnya kuasa simbolik akan memicu praktik kekerasan simbolik dalam praktik kultural masyarakat Bali.

3. Bentuk Kekerasan Simbolik pada Arsitektur Tradisional Bali (ATB)

Pada konteks praktik kekerasan simbolik dalam kearsitekturan tradisional Bali berdampak pada fisik arsitektural dan konsepsinya. Semakin tinggi status sosial seseorang atau modal simboliknya, semakin potensial untuk dihormati, atau dengan kata lain dalam konteks arsitektural, seseorang yang berstatus tinggi berhak menggunakan standar ukuran yang statusnya lebih tinggi, seperti yang termuat dalam *Asta Kosala Kosali*. Secara fisik arsitektural ukuran atau dimensi lahan maupun bangunannya akan menjadi lebih besar, sehingga “rasa ruang” lebih nyaman atau tampak lebih lapang, dan bangunan tampak lebih monumental atau lebih agung. Hal terakhir ini sangat dipentingkan dalam menunjang identitas kuasa simbolik pemilikinya.

Permainan simbol sering kali merupakan wujud relasi kuasa antar manusia, simbol interpretatif dan tidak mutlak, tidak untuk menaklukkan fisik dan pikiran, tetapi perasaan. Simbol menjadi alat penting dalam permainan kekuasaan. Simbol mengukuhkan kekuasaan dan pada sisi lain kekuasaan melahirkan simbol. Simbol digunakan seseorang agar dipersepsi oleh orang lain seperti yang diharapkan. Jika berhasil, maka akan memperoleh keuntungan sosial berupa rasa hormat, wibawa, kekaguman atau semacamnya. Bangunan merupakan tanda identitas, status, kekuasaan, dan sebagainya. Bangunan dapat dibaca sebagai teks naratif dengan makna spesifik (Danesi, 2011: 264-265).

Pada konteks ATB, standar ukuran yang tercantum dalam manuskrip panduan arsitektur yakni *Asta Kosala Kosali*, dipahami sebagai patokan ukuran atau dimensi elemen-elemen arsitektural, seperti ukuran penampang tiang, tinggi tiang, dimensi lahan pekarangan, jenis/tipe bentuk bangunan, selalu dikaitkan dengan “hak” seseorang akibat status sosial (kasta) yang disandangnya.

Stratifikasi sosial tradisional etnis Bali terdiri dari *Brahmana*, *Ksatria*, *Wesia*, sebagai tiga kelompok warga bangsawan tradisional Bali. Ketiga kelompok warga ini disebut *triwangsa*, bertempat tinggal di wilayah “jeroan” (di dalam), sedangkan kaum *jaba wangsa* bagi kelompok masyarakat yang menempati wilayah di “jaba” atau di luar hunian tiga kelompok warga tersebut. Sebutan *jaba wangsa* ini disandang oleh masyarakat biasa yakni kaum *prabali*, dan kelompok warga yang diturunkan atau bahkan dimatikan keluhuran/kewibawaan kewangsaannya (*patita wangsa*), serta kaum yang menyembunyikan kewangsaan (*nyineb wangsa*), demi kelangsungan hidup di era perang antar kerajaan dulu.

Kepemilikan status sosial dengan sendirinya sudah mengandung kuasa simbolik, selanjutnya dengan kuasa simbolik kelompok dominan berpotensi melakukan kekerasan simbolik. Domestikisasi kekerasan simbolik “pembiasaan”

kekerasan simbolik tidak disadari, karena sangat halus, bahkan sudah menjadi habitus keseharian masyarakatnya. Domestikisasi kekerasan simbolik pada ATB sudah berjalan mapan sekitar enam abad lebih, yakni sejak kemenangan ekspansi kerajaan Majapahit atas kerajaan Bali Kuno (1343 Masehi).

Praktik kekerasan simbolik dalam ATB berbentuk diskriminasi kedudukan dan pengebirian hak. Bentuk-bentuk kekerasan simbolik tersebut muncul melalui mekanisme kekerasan simbolik berupa *doxa*. *Doxa* merupakan sudut pandang penguasa, bisa berupa mitos atau dianggap sebagai kebenaran. *Doxa* yang muncul dalam praktik ATB adalah pandangan yang menunjukkan bahwa standar ukuran untuk *triwangsa* merupakan salah satu kekuasaan simbolis kaum *triwangsa* atas *jaba wangsa*.

Kekerasan simbolik dalam karya ATB muncul berbentuk perlakuan diskriminasi kedudukan dan hak karena kasta yang tidak disadari. Makna diproduksi secara simbolik dalam bahasa (Barker, 2005: 10). Tampak pada bahasa pernyataan dalam manuskrip *Asta Kosala Kosali* "ini ukuran untuk *brahmana, ksatria, wesya, prabali (jaba wangsa)*". Dengan demikian, makna perbedaan (kasta) yang diproduksi secara simbolis dalam tradisi Bali membuka peluang terciptanya kekerasan simbolik melalui dominasi identitas kelas.

Pengaruh kuat wacana kasta sebagai stratifikasi sosial tradisional pada era Bali Pertengahan atau era Majapahit tampak jelas secara arsitektural dari perbedaan jenis pintu masuk dan perbedaan penggunaan dimensi tata ruang dan tata bangunan. Identitas berdasarkan jenis (desain dan penamaan) pintu masuk untuk setiap warga berbeda-beda, yakni pintu masuk untuk kaum *brahmana* disebut *bintang aring*, *ksatria* 'raja utama' disebut *kori agung* (atapnya bertumpang), bagi kelompok *wesya* dan juga raja bawahan pintu huniannya disebut *kori* saja (tanpa tumpang atap), sedangkan kelompok *jaba wangsa* 'masyarakat umum' pintu masuk huniannya dinamakan *angkul-angkul*.

Identitas dari perbedaan penggunaan bahan bangunan dan ornamen pada pintu rumah mereka, juga menjadi petunjuk kekerasan simbolik. Kaum *Brahmana* berhak memakai bahan bata merah, atap ijuk atau kombinasi batu paras dengan batu bata merah. Kaum *Ksatria* juga menggunakan bahan batu bata merah dan kombinasi batu paras atau bisa juga menggunakan hanya satu jenis material misalnya bata merah atau batu paras saja, demikian pula sama hak penggunaan material pintu masuk hunian bagi kaum *Wesya*. Penutup atap korinya boleh memakai ijuk atau alang-alang atau berstruktur batu bata/paras. Namun, bagi kaum *jaba wangsa* hanya boleh menggunakan bahan tanah liat mentah dan bata cetak mentah untuk badan pintu masuk huniannya dengan penutup atap

alang-alang. Kekerasan simbolik melalui pemakaian bahan bangunan ini juga diterapkan pada bangunan-bangunan *bale* dalam pekarangan rumah masing-masing wangsa tersebut.

Hak pemakaian ornamen juga demikian, hanya dominan kaum *triwangsa* saja yang boleh menggunakan ornamen yang lengkap dan diukir, sementara kelompok *jaba wangsa* tidak berhak menghias hunian mereka dengan bentuk-bentuk ragam hias. Dengan demikian identitas bentuk bangunan hunian kaum *jaba wangsa* hanya polos sederhana tanpa ornamen. Bourdieu menyatakan sistem dominan menemukan ekspresinya dalam berbagai praktik kultural (Bourdieu, 2016: ix), dalam konteks ini pada praksis tata ruang dan tata bangunan yang beridentitas ATB.

Kekerasan simbolik dalam ukuran ATB yang terungkap tersebut berpusat pada adat, tradisi, dan politik (kerajaan). Pada sisi yang lain, patut diakui kekerasan simbolik berimplikasi pada pelestarian stil ATB, atau dapat disebut sebagai pemertahanan identitas bangunan yang berarsitektur tradisional Bali.

Bourdieu (dalam Fashri, 2014: 198) menunjukkan bahwa bahasa maupun wacana merupakan praktik kekuasaan yang digunakan oleh kelompok dominan untuk mengontrol yang didominasi. Sebaliknya, bagi kelompok marjinal yang didominasi, nantinya bahasa dan wacana tersebut akan digunakan untuk mempertanyakan, melawan, dan mendelegitimasi kekuasaan simbolik yang diciptakan oleh kelompok dominan.

Kekerasan simbolik yang diungkap dalam ATB tersebut, juga mengalami perlawanan yang juga bersifat simbolik, yaitu berupa *heterodoxa*. *Heterodoxa* adalah cara pandang yang bertentangan dengan *doxa*, bahkan melawan *doxa* itu sendiri. Keruntuhan era kerajaan oleh modernisasi sejak era kolonial (abad ke-19) dan pasca kemerdekaan, sekaligus meruntuhkan sistem kebijakan politik kerajaan. Hal ini membuka peluang *heterodoxa* dalam ranah identitas ATB. Maraknya pembangunan modern yang tidak mengacu pada ketentuan standar ukuran ATB oleh etnis Bali (baik kelompok *tri wangsa* maupun *jaba wangsa*), merupakan bentuk-bentuk *heterodoxa* tersebut. Praktik *heterodoxa* semakin marak karena masyarakat Bali modern lebih berkompromi dengan wacana praktis, efisiensi, dan tren langgam/gaya/stil arsitektur kekinian.

4. Penutup

Akhirnya, dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Praktik Arsitektur Tradisional Bali (ATB) menunjukkan adanya kekerasan simbolik yang sangat kuat relasinya dengan wacana kasta etnis Bali, dan menjadi

refleksi identitas kearsitekturan Bali era Bali Pertengahan; (2) Kekerasan simbolik dalam praktik ATB berbentuk *doxa*, melalui mekanisme adat, tradisi, dan politik (kerajaan); (3) Kekerasan simbolik tersebut juga mendapat perlawanan secara simbolik yaitu melalui *heterodoxa*.

Membaca fenomena kekerasan simbolik dalam identitas praktik ATB dapat memberikan kesadaran bahwa banyak praktik-praktik kekerasan simbolik yang akhirnya mendapat perlawanan dalam perkembangan jaman oleh langgam/gaya/stil arsitektur baru maupun wacana sosio-kultural baru.

Daftar Pustaka

- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies:Teori dan Praktik*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Bourdieu, Pierre. 1991. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- _____. 1994. *The Field of Cultural Production: Essay on Art and Literature*. Randhal Johson (Ed.) Cambridge: Polity Press.
- _____. 1995. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- _____. 2016. *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Danesi, Marcel. 2011. *Pesan, Tanda, dan Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Fashri, Fauzi. 2014. *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Haryatmoko, 2010. *Membongkar Rezim Kepastian, Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta, Kreasi Wacana.

Aspek Sosio-Kultural dalam Tatahan Ruang Permukiman Tradisional di Desa Adat Penglipuran, Bali: Sebuah Referensi Penciptaan Permukiman yang Adaptif Bagi Penghuninya



Wahyudi Arimbawa

1. Pendahuluan

Terminologi permukiman tradisional selalu berasosiasi dengan tatahan permukiman yang bersifat harmoni dengan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mewedahi kegiatan hidupnya yaitu kerja, rekreasi, bertempat tinggal dan aspirasi/cara pandang hidup (Samadhi, 2004). Permukiman tradisional bisa dikatakan sebagai hasil adaptasi manusia terhadap lingkungannya, diwujudkan dalam bentuk budaya berupa konsep, tata nilai, norma dan aturan adat yang sifatnya mengikat. Sebuah permukiman tradisional juga biasanya dianggap sebagai ruang yang mempunyai "makna" bagi penghuninya. Hadir sebagai representasi keadaan kognitif (ingatan mental) penghuninya. Disatu sisi, bermukim berkaitan erat dengan tempat-tempat dan pola-pola ruang yang diciptakan oleh manusia. Artinya ruang harusnya mempunyai tingkat kongruensi yang tinggi terhadap lingkungan, dan memiliki daya dukung terhadap kehidupan masyarakat didalamnya. Oleh sebab itu, tempat-tempat yang terbentuk dapat dianggap memiliki kualitas yang baik karena memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap gaya dan cara hidup masyarakat penghuninya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Rapoport (1973) menegaskan bahwa terdapat keberaturan

dan ketertataan atau sebagai *order and regularities* dalam ruang permukiman tradisional, dimana konteks budaya setempat sangat mempengaruhi tataan ruangannya. Tataan ruang (*order*) permukiman yang unik diperoleh karena adanya perbedaan aturan yang merefleksikan keinginan, nilai, hasrat, pandangan dan orientasi ritual dari setiap kelompok masyarakat yang sekaligus merepresentasikan kesesuaian antara ruang sosial dan ruang fisik dalam kontelasi tataan ruang permukiman tradisionalnya.

Permukiman tradisional juga selalu berkaitan dengan proses ritual, dimana keseluruhan rangkaian ritual yang ada dimaksudkan untuk menciptakan tataan ruang yang harmoni, menjaga eksistensi teritori adat dan keberlanjutan prosesi budaya dan nilai yang ada. Keberlanjutan eksistensi teritori ruang adat berkaitan secara fundamental dengan tataan (*order*) serta ancaman (*threats*) bagi keberlanjutan eksistensi ruang kultural yang ada. Oleh sebab itu Douglas (1977) menyatakan untuk menjaga ruang ritual dan eksistensi teritori ruang dapat dilakukan dengan media kekuasaan, dimana hukum alam dimanifestasikan dalam bentuk berbagai sanksi moral. Suatu ritual tertentu dianggap memiliki dua sisi; mereka mengidentifikasi zona untuk membersihkan diri (mensucikan diri) dan keteraturan, sementara di luar itu adalah polusi dan kekacauan, dan secara ritual menjaga tubuh dari hal-hal berbahaya. Selanjutnya berbagai acara ritual ini berkaitan secara erat dengan batas (ruang) arsitektural, karena ritual secara fundamental menyangkut tataan (*order*) serta ancaman terhadap tataan itu, dan dilakukan dengan media kekuasaan. Berbagai peristiwa dan proses ritual akan terkait dengan tempat (*place*) tertentu, dan memiliki suatu *setting* atau tataan tertentu pula (Douglas, 1977). Altman dalam Sasongko (2005) kemudian mendefinisikan peran budaya dalam membentuk hubungan antara manusia dengan lingkungan dimana mereka bertempat tinggal dalam empat bagian yaitu; Pertama, budaya didasarkan atas suatu tataan kepercayaan dan persepsi, tata nilai dan norma, kelompok sosial dan kebiasaan; Kedua, dalam budaya termasuk pola-pola umum yang digunakan perasaan dan perilaku kelompok; Ketiga, adanya perubahan terhadap kepercayaan, tata nilai, dan bentuk perilaku dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan Keempat, budaya dihadirkan dalam lingkungan fisik, sehingga rumah-rumah dan permukiman dan seluruh buatan manusia menggambarkan nilai-nilai budayanya.

Di Bali, budaya merupakan landasan filosofis terbentuknya lingkungan permukiman, baik desa atau kota. Dalam kaitannya dengan pola keruangan permukiman tradisional, perwujudan budaya masyarakat Bali menimbulkan (Wiratmaja, 2005); Pertama, adanya pola-pola permukiman dalam masyarakat

Bali seperti *Pura Kahyangan Tiga* serta radius kesuciannya, *bale banjar*, ruang terbuka (*jaba pura*, *pempatan agung*, dan *setra/kuburan*) dan berbagai atribut kemasyarakatan (morfologi, sosial, fungsional dan simbolis); Kedua, adanya aturan dan pantangan dalam penempatan dan penataan fungsi ruang; Ketiga, adanya konsep yang mengatur zonasi dan peruntukkan ruang permukiman baik skala makro, meso dan mikro; Keempat, adanya aturan baku dalam pengukuran petak pekarangan dan bangunan, berimplikasi pada kebutuhan lahan yang relatif luas. Kehidupan di Bali sendiri secara etnis kultural dianggap relatif lebih homogen. Fleksibilitas ruang, waktu dan tempat mempunyai skala prioritas bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakatnya. Termasuk kegiatan memanipulasi ruang bermukim sesuai dengan perspektif pemahaman ruang komunal yang diinginkan. Namun seiring dengan waktu, penguatan konsep lokal dalam membentuk tatanan ruang permukiman cenderung mengalami ambivalensi antara sistem pengetahuan lokal dengan perencanaan konvensional. Hal ini tentu saja berdampak pada biasanya konsep lokal yang bisa diadopsi dalam unit perencanaan ruang tradisional Bali. Perbedaan geografis, perbedaan pandangan sosial budaya serta psikologi perilaku antara Bali dataran dengan Bali pegunungan juga mempengaruhi perspektif dan aplikasi konsep lokal dalam tatanan ruang permukimannya.

Pemahaman aspek budaya dalam kerangka tematis penciptaan ruang bermakna merupakan aspek legal-formal yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan pada masyarakat tradisional. Aspek ini terdiri atas sistem nilai dan konsep lokal, serta sistem kepercayaan dan pengetahuan setempat, atau secara umum budaya setempat (Samadhi, 2004). Demikian juga yang terjadi pada konteks permukiman tradisional pada desa-desa di Bali. Faktor legitimasi atribut desa adat sebagai desa yang bersifat otonom, memberikan kewenangan secara lebih kepada desa adat dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa adatnya secara independen. Termasuk bagaimana menterjemahkan konsep sosio-kultural dalam menciptakan tatanan ruang permukiman tradisionalnya yang berakar pada kosmologi Hindu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tatanan ruang yang ditemukan pada permukiman tradisional di Bali terutama *Bali Aga* (Bali kuno), selalu dikaitkan dengan landasan fundamental ekspresi ruang masyarakat Bali yang selalu berada dalam situasi untuk mempertahankan teritori adat serta melestarikan kelangsungan prosesi budaya didalamnya.

Untuk memperjelas bagaimana konteks aspek sosio-kultural dalam membentuk tatanan permukiman, artikel ini menggunakan Desa Adat Penglipuran sebagai studi kasus. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan

gambaran mengenai tatanan ruang permukiman yang terbentuk dari penggalian aspek sosio-kultural masyarakat tradisional pada suatu wilayah. Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu permukiman *Bali Aga* yang dicirikan oleh letak permukiman desanya yang berada di daerah pegunungan, berbentuk linear yang berfungsi sebagai ruang terbuka milik komunitas dan juga sebagai sumbu utama desa atau titik orientasi desa. Refleksi tatanan permukiman Desa Adat Penglipuran mencerminkan originalitas konsep, konservasi lingkungan yang unik serta aspek simbolik ruang yang kental (Arimbawa, 2010). Aspek simbolik ini dimanifestasikan dari konsep universal *Tri Hita Karana*. Kemudian diterjemahkan dalam pembagian teritori wilayah permukimannya menjadi tiga bagian utama yaitu teritori yang berhubungan dengan relasi vertikal dengan Sang Pencipta (*parahyangan*), teritori yang berhubungan dengan relasi sosial antar warga (*pawongan*) dan teritori yang berhubungan dengan relasi dengan lingkungan (*palemahan*). Ketiga relasi teritori ini membentuk batasan-batasan wilayah yang berkaitan dengan nilai keruangan *sacred-profane* dalam tatanan ruang permukimannya.

2. Tatanan Permukiman yang Bersosio-Kultural: Membangun Lingkungan Permukiman yang Suportif Bagi Penghuninya

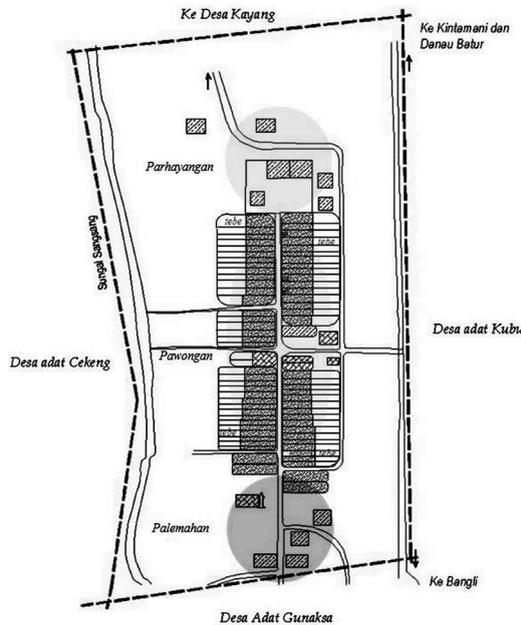
Pada masyarakat tradisional, aktivitas masyarakat selalu berkaitan dengan dua kegiatan utama yaitu yang bersifat sakral yaitu berkaitan dengan kegiatan agama, dan kegiatan yang bersifat profan yaitu berkaitan dengan kegiatan sosial masyarakat. Penempatan kegiatan tersebut diklasifikasikan berdasarkan orientasi kesakralannya yang bertujuan untuk menciptakan tatanan ruang secara harmoni baik dengan lingkungan, sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Konteks sosio-kultural dalam tatanan ruang pada entitas permukiman tradisional sebenarnya bertujuan untuk menegaskan kembali “makna ruang” yang ada. Dilakukan sebagai usaha preventif menjaga keberlanjutan tatanan permukiman sosio-religius yang ada. Namun disatu sisi, turut pula merepresentasikan pemahaman otentik mengenai kesepakatan bersama dalam memproteksi dan melanggengkan filosofi “ke-ajeg-an” tatanan desanya. Upaya merekonstruksi konsep lokal masyarakat Bali terkait dengan tatanan ruang permukiman bisa dilakukan melalui penggalian entitas budaya dalam perspektif ruang yang dipahami, disepakati dan diapresiasi sebagai kebutuhan norma dan gaya hidup masyarakat setempat. Tatanan permukiman tradisional pada Desa Adat Penglipuran merupakan akselerasi pemahaman teologis yang bersandar pada ide kosmologi ruang kultural Hindu. Sekaligus memberi batas terhadap

eksplorasi ruang permukiman yang dapat dijamah oleh tren pariwisata global sekaligus memberi limitasi bagi perkembangan mortalitas yang ada.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 116 tahun 1993, Desa Adat Penglipuran merupakan komunitas yang memang secara sengaja di konservasi sebagai unit permukiman tradisional untuk kepentingan tujuan desa wisata. Penataan ruang permukimannya tertata dalam petak-petak rumah adat Bali, lengkap dengan *angkul-angkul* (gerbang) yang khas pada masing-masing hunian sepanjang poros ruas utama desa. Semangat spritual tercermin dalam kehidupan beragama dan selalu menerapkan prinsip manajemen tradisional yang tertuang dalam *awig-awig* desa adat yaitu aturan desa adat yang dipelihara dan dipertahankan. Akibat dari pembatasan pengembangan permukiman, jumlah penduduk penyungsong desa tidak boleh lebih dari 76 KK yang disebut dengan *krama pengarep*. Apabila terdapat kelebihan anggota keluarga kecenderungan mereka akan membangun di areal *tebe* (halaman belakang). Konsep kebersamaan dalam menjaga dan mengatur tatanan permukiman tersebut dituangkan dalam awig-awig Desa Adat Penglipuran, *palet 5, paos 25, ayat 2, 1989:8* yang menyebutkan bahwa semua kepemilikan lahan mulai dari pekarangan, *tebe*, sawah, tegalan, hutan bambu dan sebagainya merupakan milik desa yang dikenal dengan istilah tanah *laba pura* sebagai aset desa yang hasilnya untuk segala keperluan pura, dan desa adat secara bersama. Peralihan fungsi dan kepemilikan tanah juga tidak diperbolehkan dalam aturan desa adat, sehingga konsistensi perubahan ekosistem lingkungan permukimannya tetap terjaga.

Dari sisi morfologi kawasan, tatanan permukiman Desa Adat Penglipuran menerapkan pola segaris atau linear. Hal ini merupakan ekspresi masyarakat lokal terhadap kuatnya konsep dualistik (*rwa bhineda*) yang mereka miliki. Konsep ruang dualistik tersebut termanifestasikan dalam bentuk tatanan ruang permukiman desa adatnya yang didasari oleh orientasi gunung/*kaja* dan laut/*kelod*. Kuatnya orientasi tersebut diterjemahkan kedalam fasilitas bersama yaitu berupa jalan yang membentang dari utara ke selatan (*kaja-kelod*) membelah permukiman menjadi dua sisi, yaitu sisi barat dan sisi timur jalan (*rurung gede*). Jalan yang lurus dari arah selatan ke utara bertujuan untuk menciptakan ruang datar pada bagian tertentu agar dapat didirikan bangunan permukiman maupun bangunan lain serta pemanfaatan ruang secara optimal akibat kondisi kontur lahan yang ada. Pada setiap jalan setelah memasuki *angkul-angkul* setiap hunian terdapat tanaman sebagai pengarah gerak/sirkulasi. Teknik *leveling* (bertingkat) pada permukiman juga selain bermakna filosofis berorientasi *sacred-profan*,

juga mempunyai fungsi taktis untuk mempertahankan kontur tanah dan keseimbangan serat tanah dalam meminimalisir potensi erosi. Selain itu, bentuk dari pola permukiman desa adatnya yang linear juga disebabkan oleh adanya batasan fisik disebelah barat Desa Adat Penglipuran berupa Sungai Sangsang yang membujur sejajar dengan desa dari utara ke selatan. Air disamping dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari juga digunakan dalam acara ritual sebagai air suci/*tirta*. Orientasi permukiman Desa Adat Penglipuran, baik untuk permukiman yang berada disisi barat ataupun disisi timur dari jalan desa mengarah ke jalan desa.



Gambar 1. Tataan Ruang Permukiman Tradisional Desa Adat Penglipuran.
Sumber: Diadaptasikan dari Arimbawa (2010)

3. Tataan Ruang Desa Adat Penglipuran sebagai Manifestasi Aspek Simbolik Ruang Masyarakat Lokal.

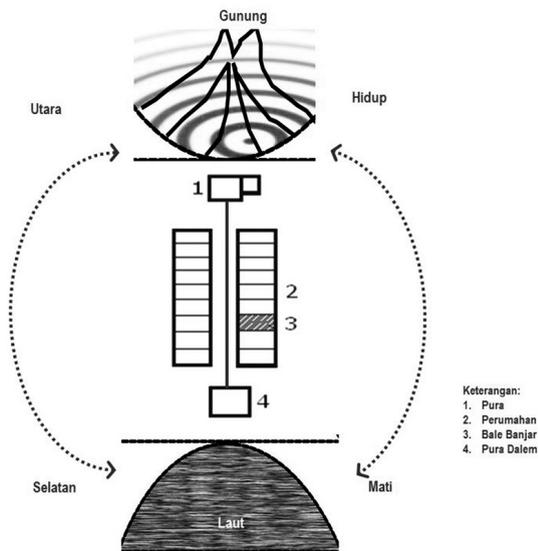
Secara konseptual, prinsip dasar *Tri Hita Karana* juga memberi kontribusi penting dalam pembagian ruang peruntukan desa menjadi tiga teritorial fungsi yaitu teritori yang berhubungan dengan fungsi spritualitas, fungsi sosial kemasyarakatan, dan fungsi pendukung. Tataan ruang permukiman Desa Adat Penglipuran difungsikan menjadi tiga zona yaitu *kaja* (utara) sebagai hulu dan

digunakan untuk perletakan aktivitas yang bersifat suci (*parahyangan*), dan *kelod* (selatan) sebagai hilir dan digunakan untuk perletakan aktivitas yang bersifat *nista/kotor (palemahan)*. Zona *madya* (tengah) difungsikan sebagai pembatas dan penghubung antara zona *kaja* (utara) dan *kelod* (selatan) dan dipergunakan sebagai lokasi perumahan dan fasilitas umum (*pawongan*). Adanya ketiga zona tersebut diatas berfungsi sebagai suatu batas terhadap nilai keruangan dimana makin keutara memiliki nilai kesakralan yang lebih tinggi atau *utama*, selanjutnya nilai keruangan *madya* dan *nista* imajiner kearah selatan desa. Penegasan prinsip *Tri Hita Karana* ini kemudian berimplikasi pada peruntukan ruang dan toleransinya terhadap nilai dan prinsip kesucian yang dikandung dalam konsep tersebut. Ketiga teritori tersebut diatas berfungsi sebagai suatu batas terhadap nilai keruangan dimana makin keutara memiliki nilai kesakralan yang lebih tinggi. Batas-batas yang dimaksud sekaligus berfungsi bagi perkembangan zona *pawongan* (permukiman) akibat penambahan penduduk dengan kecenderungan perkembangan permukiman ke arah halaman belakang (*tebe*) dari rumah induk (*karang kerti*).

Desa adat Penglipuran sendiri terbentuk dan dilandasi oleh ikatan agama Hindu yang dicerminkan dengan adanya *kahyangan tiga* yaitu *Pura Penataran* dan *Pura Puseh* di utara desa dan *Pura Dalem* di selatan. *Kahyangan tiga* pada desa umumnya berada pada tiga zona yaitu *Pura Puseh* berada di hulu desa atau *utama (parahyangan)*, *Pura Desa* berada di *madya (pawongan)* dan *Pura Dalem* berada di areal *nista (palemahan)*. Desa Adat Penglipuran tidak membagi puranya menjadi tiga seperti umumnya tapi disederhanakan menjadi dua tempat yaitu hulu dan hilir atau *utama* dan *nista* saja. Hal ini akibat kuatnya konsep lokalitas pada masyarakat Desa Adat Penglipuran, sehingga menyederhanakan *trilogi* kehidupan (lahir, hidup, dan mati) menjadi *dwilogi* yaitu hidup (termasuk lahir) dan mati saja (lihat gambar 2). Dalam aplikasinya, penyederhanaan *kahyangan tiga* yang dimaksud adalah *Pura Puseh* dan *Pura Penataran* berada di hulu desa atau utama (*Parahyangan*) dan *Pura Dalem* (satu areal dengan kuburan desa) berada di hilir/selatan desa (*Palemahan*).

Dengan demikian *parahyangan* disebelah utara Desa Adat Penglipuran ditata sebagai nilai yang suci dengan orientasi kearah gunung. *Palemahan* disebelah selatan sebagai wilayah yang nilainya kurang suci dan berorientasi ke laut. Orientasi simbolis gunung yang dimaksud adalah Gunung Batur yang terletak disebelah utara desa, yang mereka yakini memiliki kekuatan magis dan religius. Bagi komunitas Hindu-Bali, gunung merupakan tempat persemayaman para dewa. Orientasi simbolis gunung tersebut secara imajiner diterapkan dengan

memfungsikan daerah bagian utara/*kaja* adalah yang paling tinggi nilainya dan suci. Digunakan sebagai tempat suci/pura, tempat persemayaman (*stana*) Tuhan dalam manifestasinya sebagai pencipta yang disebut *Brahma* berkedudukan di Pura Penataran dan sebagai *Wisnu* berkedudukan di Pura Desa. Dengan demikian gunung/*kaja* merupakan perlambang pencipta dan pemelihara. Arah selatan (*kelod*) merupakan wilayah yang diyakini memiliki kekuatan melebur yang disebut *Siwa*, dibuatkan persemayaman (*stana*) berupa *Pura Dalem* yang terletak pada areal kuburan desa.



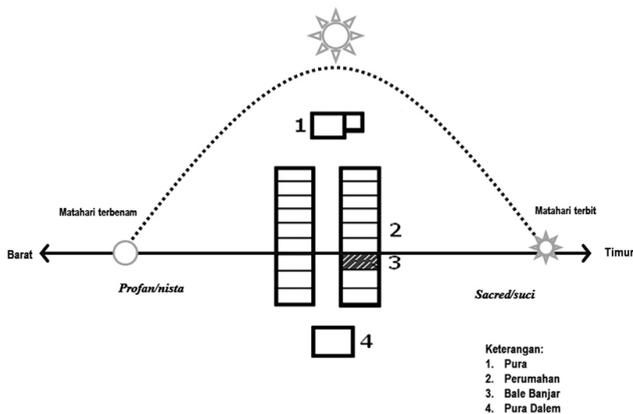
Gambar 2. Orientasi Simbolik Gunung-Laut Desa Adat Penglipuran.

Sumber : Diadaptasikan dari Arimbawa (2010)

Orientasi simbolik gunung-laut yaitu *kaja-kelod* pada tatanan makro Desa Adat Penglipuran diterjemahkan pada tatanan mikro/rumahnya menjadi orientasi simbolik matahari terbit dan terbenam yaitu *kangin-kauh* (timur-barat). Matahari terbit berorientasi kearah timur sehingga mempunyai nilai yang tinggi atau suci dan digunakan sebagai areal *parahyangan* (tempat suci keluarga). Sedangkan matahari terbenam berorientasi kearah barat yang bernilai *nista*/rendah dan digunakan sebagai areal *palemahan* (toilet dan kandang ternak). Sedangkan penghubung antara zona *utama/parahyangan* dan zona *nista/palemahan* adalah zona *pawongan* yang berada pada bagian tengah

pekarangan rumah (*natah*). Dengan demikian tata nilai ruangnya menjadi yang tertinggi (*utama*) dibagian timur, nilai ruang *madya* di bagian tengah dan nilai ruang terendah (*nista*) dibagian barat. Ketiga zona tersebut diatas berfungsi juga sebagai suatu batas terhadap nilai keruangan dimana semakin ke timur, semakin tinggi nilai kesakralan ruangnya (lihat gambar 3).

Pengulangan pola linear desa pada pola rumah tampak jelas dengan upaya membuat jalan lingkungan yang sejajar dengan jalan utama desa baik bagi rumah yang berada sebelah kiri maupun sebelah kanan jalan utama desa (*rurung gede*). Hal ini di lakukan dengan cara membuat bukaan ± 100 cm pada masing-masing pagar rumah yang di sebelah utara maupun selatan yang umumnya di sebut pelepasan atau *peletasan*, sehingga masing-masing penghuni yang akan berkunjung tidak perlu keluar ke jalan utama, kecuali hendak berkunjung ke seberang jalan utama desa (*rurung gede*). Secara imajiner seolah-olah sirkulasi antara rumah ke rumah yang berada di sisi barat atau timur *rurung gede* merupakan pengulangan dari bentuk pola linear desanya. Dengan demikian sehingga bentuk pola permukiman yang linear sebagai pola makro yang diwujudkan lagi dalam wujud mikro/*karang*.

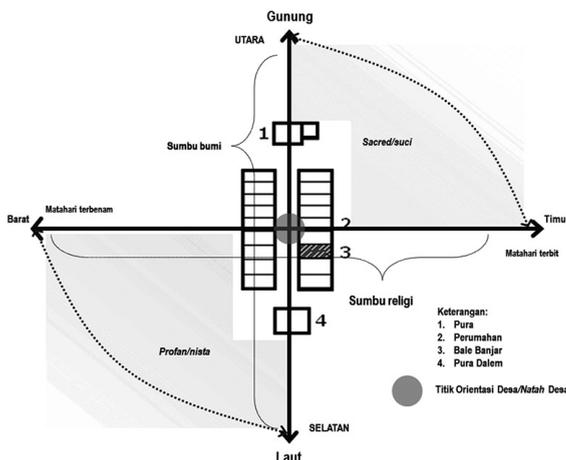


Gambar 3. Orientasi Simbolik Matahari Terbit dan Terbenam Desa Adat Penglipuran
 Sumber : Diadaptasikan dari Arimbawa (2010)

Secara imajiner hubungan pola tataan ruang desa dan pola tataan ruang rumahnya terlihat dengan penerapan konsep dualistik *kaja-kelod* (utara-selatan) dan *kangin-kauh* (timur-barat). Konsep ini disebut dengan sumbu bumi gunung-laut untuk desanya, dan disebut sumbu religi matahari terbit dan terbenam untuk pola rumahnya. Kedua konsep tersebut berada pada tataran falsafah

dualistik *rwa bhineda* yaitu dua hal yang saling berlawanan. Perpaduan dua konsep utama sumbu religi dan sumbu bumi menghasilkan konsep akhir tatahan ruang permukiman Desa Adat Penglipuran yang berorientasi pada keempat penjuru arah mata angin yang kemudian secara praktikal mengklasifikasikan ruang permukiman Desa Adat Penglipuran menjadi dua zona vital yaitu zona *parahyangan* atau kawasan suci dan zona *palemahan* atau kawasan nista yang mengelilingi pusat desa yaitu zona *pawongan* yaitu permukiman penduduk. Zona *pawongan* merupakan titik tengah (pusat aktivitas desa) yang terdiri dari permukiman lengkap dengan fasilitas-fasilitas desa adat (lihat gambar 4).

Sebagai pusat aktivitas desa, zona *pawongan* juga mempunyai turunan titik orientasi desa yang merupakan pusat kegiatan masyarakat baik untuk kegiatan yang bersifat ritual maupun bersifat sosial-budaya. Titik orientasi ini merupakan *pampatan desa* atau biasa disebut dengan *natah desa*. *Natah desa* juga memiliki makna yang serupa dengan *natah* rumah yaitu secara filosofis merupakan media perpaduan antara unsur akasa dan unsur pertiwi, dan juga sebagai tempat manusia berorientasi untuk menemukan objek yang dituju dan menjadi orientasi aksesibilitas ke permukiman penduduk dan ke fasilitas desa. *Natah desa* juga berfungsi sebagai ruang terbuka publik, ruang sosial dan jalur prosesi ritual. Sementara itu, orientasi ruang dalam *karang*/rumah juga terletak di tengah-tengah unit hunian yaitu pada zona *madya* disebut dengan *natah* yang merupakan pusat orientasi semua kegiatan dalam lingkup rumah. *Natah* berfungsi sebagai tempat untuk melakukan upacara yang berkaitan dengan penghuni rumah bersangkutan misalnya *mecaru* (penyucian pekarangan rumah), upacara *megedong-gedongan* (upacara bayi dalam kandungan) dan lain sebagainya.



Gambar 4. Perpaduan Orientasi Sumbu Bumi dan Sumbu Religi Desa Adat Penglipuran
Sumber : Diadaptasikan dari Arimbawa (2010)

Sebagai implementasi dan perpaduan orientasi sumbu bumi dan sumbu religi Desa Adat Penglipuran, maka tatanan ruang Desa Adat Penglipuran cenderung menggunakan kosmologi *panca mandala* yang merupakan penyederhaan dari konsep *sanga mandala* untuk lingkup desa. Jika dalam konsep *sanga mandala* ada sembilan zona atau nilai ruang, maka untuk Desa Adat Penglipuran disederhanakan hanya ada lima zona utama (lihat gambar 5). Tapi secara substansi nilai keruangannya sama dengan konsep *sanga mandala* pada umumnya. Segala sesuatu yang dikategorikan bersifat suci dan bernilai sakral akan menempati letak di bagian utara dan mengarah ke gunung seperti: letak pura, arah sembahyang, arah kepala saat tidur, dan sebagainya. Sebaliknya segala sesuatu yang dikategorikan tidak suci dan bernilai *profan* akan menempati letak di bagian selatan dan mengarah ke laut seperti: letak kuburan (*setra*), letak kandang, tempat pembuangan sampah/kotoran, dan sebagainya.

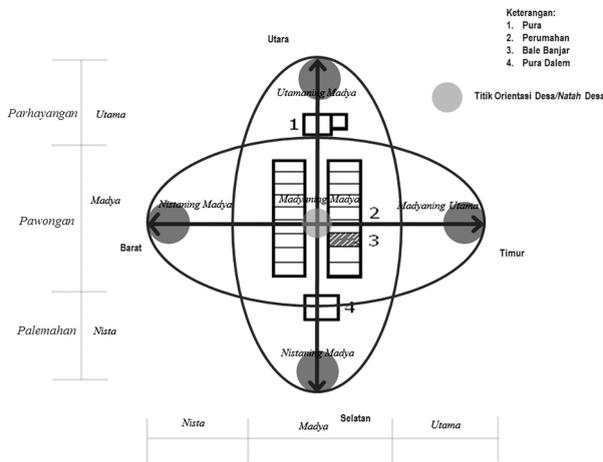
Orientasi ruang desa yang ditemukan pada komunitas Desa Adat Penglipuran tercermin pada komposisi dan formasi ruang permukiman desa yang didasarkan pada eksplorasi pragmatis dwilogi kehidupan yaitu hidu-pmati. Konsep simbolis ini berakar dari konsep *rwa bhineda* yang kemudian secara menurun diterjemahkan menjadi konsep dualistik sumbu bumi utara-selatan (*kaja-kelod*) dan sumbu religi timur-barat (*kangin-kauh*). Persilangan antara sumbu bumi dan sumbu religi secara praktikal kemudian melahirkan pembagian mintakat tata nilai keruangan lingkungan desa yang berorientasi *sacred-profane* yang disebut dengan konsep *panca mandala*. Konsep ini membagi ruang desa menjadi 5 (lima) segmen ruang berdasarkan tingkat kesucian yaitu ruang *utamaning madya* yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat sakral. Ruang tengah (*nistaning madya, madyaning madya, madyaning utama*) yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat keduniawian. Ruang *nistaning madya* yang diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat rendah atau kotor.

Berdasarkan penerapan tata nilai *panca mandala*, maka pembagian mintakat nilai keruangan pada Desa Adat Penglipuran membagi wilayahnya (*mandala*) menjadi:

1. Zona/ruang utama (*utamaning madya mandala*), adalah ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat sakral, selalu berada di tempat yang lebih tinggi dari area di sekelilingnya dan letaknya berada di arah *kaja* (utara) dan *kangin* (timur), yang berfungsi sebagai tempat pemujaan (*Parahyangan/Pura*).
2. Zona/ruang tengah (*utamaning madya, madyaning madya* dan *nistaning madya mandala*), adalah ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan yang

bersifat keduniawian (kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya), dan letaknya di tengah-tengah ke arah *kauh* (barat) dan *kelod* (selatan), yang berfungsi sebagai wadah/ tempat warga desa melakukan interaksi seperti perumahan penduduk (*griya, puri, jero, umah*), *wantilan*, pasar, lapangan, pusat pemerintahan, *pempatan agung* dan lain-lain.

3. Zona/ruang nista (*nistaning madya mandala*) adalah ruang di luar aktivitas manusia dari *madya mandala* seperti: kuburan (*setra*), persawahan, tegalan, hutan dan sebagainya yang mengandung limbah, dan letaknya di bagian *kelod kauh* (barat daya).



Gambar 5. Konsep Panca Mandala Pada Tatahan Permukiman Tradisional Desa Adat Penglipuran. Sumber : Diadaptasikan dari Arimbawa (2010)

4. Penutup

Perwujudan tatahan ruang permukiman tradisional Bali dilatar belakangi oleh alam pikiran keagamaan khususnya agama Hindu, yang bersumber pada tiga kerangka dasar yaitu *Tattwa* (Filosofis), *Tata susila* (etika), dan *upacara* (ritual). Pada tataran konsep, orientasi ruang dalam permukiman tradisional Desa Adat Penglipuran berkaitan dengan aspek tata susila (*etika*), didalamnya terdapat landasan fundamental tentang upaya untuk memisahkan ruang-ruang yang bersifat suci/sakral dengan ruang dengan fungsi kegiatan kotor/*nista*. Dalam tataran praktis, orientasi ruang permukiman tradisional Desa Adat Penglipuran dibagi menjadi dua arah orientasi yaitu sumbu bumi (*kaja-kelod/gunung-laut*) dan sumbu religi (*kangin-kauh/matahari terbit-terbenam*) yang bersumber dari

filosofi *Rwa Bhineda* (dua hal yang saling berlawanan). Nilai ruang *utama* pada sumbu bumi berada pada daerah utara yaitu gunung dan nilai ruang *nista* pada daerah selatan atau arah laut. Sementara itu, nilai ruang *utama* pada sumbu religi berada pada daerah timur yaitu arah matahari terbit dan nilai ruang *nista* berada pada daerah barat yaitu arah matahari terbenam.

Fleksibilitas tempat, ruang dan waktu dalam diktum keruangan masyarakat tradisional Bali Aga menyebabkan banyaknya adaptasi nilai-nilai keruangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perpaduan konsep sumbu bumi dan sumbu religi pada tatahan Desa Adat Penglipuran menghasilkan pembagian mintakaf nilai keruangan yang berbeda-beda antar segmen yang disebut sebagai konsep *Panca Mandala*. Konsep ini, menghasilkan lima tingkatan nilai ruang desa yaitu *utamaning madya*, *madyaning utama*, *madyaning madya*, *madyaning nista* dan *nistaning madya*. Setiap segmen ruang mempunyai fungsi dan peruntukkan yang berbeda tergantung dari tingkat kesucian fungsi atau peruntukkan yang akan diletakkan pada masing-masing segmen ruang. Oleh sebab itu, tatahan ruang permukiman tradisional pada komunitas Desa Adat Penglipuran sangat bergantung sekali pada pemahaman orientasi ruang sumbu bumi dan sumbu religi.

Selain itu, akibat dari penerapan konsep sumbu bumi dan sumbu matahari pada tatahan permukiman desa adatnya, maka morfologi Desa Adat Penglipuran berbentuk linear dengan jalan utama desa membentang dari utara ke selatan membelah permukimannya menjadi dua sisi yaitu sisi barat dan sisi timur jalan utama desa (*rurung gede*). Titik tengah desa yang disebut dengan *natah* merupakan titik nol desa, yang berfungsi vital terhadap arah kiblat sirkulasi desa, ruang publik, prosesi ritual dan jalur upacara masyarakat. Pengulangan konsep tata nilai ruang dalam skala makro desa ke mikro rumah bisa dilihat dari konsep *natah desa*/titik orientasi desa merupakan aplikasi dari konsep *natah* rumah dan jalur sirkulasi *rurung gede* (jalan utama desa) yang diterjemahkan kedalam tataran mikro/rumah dengan membuat bukaan antar rumah yang disebut dengan *peletasan*. Nampak pola jalan antar rumah seolah-olah merupakan pengulangan pola linear jalan utama (*rurung gede*).

Daftar Pustaka

Arimbawa, Wahyudi. 2010. Perpektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal: Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Penglipuran, Bangli-Bali. *Jurnal Local Wisdom*, Volume II Nomor 4, Desember 2010.

- Douglas, Porteous, J. 1977. *Environment and Behavior*. British Columbia: University of Victoria
- Rapoport, Amos. 1973. *Some Perspective on Human Use and Organization Of Space. Thirty Three Papers ini Enviromental-Behaviour Research*. New Castle: The Urban International Press.
- Samadhi, T. Nirarta. 2004. *Perilaku dan Pola Ruang*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Jurusan Teknik Planologi, ITN Malang.
- Sasongko, Ibnu. 2005. Ruang Ritual dalam Permukiman Sasak: Kasus Desa Puyung, Lombok Tengah. *Jurnal Plannit*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2005 : 89-90
- Wiradmadja, Ida Bagus. 2005. Bali Antara Tradisi dan Modernisasi. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 1 Nomor 1, Maret 2005: 17-32.

Pengembangan Permukiman Berbasis Budaya



I Gusti Putu Anindya Putra

1. Pendahuluan.

Berbicara mengenai pengembangan permukiman berbasis budaya adalah sangat luas cakupannya, namun dalam tulisan ini dibatasi terkait dengan karakteristik fisik lingkungan permukiman akibat adanya akulturasi budaya dengan lokus Kota Denpasar. Merujuk hal tersebut, tulisan ini diawali dengan pandangan masyarakat Bali terhadap ruang dan lingkungannya. Masyarakat Bali memandang ruang dan lingkungannya melalui filosofi religi yang diyakininya, yakni keselarasan atau harmoni antara manusia (*microcosmos*) dengan alam (*macrocosmos*). Filosofi ini kemudian secara konsisten dirumuskan ke dalam konsep-konsep yang menjelaskan secara terstruktur ke dalam setiap sendi kehidupannya, hubungan-hubungan dengan Tuhan, sesama makhluk hidup dan lingkungan hidupnya.

Pada perkembangannya, hubungan-hubungan tersebut dihadapkan pada bertemunya berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, sehingga terjadilah akulturasi. Proses terjadinya akulturasi ini akan memberikan warna, baik pada pola perilaku masyarakat, kelembagaan, dan fisik lingkungannya. Persoalannya adalah dalam perjalanan menuju bentuk akulturasi banyak terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan perubahan-perubahan baik cara pandang, perilaku dan berpengaruh terhadap tampilan fisik lingkungannya. Corak dan ragam yang berbeda antar lingkungan permukiman mencerminkan

hasil perubahan yang ditimbulkan dari pergesekan tadi. Dalam tulisan ini akan disampaikan filosofi masyarakat Bali, konsep ruang, kelembagaan desa adat, akulturasi dan permasalahan kekinian dengan beberapa contoh kasus yang terkait dengan pengembangan permukiman yang berbasis budaya.

2. Filosofi Ruang masyarakat Bali.

Pada dasarnya menurut masyarakat Bali, manusia dan alam dipandang sebagai sesuatu yang berbeda (*Rwa Bhineda*) namun saling mengikat dalam satu kesatuan, kondisi ini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan antara manusia (*microcosmos*) dengan alam (*macrocosmos*). Dimana ke dua kosmos tersebut diyakini terbentuk dari unsur-unsur yang sama (*Panca Mahabhuta*), sehingga dalam upaya mencapai tujuan hidupnya (*moksartam jagadhita ya ca iti dharma*) adalah dengan cara menyelaraskan diri dengan lingkungan hidupnya.

Filosofi di atas akan sangat mempengaruhi sikap hidup dan struktur kemasyarakatan, aktivitas/kegiatan, dan pengaturan lingkungan kehidupan masyarakat. Ketiga hal tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya yang digambarkan sebagai *Manik ring cecupu* (bayi dalam kandungan), dalam membentuk sikap hidup, pola kemasyarakatan, dan lingkungan kehidupannya secara terstruktur dan runtut dari skala makro sampai komponen terkecil.

Melalui pemahaman keselarasan hubungan antara *bhuana agung* dan *bhuana alit* yang masing-masing dibedakan atas dua bentuk *purusa/atma*/jiwa dan *prakerti*/raga, pendekatan tata ruang diturunkan dari filosofi di atas, yang kemudian memberikan pengertian adanya jiwa dalam penataan ruang sebagai bentuk konsepsi *Tri Hita Karana* yang terditri dari unsur-unsur jiwa, tenaga, dan fisik, serta adanya prakerti dalam penataan ruang sebagai bentuk konsepsi *Tri Angga* yang terdiri atas *utama angga*/sakral, *madya angga*/netral, dan *nista angga*/kotor. Konsepsi *Tri Hita Karana* dalam *bhuana agung*, sebagai jiwa adalah *paraatma*, tenaga adalah yang menggerakkan alam (pergerakan matahari, bulan, dan bintang), fisik adalah unsur-unsur *Panca Mahabhuta*. Sedangkan dalam *bhuana alit* jiwa adalah *atman*, tenaga adalah *prana*, dan fisik adalah *sarira*/badan. Konsepsi *Tri Angga* dalam *bhuana agung* dimana *utama angga* adalah gunung, *madya angga* adalah daratan, *nista angga* adalah laut, sedangkan dalam *bhuana alit*, *utama angga* adalah kepala, *madya angga* adalah badan, dan *nista angga* adalah kaki.

Konsep ruang yang diturunkan dari filosofi ini secara menerus sampai pada elemen terkecil pada hakekatnya merupakan penjabaran bentuk keselarasan

kosmos melalui unsur-unsur *Tri Hita Karana* (*purusa, prana, prakerti*) dan *Tri Angga* (*utama, madya, nista*). Kedudukan filosofi dan konsep ini bersifat kontekstual, dimana dalam penjabaran selanjutnya akan timbul keragaman bentuk tatanan baik tatanan lingkungan maupun tatanan sosial. Penjabaran lebih lanjut dari landasan konsepsi di atas diwujudkan dalam hubungannya dengan Lingkungan Desa, Pekarangan, dan Tata Bangunan.

Pengertian desa dalam konteks ini, mengandung adanya unsur-unsur *Tri Hita Karana* dimana *Kahyangan Tiga* sebagai *Utpati, Sima Krama/pawongan* sebagai *Sthiti*, dan *Palemahan* sebagai *Prakerti* serta unsur-unsur *Tri Angga* (*utama/sakral, madya/profan, dan nista/teben*) pada lingkungan desa. Dengan demikian desa merupakan pemenuhan konsep tata ruangnya dengan terpenuhinya (a) atribut-atribut yang terdiri dari unsur kemasyarakatan, morfologi, fungsional, dan simbolis (Parimin, 1986:204-205); (b) pemenuhan syarat-syarat adanya wilayah teritorial/*palemahan*, warga desa/*pawongan*, *Kahyangan Tiga*, pemerintahan adat dan *awig-awig*; (c) simbol-simbol (Geriya et.al, 1981:47-48).

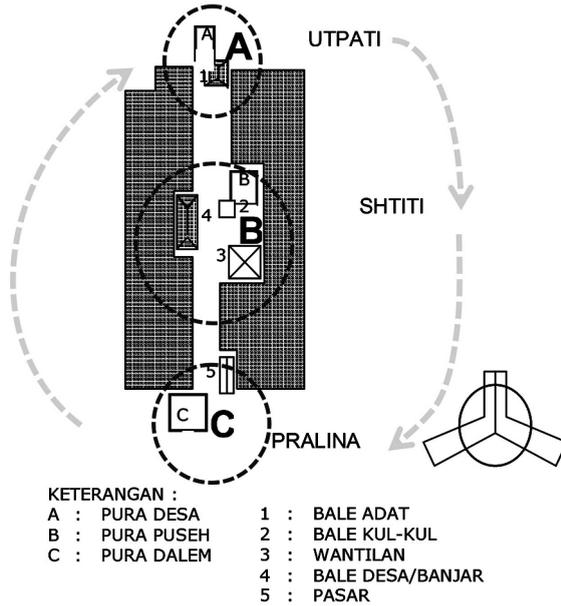
Dengan demikian secara konsepsi, desa merupakan *bhuana*/lingkungan kehidupan yang memenuhi filosofi *Tri Hita Karana* dan *Tri Angga*, dimana unsur *Kahyangan Tiga* sebagai perwujudan *utpati, sthiti, dan pralina, palemahan* desa sebagai perwujudan *bhuana agung* yang membentuk struktur dan pola ruang sesuai dengan landasan konsep *Catus Patha* dan *Sanga Mandala*, serta *pawongan* desa atau *sima krama* desa yang membentuk struktur masyarakat sehingga terbentuknya organisasi masyarakat sebagai pengelola kesatuan dan keharmonisan kehidupan serta regulasi dalam bentuk *Awig-Awig*.

Dengan demikian terlihat adanya keterpautan antara tata ruang dengan tata kehidupan masyarakatnya, keterpautan ini menjadi penting dalam usaha melakukan akulturasi konsep ruang tradisional Bali ke dalam kehidupan modern.

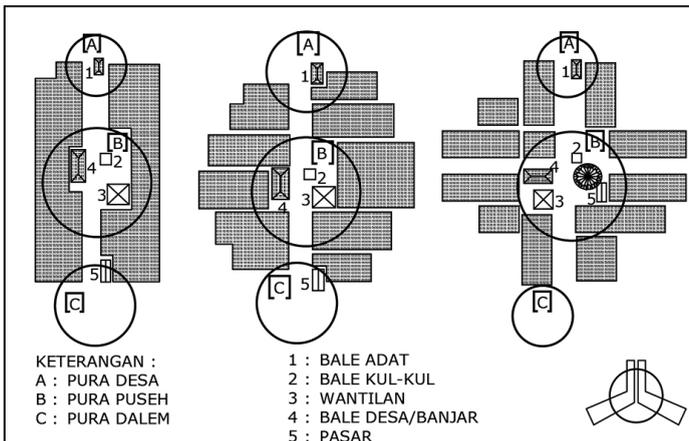
Konsepsi *Tri Pramana*, khususnya *desa-kala-patra* dan *desa-mawacara* menjelaskan adanya fleksibilitas yang tetap terarah pada substansi dasar filosofinya, dan hal ini ditunjukkan dalam keragaman pola-pola desa di Bali yang secara garis besar dapat dibedakan dalam 5 tipologi pola desa, yakni *Desa Bali Kuno*, *Desa Bali Pegunungan*, *Desa Bali Dataran*, *Desa Bali Pantai*, dan *Desa Pusat Kerajaan*.

Karakteristik lingkungan permukiman tradisional ditunjukkan dengan adanya struktur ruang berupa *pempatan agung* dan *catus patha*, serta pola ruang berupa penjabaran konsep *sanga mandala/natah* yang membentuk tata nilai zonasi, disamping juga adanya elemen pembentuk berupa *puri/jero*, alun-

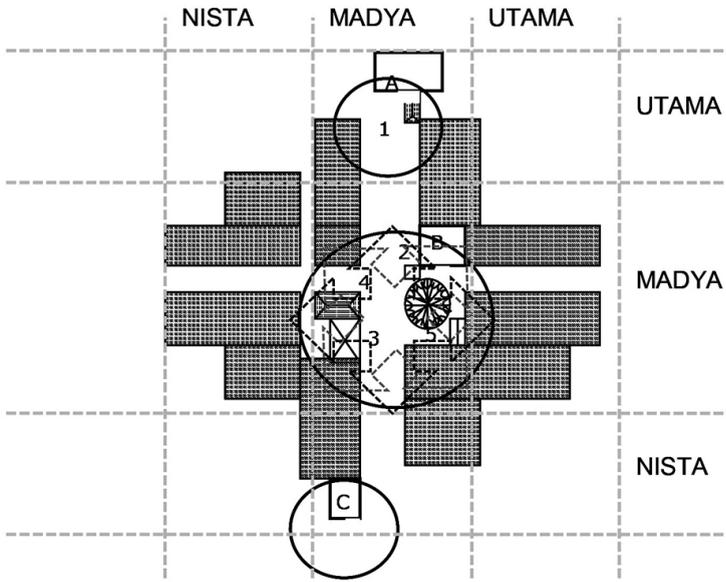
alun, pasar dan wantilan, serta *telajakan*. Ciri-ciri lainnya ditunjukkan melalui bangunan dan arsitektur, seperti adanya *cangkem kodok*, pola bangunan pura, *puri*, *jero*, dan *umah*.



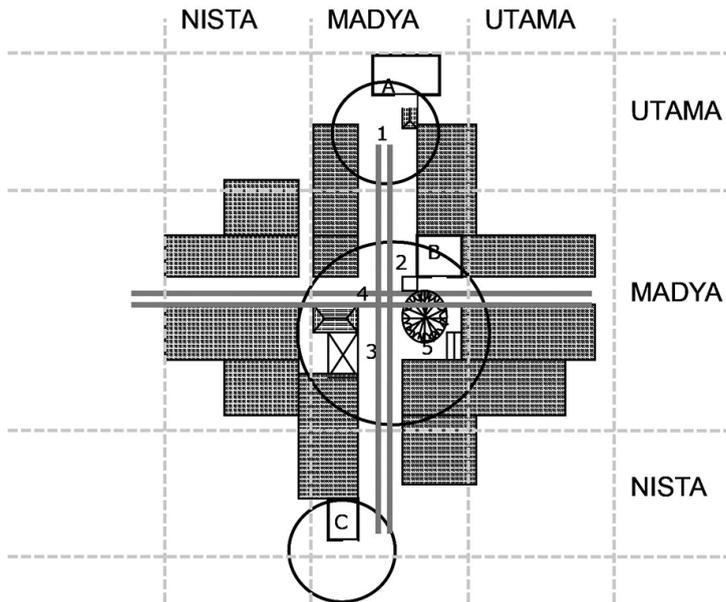
Gambar 1. Hubungan Filosofi dan Konsep Ruang Tradisional Bali.
Sumber : Anindya, 1991.



Gambar 2. Bentuk Umum Tipologi Lingkungan Tradisional Bali.
Sumber : Anindya, 1991.



Gambar 3. Penerapan Konsep dalam Fisik Lingkungan (PR).
Sumber : Anindya, 1991.



Gambar 4. Penerapan Konsep dalam Fisik Lingkungan (SR).
Sumber : Anindya, 1991.

Sistem kemasyarakatan sebagai pengelola desa melahirkan berbagai tipe organisasi yang berperan dalam kehidupan masyarakat, yakni (1) organisasi pemerintahan yang meliputi (a) pada tingkat desa, terdiri dari *bendesa/kelihan* desa, *penyarikan/sekretaris*, bendahara desa, *pemijian/penghubung*; (b) pada tingkat *banjar*, terdiri dari *kelihan banjar* dan *kesinoman* atau juru arah; (2) organisasi yang mengelolan tata air pada pertanian disebut *subak*; (3) organisasi sosial/*sekaa*, yakni organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi seperti *sekaa manyi*, kopi, *memula*, dan sebagainya; yang bergerak dibidang kemasyarakatan seperti *sekaa ngerabin*, *gong*, *barong*, dan sebagainya; yang bergerak dibidang religi seperti *sekaa pemangku*, *patus*, *dadia*, dan sebagainya; serta *sekaa* pemuda-pemudi/*sekaa teruna* dan *daha*.

Sistem organisasi ini melahirkan adanya wadah kegiatan, baik dalam bentuk bangunan maupun ruang terbuka, yang menjadi kelengkapan suatu lingkungan permukiman dan penempatannya berdasarkan hierarki fungsi dalam konsep penataan ruang, beberapa diantaranya mengelompok dan menjadi ciri sebagai pusat lingkungan. Dalam gambar diatas terlihat pengelompokkan berbagai fasilitas sosial yang menjadi bagian dari perwujudan ruang, diantaranya adalah *bale banjar*, *wantilan*, *bale kul-kul*, pasar, *puri* (apabila merupakan pusat kerajaan), pohon beringin atau *bunut* (sebagai simbol ruang terbuka), disamping fasilitas lainnya seperti *bale adat*, *pura desa*, *pura puseh*, dan *pura dalem*.

3. Akulturasi dan Karakter Fisik Lingkungan.

Istilah akulturasi berasal dari bahasa latin "*acculturare*" yang berarti "tumbuh dan berkembang bersama". Secara umum, pengertian akulturasi adalah perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Misalnya, proses percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga bisa saling memengaruhi. Sedangkan, menurut Koentjaraningrat (1997a), akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Syarat terjadinya proses akulturasi adalah adanya persenyawaan (*affinity*) yaitu penerimaan kebudayaan tanpa rasa terkejut, kemudian adanya keseragaman (*homogeneity*) seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat dan corak budayanya.

Akulturasi bisa terjadi melalui kontak budaya yang bentuknya bermacam-macam, antara lain kontak sosial pada seluruh lapisan masyarakat, sebagian masyarakat, atau bahkan antar individu dalam dua masyarakat. Kontak budaya dalam situasi bersahabat atau situasi bermusuhan. Kontak budaya antara

kelompok yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, maupun ilmu pengetahuan. Kontak budaya antara masyarakat yang jumlah warganya banyak atau sedikit. Kontak budaya baik antara sistem budaya, sistem sosial, maupun unsur budaya fisik. Hasil akulturasi budaya ditentukan oleh kekuatan dari setiap budaya. Semakin kuat suatu budaya maka akan semakin cepat penyebarannya. Adanya berbagai suku bangsa yang terdapat di Indonesia, secara alami akan terjadi pertemuan dua budaya atau lebih. Dalam proses akulturasi, semua perbedaan yang ada akan berjalan beriringan dengan semua unsur persamaan yang mereka miliki sampai pada akhirnya budaya yang memiliki pengaruh lebih kuat akan berperan besar dalam proses akulturasi.

Masyarakat Bali sebenarnya sudah mengalami akulturasi sejak masa Pemerintahan Sri Aji Jayapangus (Caka 1103/1181 M) dengan wujud akulturasi budaya uang kepeng (*pis bolong*) sebagai sarana upacara dan kesenian *Barong Landung*, masa ini disebut dengan masa Bali Mula, pada masa yang sama Mpu Kuturan memperkenalkan *Kahyangan Tiga* sebagai kelengkapan Desa Pekraman, yang menyatukan berbagai tata cara kehidupan dalam satu kesatuan, hal ini juga merupakan proses akulturasi.

Proses ini terus berlanjut dengan kedatangan bangsa asing ke Bali, menyebabkan terjadinya akulturasi pada berbagai bidang, seperti lukisan, tarian, adat istiadat, kelengkapan upacara, sampai pada bangunan. Pada bangunan munculnya *patra mesir*, *patra cina*, *patra wolanda*, pemakaian keramik cina pada bangunan dan munculnya *bale loji* menunjukkan adanya akulturasi dibidang arsitektur.

Permasalahannya adalah bahwa perkembangan sejak kedatangan Belanda menjajah Bali dan Jepang melanjutkan, sampai kemerdekaan terjadi 'kejutan' budaya yang sangat besar. Hal ini merubah pola pikir masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tatanan dan perwujudan fisik lingkungan permukimannya yang menimbulkan ketidak seimbangan antara tatanan fisik dan lingkungan sosialnya, sehingga menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan binaannya. Pada masa-masa seperti ini biasanya ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru sebagai upaya pemecahan permasalahan yang semakin kompleks.

Sebagai contoh Kota Denpasar, pada awalnya merupakan desa-desa tradisional yang menjadi ibu kota kerajaan, dan sebagian menjadi bagian dari kerajaan. Kota Denpasar terdiri dari 35 Desa Adat (tradisional), yang pada perkembangannya kemudian, secara wilayah administrasi terjadi tumpang tindih

dengan Desa dan Kelurahan, ini terlihat dengan munculnya 27 Desa (dinas) dan 16 Kelurahan di wilayah administrasi Kota Denpasar.

Ciri Desa Adat di Kota Denpasar adalah adanya *Kahyangan Tiga* (*Pura Desa, Puseh dan Dalem*), adanya perempatan utama (*pempatan agung*) dan *catus patha* (titik orientasi). Disini terjadi akulturasi tata kelola pemerintahan, antara tata pemerintahan formal (dinas) dengan tata kelola pemerintahan secara adat/tradisi. Pada tingkat Desa Adat terdapat *Bendesa Adat* yang dibantu dengan *penyarikan* (sekretaris) dan *pemijian* (penghubung), serta para *Kelihan Adat* di tingkat *banjar* yang juga dibantu oleh kesinoman (*juruh arah*). Dilain pihak Desa Dinas/Kelurahan, disamping dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah dibantu dengan sekretaris dan kepala-kepala seksi, sedangkan di tingkat lingkungan/*banjar* terdapat kepala lingkungan, dibantu sekretaris dan bendahara.

Dengan adanya rencana tata ruang wilayah (RTRW), beberapa wilayah non permukiman kemudian dikembangkan sejalan pertumbuhan kota. Dalam hal penataan wilayah baru diluar permukiman tradisional dilaksanakan melalui program konsolidasi lahan (LC), sehingga terlihat pola *grid* pada hampir seluruh kawasan kota. Sampai dengan tahun 1999, telah diselesaikan sebanyak 18 kawasan LC dengan rata-rata luas per kawasan LC berkisar antara 20 sampai 50 Ha. Kawasan-kawasan yang telah selesai ditata melalui LC dengan fungsi kawasan sebagaimana diatur oleh RTRW, baik itu kawasan perdagangan, pemerintahan, industri, dan permukiman.

Pada kenyataannya, pengembangan permukiman di Kota Denpasar terjadi dengan jalan (1) pemampatan kawasan permukiman tradisional dengan memanfaatkan lahan kosong dalam pekarangan; (2) pembangunan kawasan baru, baik kawasan yang sudah ditata melalui LC maupun kawasan yang belum ditata melalui LC. Derasnya arus urbanisasi dan semakin besarnya peluang kerja menyebabkan munculnya keanekaragaman fungsi peruntukan yang berpengaruh terhadap permukiman.

Berdasarkan data migrasi risen tahun 2000, dapat diketahui bahwa karakteristik penduduk Kota Denpasar adalah:

- 1) Penduduk tradisional yang memiliki ikatan tradisi terhadap perumahan dan permukimannya.
- 2) Penduduk pendatang (a) yang berasal dari Pulau Bali, masih memiliki ikatan dengan rumah asalnya, dan masih merasakan adanya ikatan tersebut pada tempat tinggalnya yang baru; (b) yang berasal dari luar Bali yang tidak memiliki ikatan terhadap tempat tinggalnya yang baru sebagaimana masyarakat dari Bali.

3) Penduduk ulang alik (commuter) yang masa tinggalnya di Kota Denpasar bersifat sementara dan penduduk yang bersifat tidak permanen.

Dalam lingkungan permukiman tradisional, melakukan pemampatan tempat tinggalnya, baik karena adanya penambahan akibat perkawinan, maupun dimanfaatkan untuk tempat kos dan komersial.

Pada kawasan baru :

- 1) Membangun rumah, sebagian dikontrakkan, tinggal bersama pengontrak.
- 2) Membangun rumah untuk dikontrakkan, mereka tidak tinggal bersama pengontrak.
- 3) Membangun rumah untuk dikontrakkan, salah satu keluarga tinggal bersama pengontrak.
- 4) Membangun rumah untuk ditinggali, karena dilingkungan tradisional rumahnya sudah penuh.
- 5) Mengontrak tanah, dibangun rumah kemudian dikontrakkan dan tinggal bersama pengontrak.
- 6) Mengontrak tanah, dibangun rumah kemudian dikontrakkan, namun tidak tinggal bersama pengontrak.
- 7) Mengontrak tanah, dibangun rumah kemudian dikontrakkan, salah satu keluarga tinggal bersama pengontrak.
- 8) Mengontrak tanah untuk ditinggali sendiri.
- 9) Membeli tanah, dibangun rumah kemudian dikontrakkan dan tinggal bersama pengontrak.
- 10) Membeli tanah, dibangun rumah kemudian dikontrakkan, namun tidak tinggal bersama pengontrak.
- 11) Membeli tanah, dibangun rumah kemudian dikontrakkan, salah satu keluarga tinggal bersama pengontrak.
- 12) Membeli tanah untuk ditinggali sendiri.

Bahkan fenomena yang berkembang saat ini pada kawasan permukiman adalah dengan membangun bangunan dengan bentuk (a) rumah deret, satu sampai dua kamar tidur dengan kelengkapan dapur kecil, teras, tv kbel, ac, air panas/dingin untuk disewakan harian, mingguan, bulanan dan tahunan; (b) bangunan dua lantai dengan kelengkapan seperti rumah deret; (c) bangunan menyerupai hotel dengan kelengkapan setara hotel bintang 2 untuk disewakan harian, mingguan, dan bulanan, serta tahunan.

4. Konsep Pengembangan.

Dalam pengembangan permukiman di wilayah perkotaan akan sangat berbeda

dengan di wilayah pedesaan secara struktur dan pola ruang. Di kota akan terjadi pemampatan wilayah permukiman yang sudah terbangun dan pembangunan di wilayah kosong yang sudah diarahkan, sehingga terjadi perubahan struktur dan pola ruang yang telah ada. Strategi pengembangan perumahan dan permukiman akan terkait erat dengan makna rumah bagi masyarakat dan dengan strategi pengelolaan lahan perkotaan.

Secara tradisional, sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya masyarakat Bali memiliki pemahaman terhadap rumah/perumahan yang berbeda dengan pemahaman secara nasional. Hal ini tidak terlepas dari adat istiadat, budaya, tradisi dan kepercayaan yang dianutnya. Masyarakat Bali percaya bahwa rumah memiliki nilai ikatan kehidupan yang harmoni baik terhadap alam lingkungan, sesama manusia, dan Tuhan-nya. Pandangan ini akan mempengaruhi bagaimana masyarakat Bali memperlakukan rumah/perumahan. Ikatan-ikatan tersebut juga akan berlanjut terhadap lingkungan permukiman dan tata cara bermasyarakat. Secara tradisi, seseorang memiliki ikatan terhadap rumahnya dan lingkungan permukimannya, baik secara sosial, fisik, maupun kepercayaan yang kemudian membentuk tatanan yang mempengaruhi perilaku.

Berdasarkan karakteristik lingkungan permukiman, isu-isu yang berkembang, kondisi sosial masyarakat, serta fungsi dan peran kota Denpasar, maka strategi pengembangan daya dukung yang ada dikelompokkan dalam:

- 1) Pengembangan perumahan dan permukiman yang berada dan berawal dari lingkungan tradisional (desa adat). Pengembangannya diarahkan untuk menunjang penegasan kembali pola-pola lingkungan tradisional melalui arahan terhadap renovasi bangunan ataupun rencana pengalihan fungsi dan penambahan bangunan dalam satu pekarangan.
- 2) Pengembangan perumahan dan permukiman pada lahan-lahan kosong diarahkan guna optimasi dan efektivitas guna lahan yang menunjang penegasan pola lingkungan melalui arahan penggunaannya maupun persyaratan teknis bangunan.
- 3) Pengembangan perumahan dan permukiman dengan jalan mengefektifkan lahan-lahan non produktif atau yang nilai ekonominya rendah melalui arahan penggunaannya untuk menunjang kejelasan struktur tata lingkungan permukiman.

Oleh karena itu pengembangan perumahan dan permukiman diarahkan pada (a) Peremajaan/revitalisasi; (b) Pengadaan/pembangunan baru dengan mengacu pada konsep-konsep ruang (budaya) setempat; (c) Penyediaan lahan matang/siap bangun yang ditata berdasarkan konsep-konsep ruang (budaya) setempat.

Pelaksanaan penyediaan perumahan dan permukiman dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga adat, serta swasta dengan langkah-langkah :

- 1) Pemerintah bersama-sama masyarakat dan lembaga adat, serta swasta membangun perumahan baru, memperbaiki atau memugar rumah secara bertahap dan terarah dengan subsidi antar kelompok masyarakat maupun lembaga adat.
- 2) Pembangunan perumahan baru diarahkan pada lokasi-lokasi yang sudah disiapkan melalui LC, dan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau melalui subsidi dan pinjaman lunak.
- 3) Penyiapan lahan matang/siap bangun pada lahan-lahan non produktif melalui program Konsolidasi Lahan (LC/KLP) yang bersifat partisipatory.
- 4) Lingkungan padat/kumuh perlu ditempuh dengan program peremajaan/revitalisasi, serta program Intensifikasi Penyuluhan Perumahan (IPP) atau sejenisnya.
- 5) Disusun peraturan dan perencanaan, perijinan, perpajakan dan retribusi, bimbingan pelaksanaan yang lebih mampu mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih tertib, nyaman, aman, dan sehat sesuai dengan budaya lokal, contoh PNPM Pusaka.
- 6) Pembangunan permukiman diarahkan untuk tetap mencerminkan/bercirikan konsep ruang masyarakat Bali dan melestarikan pola-pola rumah dan lingkungan khas Bali.

Sampai saat ini kebijakan pengembangan permukiman diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat, pembangunan rumahnya sendiri dibuat secara normatif berdasarkan standard barat. Belum terlihat adanya peraturan yang mengarahkan untuk membangun rumah, perumahan ataupun permukiman baru yang dilandasi oleh budaya masyarakat setempat.

Untuk seluruh wilayah Bali, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam RTRW masing-masing telah dilengkapi dengan landasan filosofi ruang tradisional Bali, namun hal tersebut belumlah cukup walaupun telah terbit peraturan daerah yang memberikan arahan normatif tentang arsitektur tradisional Bali. Mengedepankan aspek budaya lokal sebagai landasan pengembangan permukiman menjadi sangat penting, karena akan memberikan *multiplier effect* yang sangat luas. Disamping akan memberikan ciri/karakter yang khas dimana pengembangan dilakukan, juga akan memberikan dampak ekonomi dan sosial (hubungan) kemasyarakatan yang memang akan beragam secara harmonis.

5. Model Kelembagaan.

Apabila kita memakai Bali sebagai model, maka mengefektifkan sinergi lembaga-lembaga adat dengan lembaga-lembaga formal menjadi sangat penting. Oleh karena itu penguatan lembaga adat sebagai partner lembaga formal didorong untuk diberikan peran lebih besar. Sebagai contoh, didalam lembaga adat, baik ditingkat desa maupun *banjar*, terdapat 3 kelompok urusan yakni terkait dengan ritual, sosial kemasyarakatan (kerukunan, ketaatan, dan pembagian tugas), dan usaha milik adat, kesemuanya diatur dalam peraturan adat yang disebut *awig-awig*.

Awig-awig sendiri mengatur tentang tata *parahyangan* (terkait dengan ritual Agama), tata *pawongan* (terkait dengan sosial, budaya, usaha), tata *palemahan* (terkait dengan wilayah/lahan) secara baku, sedangkan tata laksana diatur berdasarkan rapat (pesamuan) warga *banjar adat* yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Struktur awig-awig di semua desa adat sama, namun isi/materi berbeda satu sama lainnya, disesuaikan dengan waktu-tempat dan keadaan.

Persoalannya adalah bahwa yang harus patuh dengan *awig-awig* adalah warga yang sah sebagai warga adat, sedangkan para pendatang tidak termasuk didalamnya. Hal ini terkait dengan 3 urusan tadi, karena akan menyangkut hak dan kewajiban warga adat terhadap kekayaan adat, yang mengikat setiap warga secara sama, misalnya hak untuk dikuburkan di setra, hak untuk memanfaatkan balai desa/*banjar*, dan sebagainya. Demikian juga dengan kewajiban yang sama untuk setiap warga adat, misalnya kewajiban menjaga adat istiadat/tradisi, kewajiban untuk membantu yang lagi kesusahan, kewajiban untuk '*ngayah*' (bekerja untuk kepentingan adat), membayar iuran (*patus*), dan sebagainya. Sebenarnya untuk 2 urusan diatas masih dapat dikembangkan untuk warga pendatang, baik yang menetap maupun yang singgah.

Tata *pawongan*, yang mengatur masalah warga selain yang terkait dengan ritual, juga dapat ditambahkan untuk mengatur warga pendatang, hal ini terkait dengan menjaga kerukunan warga baik sesama warga pendatang, juga antara warga pendatang dengan warga adat, misalnya wajib lapor, tidak hanya kepada kepala desa/lurah tetapi juga kepada bendesa, kewajiban menjaga kerukunan, kebersihan, keamanan, iuran, dan sebagainya. Haknya adalah mendapatkan pelayanan dan perlindungan. Tata *palemahan*, yang mengatur masalah wilayah dan lahan, dapat ditambahkan apabila terjadi jual beli, sewa, kontrak, pembangunan, dan perijinan dalam bentuk arahan untuk menyesuaikan dengan konsep lingkungan permukiman yang sudah ada, disamping terhadap RTRW.

Sebagai catatan, bahwa di hampir seluruh desa adat di Bali, dalam urusan tata *pawongan* memiliki badan usaha milik desa adat (Bumda), salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang asetnya sudah menyamai perbankan. Di Denpasar, untuk pengembangan permukiman dan perumahan sudah melibatkan desa adat, terutama *banjar adat*, terutama saat proses perijinan diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi dari adat. Didalam menetapkan warga miskin, bedah rumah, PNPM, perbaikan lingkungan permukiman, SANIMAS, revitalisasi kawasan, dan sebagainya diawali dengan rapat (*sangkep*) di tingkat *banjar* (adat) dan desa (adat) bersama dengan banjar dan desa dinas/kelurahan. Pemerintah Kota Denpasar melalui *sekehe teruna* (ST) di tingkat *banjar adat* mendorong kreativitas generasi muda melalui program kreativitas baik dibidang seni budaya dan ekonomi, serta program *young enterpreunership* membangun wirausahawan muda yang kreatif.

6. Penutup

Pada akhirnya sejalan dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana batas wilayah menjadi tidak lagi berpengaruh, maka mengedepankan budaya lokal untuk menjadikan ciri suatu peradaban menjadi sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sebuah formula yang dapat mengakomodasi potensi unggulan budaya lokal ini menjadi sebuah landasan pembangunan permukiman.

Kita semua tahu bahwa fisik lingkungan akan mencerminkan perilaku masyarakat didalamnya, keindahan, kebersihan, kerapian dan kenyamanan suatu lingkungan permukiman menunjukkan bahwa warganya bahagia, begitu pula sebaliknya akan menunjukkan warganya sengsara. Sebuah harapan, bahwa tulisan ini dapat menjadi bahan diskusi dan debat dari para pakar untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan semua.

Daftar Pustaka

- Anindya Putra, I Gusti Putu. 1991. Kajian ke Arah Pendekatan Konsep Ruang Tradisional Bali dalam Penataan Ruang Kota dan Penelusuran Syarat-syarat Ruang dari Masyarakat sebagai Landasan Perwujudan Ruang Kota Berwawasan Identitas (Studi Kasus Kota Gianyar). (Tesis). Fakultas Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bandung.
- Geriya, I Wayan dkk. 2010a. *Kebudayaan Unggul, Inventori Unsur Unggulan sebagai Basis Kota Denpasar Kreatif*. Denpasar: Bappeda Kota Denpasar.
- _____. 2010b. *Pusaka Budaya, Representasi Ragam Pusaka dan Tantangan*

- Konservasi di Kota Denpasar, Bali*. Denpasar: Bappeda Kota Denpasar.
- Haryadi dan Setiawan, B. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku: Teori Metodologi dan Aplikasi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud RI.
- Koentjaraningrat. 1997a. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- _____. 1997b. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lucas, D.,P. Mc. Donald, E. Young, and C. Young., 1990. *Pengantar Kependudukan*, (terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rapoport, Amos. 1977. *Human Aspect of Urban Form: Towards Man-Environment Approach to Urban Form and Design*. Oxford: Pergamon Press.
- Triguna, Ida Bagus Gde Yudha, editor. 2008. *Kebudayaan dan Modal Budaya Bali dalam Teropong Lokal, Nasional, Global (Memori Purnabhakti untuk Antropolog dan Budayawan I Wayan Geriya)*. Denpasar: Widya Dharma.
- *) Tulisan ini merupakan Isu Strategis Triwulan-1 Tahun 2015 dari Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar yang disampaikan kepada Walikota Denpasar sebagai masukan.

Ekspresi Keruangan Budaya Lokal: Tinjauan Diakronik Spasial Permukiman Desa Adat Kesiman, Denpasar - Bali



I Komang Gede Santhyasa

Perencanaan ruang bermukim pada lingkungan masyarakat 'tradisional' lebih didasarkan pada sistem pengetahuan lokal tentang perencanaan yang terdiri atas sistem nilai dan konsep lokal, serta kepercayaan dan pengetahuan budaya setempat. Banyak sistem pengetahuan lokal tentang perencanaan tata ruang yang memiliki peranan dalam usaha menjaga kontinuitas dimensi kultural yang seringkali diabaikan oleh perencanaan.

1. Pendahuluan

Salah satu bagian penting dalam pengkajian ruang adalah terkait dengan tatanan ruang yang menggambarkan juga tatanan kehidupan masyarakat. Tatanan ruang tersebut akan terorganisasi dalam pola tertentu yang dapat dimaknai sesuai dengan budaya masing-masing. Untuk itulah, maka organisasi ruang juga menggambarkan atau melambangkan pengertian untuk dapat 'dibaca' dalam pengertian tertentu sebagai struktur ruang (Sasongko, 2003).

Pemahaman dalam penciptaan tempat hidup manusia beserta atribut yang menyertainya adalah suatu kebutuhan manusia. Jika tempat hidup manusia atau tempat bermukim manusia merupakan wadah untuk secara konkrit mengekspresikan eksistensi dirinya (Norberg-Schulz, 1971), maka perencanaan

ruang adalah sebagai usaha untuk secara lebih akurat mengakomodasi norma dan nilai-nilai kosmologis dalam pembentukan identitas ruang bermukim, yang dalam hal ini sebagai ruang masyarakat tradisional (Santhyasa, 2007; Santhyasa, 2017).

Pada saat ini, penetapan unit perencanaan yang berlaku dalam sistem perencanaan kota di Indonesia dilaksanakan melalui pendekatan wilayah administratif. Seperti misalnya, wilayah kelurahan, wilayah kecamatan, dan kota termasuk juga penetapan dilakukan berdasarkan pendekatan wilayah fungsional perkotaan, seperti kawasan pusat kota, kawasan industri, kawasan bersejarah, dan lain sebagainya. Walaupun secara hukum, mengakui masyarakat hukum *adat* sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan ruang perkotaan, unit spasio-kultural yang secara tradisional ada di Indonesia. Seperti misalnya, *desa adat*, *gampong*, *nagari*, dan lain sebagainya tidak pernah dimanfaatkan ataupun dipikirkan untuk digunakan sebagai suatu unit perancangan (Samadhi, 2003).

Rapoport (1969), menunjukkan bahwa budaya akan selalu berubah, sehingga makna bangunan maupun permukiman juga dapat berubah. Hanya saja perubahan tersebut tidaklah selalu terjadi secara serentak pada seluruh elemen ataupun tatanannya, akan tetapi selalu dijumpai adanya unsur yang berubah dan yang tetap (*constancy and change*). Dalam konteks ini, apabila budaya atau pandangan hidup berubah, maka berbagai aspek terkait dengannya menjadi berubah atau tidak berarti. Walaupun demikian masih akan dijumpai berbagai elemen yang tetap dipertahankan, hanya secara umum kecenderungannya untuk berubah lebih kuat dari upaya mempertahankannya.

Dengan demikian, permukiman Desa Adat Kesiman sebagai studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi perkembangan pola spasialnya ditinjau dari perspektif diakronik spasial. Tulisan ini memberikan gambaran secara ringkas bahwa perkembangan pola spasial ini ditujukan untuk lebih memahami landasan yang dijadikan dasar dalam usaha-usaha penciptaan ekspresi keruangan budaya lokal dan dijadikan referensi dalam perencanaan ruang pada lingkungan masyarakat 'tradisional' yang dibangkitkan oleh konteks budayanya.

2. Perubahan Lingkungan Binaan sebagai Manifestasi Nilai Sosial-Budaya

Pada dasarnya perubahan yang dilakukan manusia bertujuan untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dan memuaskan. Bentuk perubahan kebudayaan dapat bermacam-macam antara lain: perubahan yang berlangsung lambat dan ada pula yang cepat, perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak

direncanakan, perubahan yang pengaruhnya besar dan yang pengaruhnya kecil. Perubahan budaya pada umumnya tidak dirasakan oleh masyarakat yang menerima perubahan tetapi hal ini dapat diamati oleh orang luar.

Perubahan dan pembaharuan kebudayaan dibenarkan dan dimungkinkan karena pada hakikatnya kebudayaan tidak diciptakan hanya sekali dan langsung selesai, tetapi diciptakan terus-menerus. Perubahan kebudayaan ada yang terjadi pada wujud fisik, sistem sosial serta ada pula pada wujud sistem idenya. Sejalan dengan perkembangan waktu, fungsi bangunan dan lingkungan permukiman, telah mengalami perubahan secara fisik dan non fisik, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perubahan kegiatan ekonomi, perubahan sistem politik, sosial dan budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap bentukan spasial lingkungan permukiman (Erwin, 1999).

Lebih lanjut menurut Hatmoko (1994), bahwa kebudayaan pada dasarnya memiliki sifat sebagai sesuatu yang berubah, karena kebudayaan memiliki aspek tradisi, yaitu sesuatu yang diwariskan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan tidaklah bersifat statis dan mandek begitu saja, namun dalam menjaga tradisi diperlukan juga untuk melihat relevansinya untuk masa kini dan masa yang akan datang bagi upaya pelestarian.

Lingkungan binaan sebagai hasil wujud fisik kebudayaan merupakan hasil dari kompleks gagasan yang merupakan satu kesatuan sistem budaya yang tercermin pada kompleks aktivitas yang berpola dalam suatu keseluruhan sistem sosial masyarakat, yang sering disebut sebagai 'kebudayaan fisik'. Menurut Koentjaraningrat (1987), ada tiga wujud kebudayaan, yakni *cultural system* (berupa sistem nilai, norma-norma dan perangkat aturan), *social system* (wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas), *physical system* (wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia).

Ketiga wujud kebudayaan tersebut merupakan satu kesatuan sistem, yang akan selalu mencari keseimbangan apabila salah satu sub-sistemnya mengalami perubahan dengan perubahan pada sub-sistem lainnya. Dengan demikian, lingkungan permukiman sebagai lingkungan binaan manusia, proses dan komponen penyusunannya tidak dapat terlepas dari masalah kondisi sosial budaya masyarakatnya.

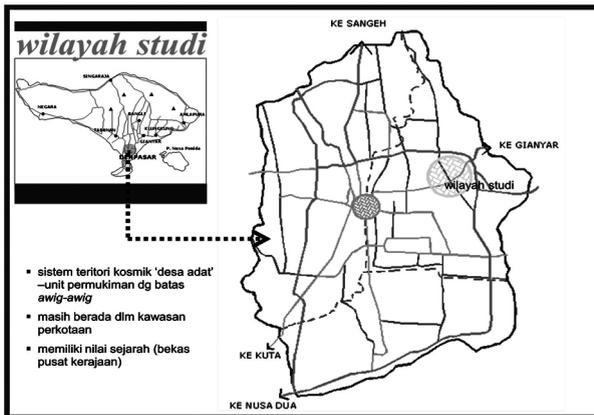
Terbentuknya lingkungan hunian dimungkinkan karena adanya proses pembentukan hunian sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia, serta adanya pengaruh *setting* (rona lingkungan), baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (sosial-budaya), yang secara langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewardahannya (Santhyasa, 2017). Rona lingkungan akan

saling berpengaruh dengan bentukan fisik lingkungan binaan. Rona lingkungan terbentuk oleh kondisi lokasi, kelompok masyarakat dengan sosial-budayanya (Rapoport, 1983).

Sebagai suatu proses, perubahan lingkungan binaan tentunya berjalan secara komprehensif dari berbagai aspek kehidupan sosial-budaya masyarakat. Rapoport (1969), membedakan faktor-faktor pembentuk lingkungan (hunian) ke dalam dua golongan, faktor primer (*social-culture factors*) dan faktor sekunder (*modifying factors*). Lingkungan (hunian) merupakan refleksi dari kekuatan-kekuatan sosial budaya seperti kepercayaan, hubungan kekeluargaan, organisasi sosial, serta interaksi sosial antar individu.

3. Pendekatan Diakronik Spasial

Pendekatan yang digunakan dalam kasus ini bersifat eksploratif dengan paradigma fenomenologis dengan menggunakan metode analisis secara logika induktif, yaitu dilakukan pengamatan langsung untuk melihat fenomena yang ada di lapangan dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan konteks kasus. Fokus kasus ini diarahkan pada ruang dan aktivitas pada unit permukiman tradisional Desa Adat Kesiman. Unit kasus diambil dari ruang makro yang berupa ruang *desa adat* dengan memiliki karakteristik keruangan, seperti *Puri*¹, *Kahyangan Desa*², keruangan *pampatan agung*³, dan ruang-ruang publik *desa adat* lainnya.



Gambar 1. Orientasi Wilayah Studi; Desa Adat Kesiman, Kota Denpasar-Bali
 Sumber: Diadaptasikan dari Santhyasa (2007)

1 *Puri* adalah istilah istana untuk kerajaan di Bali pada masa lalu.

2 *Kahyangan Desa* merupakan area tempat suci dalam teritori desa adat yang terdiri dari *Pura Puseh*, *Pura Desa*, dan *Pura Dalem*.

3 *Pampatan agung* itu sendiri adalah pusat simbolik dari suatu unit teritorial kosmik, dimana segenap kekuatan dari empat penjurur arah angin, dunia atas dan bawah bertemu dengan dunia manusia.

Secara diakronik (Suprijanto, 1999), analisis ini melihat keterkaitan perkembangan fisik spasial dengan aktivitas-aktivitas yang ada dalam ruang-ruang makro sebagai wadah dari aktivitas-aktivitasnya. Berdasarkan parameter-parameter analisis diakronik, maka dalam kasus ini dikelompokkan menjadi tiga periode sebagai tonggak penting dalam sejarah perkembangan pola spasial dan sangat mempengaruhi perubahan tatanan spasial di Desa Adat Kesiman, yaitu sebagai berikut:

- 1) Periode 1, jaman Puri Kedaton (abad ke-17);
- 2) Periode 2, jaman Puri Gede Kesiman (abad ke-18); dan
- 3) Periode 3, sejak kolonialisme sampai sekarang (abad ke-20an)



Foto 1. Elemen-elemen ruang di Desa Adat Kesiman
Sumber: Diadaptasikan dari Santhyasa (2007)

4. Diakronik Spasial Permukiman Desa Adat Kesiman

Wilayah Desa Adat Kesiman meliputi tiga desa dinas, yaitu Kelurahan Kesiman, Desa Kesiman Petilan, dan Desa Kesiman Kertalangu. Struktur *desa adat* ini, terdiri dari tiga komponen dasar seperti *desa adat* lainnya, yaitu *parahyangan* (tempat suci Hindu-Bali, seperti: *Pura Puseh/Desa*, *Pura Dalem*, dan pura-pura lainnya), *pawongan* (warga desa adat), dan *palemahan* (wilayah teritorial desa adat). Menurut sejarahnya, Desa Adat Kesiman telah ada sejak jaman Bali Kuna ketika Dinasti Warmadewa berkuasa di Bali. Desa ini kemudian jatuh ke tangan

kekuasaan Majapahit (ketika Gajah Mada menaklukkan Sri Asta Asura Ratna Bumi Banten), dan berkembang sampai era kemerdekaan dan pembangunan sekarang.

4.1 Diakronik Spasial Jaman Puri Kedaton (abad ke-17)

Pada periode ini dapat dikategorikan dalam periode awal perkembangan spasial Desa Adat Kesiman. Pada jaman ini, kompleks *Puri Kedaton* menjadi titik pusat lingkungan permukiman. Pusat ini ditandai dengan adanya *pampatan agung* atau persimpangan jalan (*catus patha*) sebagai simbol kultural secara spasial. *Puri Kedaton* terletak disudut barat laut *pampatan agung* berdekatan dengan *Pura Petilan* (pura yang dibangun oleh keluarga *Puri Kedaton* sebagai cikal bakal Desa Adat Kesiman saat ini).

Secara tatanan spasial juga terlihat jelas, bahwa pola ruang *desa adat* yang berorientasi pada konsep *sanga mandala* mulai diterapkan dengan dibangunnya *kahyangan desa* (*Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem*) sebagai penanda batas teritorial wilayah *desa adat*. *Pura Desa* dan *Pura Puseh* yang berada di ujung utara desa (*utama*) sedangkan *Pura Dalem* dan *setra* di ujung selatan desa (*nista*) dan permukiman berada di tengah-tengah desa dengan *puri* sebagai pusat lingkungan permukiman *desa adat*.

Secara diakronik, perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini (jaman *Puri Kedaton*) lebih didominasi pada pembangunan banyaknya pura-pura dari berbagai *soroh* di sekitar kompleks *Puri Kedaton* yang berorientasi pada aktivitas ritual-ritual keagamaan.

4.2 Diakronik Spasial Jaman Puri Gede Kesiman (abad ke-18)

Pada periode ini, *puri* dibangun kembali sebagai istana kerajaan masa *Puri Gede Kesiman* yang letaknya di sebelah barat *Puri Kedaton*. Walaupun demikian, tatanan spasial yang telah terbangun pada masa *Puri Kedaton* tidak mengalami perubahan, seperti letak pura-pura *kahyangan desa* masih berada pada lokasi semula. Namun, *Puri Kedaton* yang dulunya oleh masyarakat dijadikan pusat orientasi lingkungan permukiman, pada periode ini berpindah orientasi sebagai pusat lingkungan permukiman adalah *Puri Gede Kesiman*.

Keruangan *pampatan agung* yang terbentuk pada periode ini dapat dikatakan pola spasial yang ideal karena di empat kuadran *pampatan agung* dibangun fungsi-fungsi dan bentuk ruang yang sesuai dengan tata ruang tradisional Bali. Hal ini dapat dibuktikan dengan *puri* terletak di sebelah timur laut *pampatan agung*, pasar di sebelah tenggara *pampatan agung*, ruang terbuka

berada di sebelah barat daya *pampatan agung*, dan *wantilan* berada di sebelah barat laut *pampatan agung*.

Secara diakronik, perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini (jaman *Puri Gede Kesiman*), didominasi pada pengkonsentrasian fungsi spasial yang bersifat publik (kegiatan agama, sosial, ekonomi, dan politik) di pusat wilayah kerajaan.

4.3 Diakronik Spasial Sejak Kolonialisme sampai Sekarang (abad ke-20an)

Pada periode ini, pola spasial *kahyangan desa* dan spasial *pampatan agung* tidak mengalami perubahan. Perkembangan diakronik yang terjadi pada periode sejak kolonialisme sampai sekarang adalah disekitar spasial *pampatan agung* terjadi perubahan pemanfaatan ruang dari elemen-elemen seperti pasar, *wantilan*, dan ruang terbuka menjadi pemanfaatan ruang lebih bernuansa modern kecuali elemen *puri* masih tetap bertahan, sedangkan pasar sekarang terletak di sebelah utara *pampatan agung*, tepatnya di ujung utara koridor Jalan Surabi. Walaupun demikian, secara fisik spasial *puri* tidak lagi dominan dalam pengembangan pusat lingkungan permukiman *desa adat*.

Secara diakronik, perkembangan fisik spasial *desa adat* pada periode ini lebih menegaskan bahwa kawasan bekas pusat kerajaan berubah menjadi kawasan bisnis (perdagangan) dan perkantoran dengan dibuktikan sampai saat ini di sekitar spasial *pampatan agung* adanya kantor-kantor pemerintahan seperti kantor camat, kantor lurah dan berbagai fasilitas-fasilitas bisnis yang berada di sepanjang Jalan W.R. Supratman. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan wajah visual *desa adat* dari lanskap tradisional yang alami menjadi artifisial atau lebih moderen (Gambar 2).

Tabel 1. Matrik Diakronik Spasial Desa Adat Kesiman

No	Elemen fisik	Masa/periode		
		Jaman Puri Kedaton	Jaman Puri Gede Kesiman	Jaman kolonialisme-kini
1.	Pampatan Agung	Puri	Puri	Puri
		Pura Petilan	Pasar	Hotel dan toko
			Ruang terbuka	Kantor kelurahan
			Wantilan	Kantor camat
2.	Kahyangan Desa	Pura Desa	Pura Desa	Pura Desa
		Pura Puseh	Pura Puseh	Pura Puseh
		Pura Dalem	Pura Dalem	Pura Dalem

3.	Permukiman	Pura-Pura Warga	Pura-Pura Warga	Pura Petilan dan Pura-Pura Warga Bale Banjar Pasar Yadnya Pertokoan Kuburan
----	------------	--------------------	-----------------	--

Sumber: Diadaptasikan dari Santhyasa (2007)

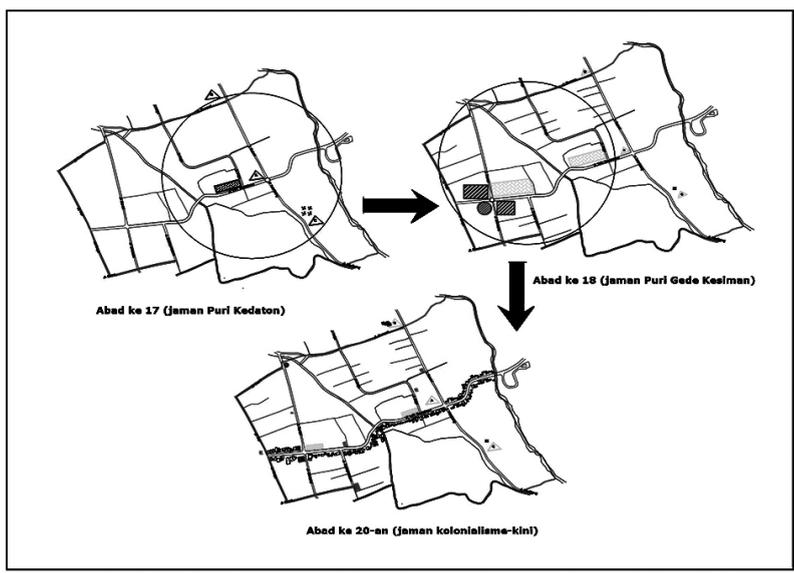
Tabel 2. Tema-tema yang Terdapat Dalam Topik Diakronik Spasial Desa Adat Kesiman

Periode	Unit Informasi	Tema-tema
Puri Kedaton	<p>a) Pada jaman ini, kompleks Puri Kedaton menjadi titik/pusat lingkungan permukiman.</p> <p>b) Pusat ini ditandai dengan adanya pampatan agung/persimpangan jalan (catus patha) sebagai simbol kultural secara spasial.</p> <p>c) Pola ruang desa adat yang berorientasi pada konsep sanga mandala mulai diterapkan dengan dibangunnya kahyangan desa.</p> <p>d) Perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini lebih didominasi pada pembangunan banyaknya pura-pura dari berbagai kasta/soroh di sekitar kompleks Puri Kedaton.</p>	<p>1) Pusat orientasi lingkungan tergantung pada kekuasaan.</p> <p>2) Simbol ruang kultural yang kuat.</p> <p>3) Orientasi aktivitas religi yang sangat kuat.</p> <p>4) Pola spasial yang ideal (teratur).</p>
Puri Gede Kesiman	<p>a) Puri Kedaton yang dulunya oleh masyarakat dijadikan pusat orientasi lingkungan permukiman, pada periode ini berpindah orientasi sebagai pusat lingkungan permukiman adalah Puri Gede Kesiman.</p> <p>b) Keruangan pampatan agung yang terbentuk pada periode ini dapat dikatakan pola spasial yang ideal karena di empat kuadran pampatan agung dibangun fungsi-fungsi dan bentuk ruang yang sesuai dengan tata ruang tradisional Bali.</p>	<p>5) Munculnya ruang-ruang publik.</p> <p>6) Perubahan pola spasial.</p> <p>7) Perubahan visual.</p>

Puri Gede Kesiman	c) Perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini, didominasi pada pengkonsentrasian fungsi spasial yang bersifat publik
-------------------	---

Sejak kolonialisme - sekarang	a) Secara fisik spasial puri tidak lagi dominan dalam pengembangan pusat lingkungan permukiman desa adat. b) Perkembangan fisik spasial desa adat pada periode ini lebih menegaskan bahwa kawasan bekas pusat kerajaan berubah menjadi kawasan bisnis dan perkantoran. c) Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan wajah visual desa adat dari lansekap tradisional yang alami menjadi artifisial (lebih moderen). d) Dalam perkembangan dengan berbagai perubahan pola spasial, fungsi, dan visualnya, namun keberadahan pampatan agung (catus patha) dengan fungsi kultural di lingkungan desa adat tetap bertahan hingga kini.
-------------------------------	--

Sumber: Diadaptasikan dari Santhyasa (2007)



Gambar 2. Perkembangan pola spasial pusat permukiman Desa Adat Kesiman
Sumber: Diadaptasikan dari Santhyasa (2007)

5. Penutup

Dalam konteks diakronik, perkembangan spasial di Desa Adat Kesiman dengan perubahan yang terjadi dalam prosesnya masih menunjukkan kebertahanan ruang-ruang kultural sebagai simbol identitas keruangan budaya lokal. Hal ini ditunjukkan dengan simbol ruang kultural yang masih kuat, seperti masih bertahannya *pampatan agung (catus patha)* dengan fungsi kulturalnya, sehingga ruang, aktivitas, dan sistem nilai yang melekat pada ruang kultural *pampatan agung* masih tetap lestari. Kebertahanan terhadap simbol identitas ini memberikan penekanan pada konsep tempat (*place*) sebagai suatu unit yang memiliki karakteristik unik tersendiri yang membedakan dengan tempat-tempat lain.

Dengan demikian, dimensi praktikal dalam usaha penciptaan tempat (*placemaking*) untuk memperoleh lingkungan bermukim yang mendukung budaya lokal bermukim penghuninya adalah dengan menjadikan ekspresi keruangan lokal sebagai referensi dalam proses perencanaan guna mewujudkan lingkungan bermukim yang *supportive*.

Daftar Pustaka

- Erwin, B. 1999. Perubahan Spasial Lingkungan di Baluwarti Surakarta. *Jurnal Emas FT. UKI*, Tahun X, No.22: 109-129.
- Hatmoko, A. U. 1994. Model Inventarisasi untuk Pelestarian Arsitektur pada Kawasan Cagar Budaya. *Jurnal Media Teknik*, Tahun XVI, No.3: 3-8
- Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Norberg-Schulz. 1971. *Existence, Space and Architecture*. New York: Praeger.
- Rapoport, Amos. 1969. *House Form and Culture*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Rapoport, Amos. 1983. Development, Culture Change and Supportive Design. In (ed): *Action Planning and Responsive Design*. New York: Pergamon Press.
- Samadhi, T. Nirarta. 2003. Merevitalisasi Tradisi: Mengadopsi Desa Adat di Bali sebagai Unit Perancangan Kota. *Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, 27 (70): 77-92.
- Santhyasa, I Komang Gede. 2007. Sistem Nilai Spasial Desa Adat Kesiman Pada Kawasan Perkotaan Denpasar. *Tesis Magister* yang tidak dipublikasikan. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- _____. 2017. Kosmologi Tata Ruang Permukiman Tradisional: Studi Kasus Permukiman Hindu di Dusun Jenglong, Wagir, Malang. *Jurnal Dharmasmrti*, Vol. XVII Nomor 02 Oktober 2017 : 1-10.

Sasongko, Ibnu. 2003. Relasi Kuasa Dalam Struktur Ruang Permukiman: Kasus Permukiman Sasak. *Jurnal ASPI*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2003, : 29-40.

Suprijanto, Iwan. 1999. Fenomenologi Melalui Sinkronik-Diakronik: Suatu Alternatif Pendekatan Untuk Menjelajahi Esensi Arsitektur Nusantara. *Proseding Simposium Nasional dalam rangka Dies 34 Arsitektur-FTSP ITS*, Surabaya 9-9-1999.

*) Versi awal tulisan ini telah dimuat pada Jurnal Ilmiah Online Local Wisdom, Volume II, Nomor 3, September 2010.

Makna Kultural “Bale Jineng”



Made Novia Indriani dan I Nyoman Suta Widnyana

1. Pendahuluan

Arsitektur tradisional Bali sudah cukup dikenal oleh masyarakat, baik di lingkup nasional (di Indonesia) maupun di dunia internasional. Hal ini sangat terkait dengan Bali sebagai tujuan wisata dunia yang banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun manca negara. Walaupun arsitektur tradisional Bali ini lahir dan tumbuh dalam kehidupan masyarakatnya yang agraris, tetapi masih bisa bertahan sampai sekarang di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Kekuatan arsitektur tradisional Bali ini tidak bisa dilepaskan dari nafas Agama Hindu yang menjiwainya, yang mengajarkan keharmonisan lingkungan buatan dengan alam (Dwijendra, 2008).

Rumah tradisional Bali lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani, sehingga arsitekturnya pun tumbuh untuk mewartakan kehidupan masyarakat agraris. Namun, semakin berkembangnya jaman menyebabkan terjadinya pergeseran pola aktivitas masyarakat. Hal ini juga menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi bangunan tradisional serta usaha-usaha mengadopsi konsepnya ke dalam bangunan modern untuk mewartakan fungsi yang baru.

Dalam proses perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern, tentunya banyak terjadi perubahan pola aktivitas masyarakat. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi juga terhadap ruang-ruang yang tersedia. Banyak ruang dalam rumah tinggal tradisional yang awalnya berfungsi

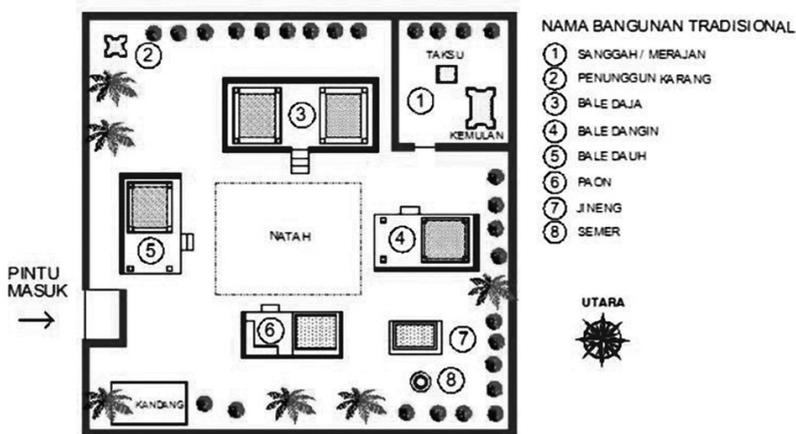
sebagai wadah kegiatan masyarakat agraris bergeser ke fungsi lain sesuai pola aktivitas yang baru.

Jineng adalah sebuah bangunan yang ada dalam kompleks rumah tradisional Bali yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan hasil panen pertanian (biasanya padi). Hal ini menjadi menarik karena pada jaman sekarang banyak masyarakat yang tidak lagi berprofesi sebagai petani dan memanfaatkan bangunan *jineng* untuk fungsi dan aktivitas lain. Terkait dengan hal tersebut di atas, ada hal menarik yang dapat diamati, dikaji bagaimana fungsi, *landmark*, keunikan, seni dan estetika, religius, potensi ekonomi, kekhasan arsitektur, serta kehidupan sosial dan kemasyarakatan pada bangunan *jineng* tersebut dalam mewadahi dinamika aktivitas yang terjadi.

2. Pembahasan

2.1 *Jineng dalam Rumah Tradisional Bali*

Rumah tradisional Bali, sebagaimana diketahui adalah berupa sekumpulan beberapa unit bangunan dengan fungsinya masing-masing yang ditata sedemikian rupa membentuk sebuah komposisi massa. Komposisi massa bangunan ini diikat oleh adanya sebuah ruang terbuka (*natah*) yang berada di tengah-tengah sebagai pusat orientasi dari unit-unit bangunan yang ada. Dari beberapa unit bangunan yang ada tersebut, salah satunya biasa disebut *jineng*. *Jineng* adalah sebuah bangunan yang fungsi utamanya adalah sebagai lumbung, tempat penyimpanan hasil panen pertanian. Bila dilihat dari posisinya dalam rumah tradisional Bali, *jineng* ini biasanya terletak dekat dengan dapur (Dwijendra, 2008).



Gambar 1. Contoh *Lay Out* Rumah Tradisional Bali.
Sumber: Rijasa, 2012

Secara umum letak *jineng* cenderung berada di bagian dalam (belakang) dari sebuah rumah tinggal, tetapi di beberapa tempat di Bali, posisi *jineng* ini diletakkan di dekat pintu masuk rumah sebelum posisi dapur atau *paon*. *Jineng* merupakan salah satu bentuk dari beberapa varian bentuk bangunan lumbung yang ada di dalam sebuah rumah tradisional Bali. Bentuk lainnya ada disebut *kelumpu* dan *gelebeg*. Bila ditinjau dari jumlah tiangnya, *jineng* dikelompokkan ke dalam bangunan yang bertiang empat membentuk segi empat, yang jika dilihat dari konstruksinya termasuk bangunan bertingkat, dimana lantai pertama yang berupa *bale-bale*, sedangkan lantai di atasnya yang terbuat dari konstruksi kayu digunakan sebagai tempat penyimpanan padi.

Jineng biasanya dimiliki oleh masyarakat petani penggarap ataupun para pemilik tanah. Pada jaman dulu, keberadaan *jineng* dalam sebuah rumah tinggal di Bali bisa dikatakan sebagai simbol dari status sosial pemiliknya, dimana semakin besar ukuran lumbung padi sebagai tanda makin tinggi status sosial ekonomi pemilik rumah atau dianggap semakin kaya. Keberadaan sebuah lumbung padi di dalam sebuah rumah menunjukkan kepemilikan sawah sang pemilik rumah. Pada saat musim panen tiba, kesibukan di dalam *jineng* benar-benar terlihat baik dari proses menaikkan padi ke atas, atau menurunkannya pada saat akan dijemur untuk seterusnya diolah menjadi beras.



Foto 1. *Bale jineng* dalam rumah tradisonal Bali (Foto: Penulis)

2.2 Fungsi dan Aktivitas dalam *Jineng*

Bila dilihat dari fungsinya, keberadaan *jineng* pada awalnya mempunyai fungsi utama sebagaimana fungsi sebuah lumbung yaitu sebagai tempat penyimpanan hasil panen pertanian terutama padi. Pada awalnya padi yang disimpan di

dalam *jineng* biasanya padi yang diikat masih ada tangkainya dan tentunya sudah dalam keadaan kering, tetapi pada saat sekarang banyak padi yang disimpan sudah dimasukkan ke dalam karung. Padi diletakkan di bagian lantai atas yang dibuat dari kayu, sedangkan lantai bawah yang berupa *bale-bale* banyak digunakan sebagai tempat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan pertanian seperti tempat menyimpan peralatan bertani. Selain itu, *jineng* juga banyak dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan pekerjaan dapur, sehingga *jineng* ini bisa dikatakan berfungsi sebagai perluasan dari dapur. Hal ini sangat memungkinkan dilakukan mengingat dalam tata letak massa bangunan rumah tradisional Bali, posisi *jineng* dan dapur ini selalu berdekatan. (Dwijendra, 2008).

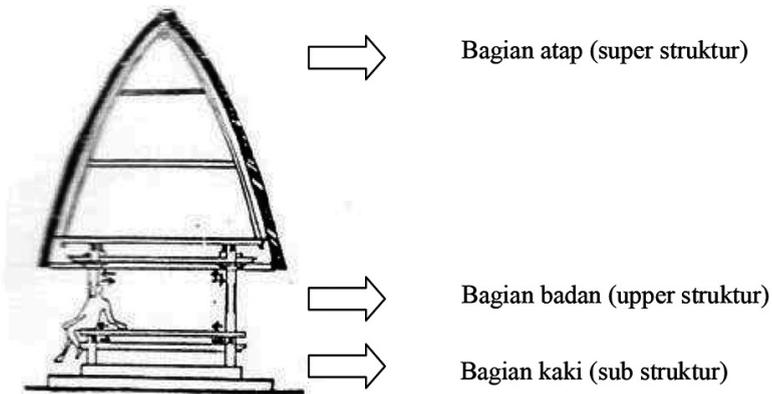
Sebagai tempat penyimpanan padi, *jineng* ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari simbol kemakmuran, sehingga dalam masyarakat Bali dipercaya di dalam *jineng* ini sebagai tempat dewi kemakmuran atau *Dewi Sri*. dalam kaitan ini, maka pada hari-hari tertentu pemilik rumah biasa melaksanakan upacara (ritual) sebagai wujud penghormatan dan syukur atas kemakmuran yang telah dilimpahkan serta memohon agar panen melimpah. Bagian atas di bawah atap berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi). Bagian tengah (*bale-bale*) yang multifungsi, biasanya sebagai aktivitas penunjang dapur. Lantai bisa digunakan sebagai tempat menyimpan peralatan, kayu bakar, dan ternak.



Foto 2. Bagian *bale jineng*
Sumber : mawacarabali.blogspot.co.id

2.3 Konstruksi Jineng

Bila dilihat dari bagian struktur dan konstruksinya, maka *jineng* bisa dilihat dalam tiga bagian konstruksi, yaitu konstruksi dasar (sub struktur), konstruksi badan (*upper* struktur), dan konstruksi atap (super struktur). Sistem konstruksi dalam *jineng* menggunakan semu bahan utama berupa kayu dengan cara konstruksi yang sebagian besar dengan sistem sambungan lubang-purus, pasak, dan juga ikat. Hanya sedikit bagian tertentu yang menggunakan paku, itupun sebagai penguat tambahan, bukan sebagai kekuatan utama.



Gambar 2. Bagian-Bagian Konstruksi Jineng

Sumber : mawacarabali.blogspot.co.id

Struktur Dasar

Bagian dasar dari bangunan *jineng* meliputi bagian pondasi, lantai (*bebaturan*), dan alas tiang (umpak) atau di Bali biasa disebut *sendi*. Sistem pondasi yang digunakan dalam bangunan *jineng* ini adalah pondasi titik yang berfungsi meneruskan beban dari tiang ke dalam tanah. Pondasi ini biasanya dibuat dari pasangan batu padas, tepat berada di bawah posisi tiang. Tepat di atas pondasi ini nantinya ditempatkan alas untuk perletakan tiang (disebut umpak/*sendi*). Umpak ini juga dibuat dari batu padas, atau pasangan bata dan semen.

Berikutnya adalah bagian lantai (*bebaturan*). Bagian ini biasanya dibuat dari batu padas yang cukup keras, atau pada saat sekarang biasa dibuat dengan pasangan bata dan semen atau ada juga menggunakan keramik. Bentuk *bebaturan jineng* biasanya dibuat dengan bentuk yang sederhana, tanpa profil dan ornamen sebagaimana kebanyakan lantai bangunan tradisional Bali lainnya. Tinggi lantai *jineng* ini dari permukaan tanah biasanya relatif lebih rendah dari tinggi lantai bangunan lainnya, bisa berkisar 15-25cm.

Struktur Badan

Bagian badan *jineng* ini dibentuk dari empat tiang kokoh yang membentuk persegi empat dengan ukuran tiang yang relatif besar, dan biasa dibuat dengan profil yang sederhana tanpa ornamen. Hal ini mengingat fungsi *jineng* sebagai lumbung padi, sehingga tiang ini harus kuat menahan beban padi yang disimpan di dalam *jineng*. Disamping itu, tiang ini juga harus kuat menahan beban bagian lantai atas tempat menyimpan padi dan beban atapnya. Keempat tiang ini tepat berdiri di atas umpak (*sendi*) batu padas yang kemudian akan meneruskan semua beban ke dalam pondasi batu yang berada di bawah lantai dan selanjutnya menyalurkan seluruh beban ke tanah.

Di bagian badan *jineng* yang berupa empat tiang ini terdapat *bale-bale* yang tumpuan utamanya berupa balok-balok kayu yang disebut balok pendek (*sunduk pendek*) dan balok panjang (*sunduk panjang*). Sebagai penutup *bale-bale* ini biasa dibuat dari bahan papan kayu yang di bagian tepinya biasa dibatasi dengan balok kayu yang disebut *waton* sehingga kelihatan kokoh.

Di bagian atas masing-masing tiang ini dipasang kepala tiang yang terbuat dari kayu berbentuk persegi empat bujur sangkar dengan ukuran yang cukup lebar yang disebut *langki*, dan di atas *langki* ini baru dipasang balok-balok kayu yang dipasang dengan jarak yang cukup rapat sebagai penopang dari papan yang menjadi lantai tempat penyimpanan padi di atasnya.

Struktur Atap

Dilihat dari bentuknya, atap *jineng* ini berbentuk pelana tetapi pelananya dibentuk melengkung cembung, tidak lurus seperti kebanyakan bentuk dasar atap bangunan yang lainnya. Untuk membentuk atap yang melengkung ini biasa dibuat dengan menggunakan usuk dari bambu yang diambil hanya bagian ujung atasnya sehingga sangat lentur untuk bisa dibentuk melengkung, atau bisa juga dibuat dari kayu tipis sampai cukup lentur untuk dibentuk melengkung. Sementara tumpuan usuk biasa berupa balok kayu yang ditumpu dengan kuda-kuda kayu juga. Sebagai *lis plank*, bisa digunakan bahan bambu yang dibelah menjadi dua bagian sehingga penampangnya berbentuk setengah lingkaran, atau bisa juga digunakan papan kayu yang biasanya dibuat sederhana tanpa banyak ornamen.

Untuk bahan penutup atap biasanya menggunakan bahan alang-alang yang dipasang dengan diikat menggunakan tali bambu, tetapi pada saat sekarang banyak juga *jineng* yang menggunakan bahan penutup terbuat dari bahan genteng ataupun seng yang disesuaikan dengan kondisi tempat dan

lingkungan di mana *jineng* itu dibuat.

2.4 Makna Kultural

Kultural, adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan, dan segala sesuatu yang ada kaitan dengan unsur budaya. Menurut The Burra Charter (1999), pengertian dan konsep *cultural significance* adalah “*aesthtetic, historic, scientific or social value for past, present or future generations cultural significance is a concept which helps in estimating the value of lplaces*”. Tolak ukur makna kultural antara lain: kesejarahan, kekhasan arsitektur, umur bangunan, sosial dan kemasyarakatan, seni dan estetika, keunikan dan kelangkaan, *landmark*, fungsional, potensi ekonomi dan religius.



Gambar 3. Tolak Ukur Makna Kultural
Sumber : Analisis Penulis (2019)

Kajian ini merupakan studi literatur dengan membaca serta mendeskripsikannya secara mendalam melalui observasi, survei, wawancara dan dokumentasi yang ditentukan dengan cara *purposive sampling*.

Sejarah Lumbung

Ditilik dari sejarahnya, ide lumbung desa ternyata sudah berumur tak kurang dari seratus tahun. Inisiatif untuk mengembangkan bangunan lumbung desa ini dimulai tahun 1902 oleh Messman, orang Belanda yang saat itu menjabat sebagai Residen Cirebon dan Sumedang (Jawa Barat). Adanya kebijakan pemerintah swasembada pangan tahun 1970-1980, Bali harus menerima dampaknya.

Salah satunya, terkikisnya model budidaya pertanian tradisional dengan segala perkakas yang unik, termasuk *jineng*.

Fungsi jineng, Potensi Ekonomi

Zaman dulu, lumbung desa mempunyai fungsi yang strategis dalam menopang ketahanan pangan. Acap kali usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat tidak memberikan hasil yang diharapkan, misalnya gagal panen karena serangan hama atau bencana alam. Kondisi seperti ini jika tidak diantisipasi tentu akan menyulitkan petani sendiri dan juga orang lain yang memerlukan hasilnya. Pada saat demikian keperluan hidup hanya dapat dipenuhi dengan persediaan pangan yang ada. Di samping untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama dalam menghadapi musim paceklik, lumbung desa juga mempunyai peran sosial. Dengan keberadaan lumbung desa, terutama yang dikelola secara bersama-sama, tentu akan menumbuhkan rasa sosial di antara anggota masyarakat. Hubungan masyarakat yang bahu-membahu, saling membantu, dan merasa senasib sepenanggungan dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan.

Saat ini, sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan. Sisa kearifan pengelolaan pangan itu terkikis oleh perubahan tuntutan hidup, dimana kepraktisan menjadi salah satu dasar perhitungan. Padahal keberadaan lumbung sangat berguna apabila sedang terjadi paceklik. Mulai memudarnya peran lumbung ditenggarai disebabkan karena mulai memudarnya budaya gotong royong di masyarakat pedesaan, karena daya tahan keberadaan lumbung desa sebetulnya terletak pada kehidupan sosial dan semangat gotong royong yang mendarah daging dalam masyarakat.

Alih fungsi *jineng* merupakan konsekuensi nyata dari pergeseran penghidupan orang Bali. Mulanya berpenghidupan di sektor agraris ke sektor lain, seperti pariwisata dan jasa lainnya. Pergeseran pola penghidupan tersebut menyebabkan hal-hal termasuk perabotan atau perkakas pertanian mengalami kehilangan fungsi pokok. Sektor pariwisata yang semakin mendominasi, juga menyebabkan perkakas dan perlengkapan pertanian tradisional, mengalami perluasan fungsi. Alat-alat tersebut bersikap akomodatif terhadap tuntutan selera pasar wisata. Pariwisata menjadikan *jineng* yang awalnya merupakan wadah padi, *linggih Ida Bathara Sri* beralih fungsi menjadi rumah turis sebagai *villa*.

Pergeseran fungsi *jineng* tidak selalu karena faktor tunggal. Populasi penduduk terus berkembang menyebabkan kebutuhan ruang meningkat.

Bangunan tradisional tidak bisa menjawab kebutuhan ruang jadi tergusur, salah satunya *jineng*. Dalam kasus alih fungsi Jineng, Bali telah kehilangan salah satu khasanah arsitektur tradisional .

Keunikan dan Kekhasan Arsitektur

Secara ilmu arsitektur, *jineng* merupakan struktur yang tepat untuk menyimpan barang sejenis padi. Strukturnya yang melengkung bermanfaat untuk menjaga suhu di dalamnya tetap hangat. Konstruksinya yang kokoh tertutup rapat, mengantisipasi masuknya hewan pengerat yakni tikus ke dalam *jineng*. Oleh karena itu, bangunan model *jineng* tidak cocok untuk tempat tidur, selain itu *jineng* merupakan bangunan sakral (*linggih Ida Bathara Sri*).

Sosial Budaya

Keberadaan *jineng* biasanya dimiliki oleh masyarakat petani penggarap atau para pemilik tanah. Pada zaman dahulu, dalam sebuah rumah tinggal di Bali, keberadaan *jineng* dapat terlihat sebagai simbol dari status sosial pemiliknya. Semakin besar ukuran lumbung padi tersebut menandakan semakin tinggi pula status sosial ekonomi pemilik rumah, atau dianggap semakin kaya. Keberadaan sebuah lumbung padi tersebut menunjukkan kepemilikan sawah sang pemilik rumah. Dapat terlihat saat musim panen tiba, tampak kesibukan di dalam *jineng* dari proses menaikkan padi ke atasnya, atau menurunkan padi akan dijemur dan diolah menjadi beras.

Umur Bangunan

Umur bangunan *jineng* ini tergantung dari jenis kayu yang dipakai, misalnya pembuatan *jineng* menggunakan kayu jati, bangunan *jineng* akan bertahan lama kurang lebih 20 sampai 25 tahun, karakteristik kayu jati sangat stabil, kokoh dan tahan lama mampu membuatnya menjadi pilihan utama untuk bahan bangunan. Selain itu, struktur kayu jati untuk bahan bangunan *jineng* memilih jenis jati karena lebih tahan jamur, rayap dan serangga lainnya karena kandungan minyak di dalam kayu jati yang unik dan tidak terdapat pada struktur kayu lainnya.

Seni dan Estetika

Konsep ini juga disebutkan tentang teknik konstruksi dan materialnya, ada namanya *Tri Angga*, yang terdiri dari:

- *Nista* menggambarkan hirarki paling bawah dari sebuah bangunan, diwujudkan dengan pondasi *jineng* atau bawah *jineng* sebagai penyangga

jineng. Bahannya pun biasanya terbuat dari batu bata atau batu gunung.

- *Madya* adalah bagian tengah bangunan yang diwujudkan dalam *jineng* untuk tempat peristirahatan atau berkumpulnya keluarga. *Madya* menggambarkan strata manusia atau alam manusia.
- *Utama* adalah simbol dari bangunan bagian atas yang diwujudkan dalam bentuk atap yang diyakini juga sebagai tempat paling suci dalam *jineng* sehingga juga digambarkan tempat tinggal *Dewi Sri*. Pada bagian atap, bahan yang digunakan pada arsitektur tradisional adalah atap alang-alang atau genteng.

Dalam setiap pembangunan *jineng* selalu menggunakan ukuran *Asta Kosala Kosali* merupakan sebuah cara penataan lahan untuk tempat tinggal dan bangunan suci. Penataan bangunan yang didasarkan oleh anatomi tubuh yang punya. Pengukurannya pun lebih menggunakan ukuran dari tubuh yang empunya rumah, sehingga besar bangunan *jineng* akan ideal sekali dengan yang empunya rumah.

Bentuk

Dari segi bentuk *jineng* pada jaman dulu dan jaman sekarang tidak jauh berubah, tetapi dari segi ukuran kemungkinan berubah – rubah karena keterbatasan lahan juga berpegaruh dalam ukuran *jineng* tersebut. Dari segi struktur bangunan *jineng* tersebut, *jineng* menggunakan struktur elastis, karena pembangunan *jineng* menggunakan pen dan lubang serta dipasak dengan bambu, lalu dibantu dengan paku, dan di bagian bawah (sunduk) itu tidak menggunakan paku. Pada sunduk tersebut menggunakan lait dan di bagian yang lain juga menggunakan lait. Pada bagian atap ada beberapa yang menggunakan paku untuk memperkuat pasangan usuk dan reng tersebut. Pada bagian pemasangan genteng menggunakan kabel atau tali untuk mengikat genteng tersebut agar genteng tidak jatuh, karena bentuk atap *jineng* melengkung dan susah kalau tidak diikat gentengnya.

Religius

Jineng sebagai tempat penyimpanan padi atau penyimpanan lahan panen dan upacara ritual pemujaan *Dewi Sri*. *Jineng* juga difungsikan sebagai tempat *metanding* atau tempat keluarga membuat *canang*. Setiap bangunan *jineng* terdapat tempat pemujaan atau *pelangkiran* untuk memuja *Dewi Sri* yang *melinggih* di *jineng*.

Landmark

Lahan pembangunan *jineng* saat ini sudah jarang ditemukan di pekarangan rumah. Khusus di perkotaan sudah pasti jarang ditemukan bangunan *jineng* karena keterbatasan lahan dan juga jarang ada lahan sawah serta jarang penduduknya yang mempunyai hasil panen untuk disimpan di *jineng*. Jika terdapat *jineng* di pekarangan rumah tersebut, umumnya difungsikan sebagai tempat menerima tamu atau beristirahat.

3. Penutup

Bale jineng merupakan bagian dari rumah tradisional Bali yang banyak mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Perubahan tersebut diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal, namun keadaan tersebut diupayakan agar selalu menjaga keaslian dan kemurnian bentuk serta fungsinya, tidak semata hanya untuk keuntungan atau profit saja. Makna kultural menekankan kembali bahwa perubahan bentuk dan fungsi suatu bangunan mengakibatkan perubahan perilaku, sehingga hal tersebut dapat dijadikanantisipasi dan pemahaman yang mendalam tentang peran *bale jineng* dalam keselarasan dan keharmonisan hubungan baik dengan Tuhan, manusia dan alam.

Daftar Pustaka

- The Burra Charter (The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance)*. 1999. Australia ICOMOS Inc.
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin, 2008, *Arsitektur Tradisional Bali Berdasarkan Asta Kosala-Kosali*. Denpasar: Udayana University Press.
- _____, 2009a. *Arsitektur dan Kebudayaan Bali Kuno*. Denpasar: Udayana University Press.
- _____, 2009b. *Arsitektur Tradisional Bali dalam Ranah Publik*. Denpasar: CV. Bali Media Adikarsa.
- Rijasa, Made Mariada. 2012. Nilai Green dalam Tata Letak Rumah Tradisional Bali. *Jurnal Tekstur Teknik Arsitektur II-1*

Ruang Budaya yang Hilang di Desa Pegayaman, Buleleng - Bali



Ni G.A. Diah Ambarwati Kardinal

1. Pendahuluan

Desa Pegayaman di Kecamatan Sukasada Buleleng adalah sebuah desa muslim tertua di Bali yang telah ada semenjak zaman Kerajaan Buleleng pada masa pemerintahan Ki Barak Panji Sakti (Awal Abad 16). Terdapat tiga suku yang mendiami wilayah Desa Pegayaman yakni Suku Jawa, Bugis dan Bali. Awalnya Pegayaman dihuni oleh Suku Jawa yang berasal dari prajurit Kerajaan Mataram. Pernikahan dengan warga setempat yang beragama Hindu melahirkan percampuran baru. Disusul kemudian masuknya suku bugis yang berasal dari ekspedisi Raja Hasanuddin (Makasar) yang perahunya kandas saat akan menuju ke Madura dan kemudian akhirnya memilih untuk menetap.

Selama berabad-abad, ketiga suku dengan dua agama ini, yakni Hindu dan Islam tetap hidup rukun dan harmonis. Terjadi akulturasi yang tampak pada tradisi menggunakan nama Bali seperti orang Bali pada umumnya seperti *Wayan*, *Made*, *Nyoman*, dan *Ketut*. Bahasa sehari-hari yang digunakan juga bahasa Bali *madya*. Bahasa Jawa dan Bugis sudah menghilang. Dalam sistem masyarakat Desa Pegayaman menggunakan *bale banjar* dan dipimpin oleh seorang *kelian banjar*. Kesenian yang berkembang seperti *bodrah*, *hardah* juga

mendapatkan pengaruh dalam tata kostum dan syairnya. Dalam merayakan hari besar keagamaan, masyarakat Desa Pegayaman juga mengenal tradisi seperti umat Hindu Bali yakni *penapean*, *penampahan* dan *manis* juga tradisi *ngejot*. Dalam bidang pertanian Desa Pegayaman juga menggunakan sistem organisasi *subak* (Nugraha dkk, 2015).

Pelaksanaan hari besar keagamaan serta tradisi-tradisi baik oleh umat Islam maupun Hindu menciptakan ruang-ruang budaya di Desa Pegayaman. Misalnya pada saat upacara besar keagamaan seperti perayaan *Maulud Nabi* maka ruang budaya tidak hanya tercipta di skala mikro yakni hunian atau masjid, tetapi hingga ke skala makro kawasan dengan digunakannya ruas-ruas jalan sebagai bagian dari pawai kesenian. Ruang-ruang budaya ini memberikan ciri khas permukiman Desa Pegayaman. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Dansby *dalam* Sasongko (2005), bahwa pembentukan suatu lingkungan permukiman pada dasarnya sangat ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah budaya masyarakat setempat. Bagaimana individu berhubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sudah tentu berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya, selanjutnya bagaimana ruang itu ditata dan dirancang sangat tergantung pada pandangan hidup masing-masing.

Pada kebudayaan tradisional, bentuk permukiman dihadapkan pada latar belakang pengaturan yang bersifat ritual, yang pada dasarnya bertujuan sebagai pengaturan tatanan secara harmoni. Putra *dalam* Antariksa (2011) menyatakan bahwa terdapat dua sistem pengaturan utama pada konsep ruang tradisional, yaitu pengaturan geometrik yang dihubungkan dengan hal-hal bersifat ritual dan kosmologi. Pada konteks budaya terkait dengan permukiman, Yi-Fu Tuan *dalam* Sasongko (2005) menyatakan untuk menjelaskan makna dari organisasi ruang dalam konteks tempat (*place*) dan ruang (*space*) harus dikaitkan dengan budaya. Budaya sifatnya unik, antara satu tempat dengan tempat lain bisa sangat berbeda maknanya. Selanjutnya manusia akan mengekspresikan dirinya pada lingkungan dimana dia hidup, sehingga lingkungan tempat tinggalnya akan diwujudkan dalam berbagai simbolisme sesuai dengan budaya mereka. Bagaimana manusia memilih tempat tertentu dan menggunakan berbagai kelengkapan, ataupun berbagai cara untuk berkomunikasi pada dasarnya merupakan “bahasa” manusia. Pola ini tidaklah semata dilihat dalam kaitan dengan lingkungan semata, akan tetapi pada waktu yang bersamaan juga merupakan perwujudan budaya mereka.

2. Pola Permukiman Desa Pegayaman

Di Desa Pegayaman, letak permukiman penduduk tersebar di berbagai lokasi.

Komunitas muslim mayoritas berada di pusat Desa Pegayaman. Komunitas Hindu berada di Banjar Amertha Sari yang letaknya jauh dari pusat desa. Selain dua permukiman tersebut, rumah-rumah penduduk tersebar di daerah kebun-kebun di Pegayaman. Untuk mencapai permukiman di kebun tersebut cukup membutuhkan waktu dengan medan yang relatif sulit dan kondisi jalan yang tidak semuanya memiliki perkerasan. Dikarenakan wilayah desa yang luas, maka kebanyakan pelaksanaan kegiatan keagamaan dilaksanakan lebih siang di dibandingkan dengan tempat lainnya. Misalnya *sholat id* pada saat Idul Fitri, di daerah Kota Singaraja dilaksanakan pukul 06.30 Wita maka di daerah Pegayaman dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita untuk memberikan waktu yang cukup bagi warga yang rumahnya jauh dari Masjid.

Pola Permukiman di pusat Desa Pegayaman mengikuti pola linier mengikuti jalan. Namun blok massanya cenderung tidak teratur. Permukiman mengikuti jalur jalan utama dan terhubung banyak oleh gang-gang kecil. Gang-gang kecil itu menjadi banyak karena aturan batas antar persil tetap dipegang yaitu teritisan atap sepanjang 75 cm. Pertemuan kedua teritisan atap membentuk gang selebar 1,5 meter yang cukup untuk dilalui dengan nyaman baik oleh orang maupun kendaraan roda dua.



Foto 1. Pola permukiman yang mengikuti jalan
(Foto: Penulis).

Rumah-rumah di Pegayaman berada pada lahan pekarangan yang cukup luas. Rata-rata memiliki lahan 5-8 are. Bahkan beberapa persil memiliki lahan yang lebih besar. Umumnya bagian depan merupakan bagian terbuka yang cukup besar, sementara bangunan rumah posisinya agak di belakang. Dalam satu persil umumnya terdapat 1-2 bangunan. Terdapat satu bangunan induk dan satu bangunan *service* untuk kegiatan memasak dan mandi. Namun, ada juga yang memiliki satu bangunan saja karena ruang *servicenya* langsung berada dalam rumah induk. Namun demikian, umumnya letak bangunan induk dan bangunan

service terpisah. Letak bangunan *service* bisa berada di samping rumah induk atau pun di belakang rumah induk.



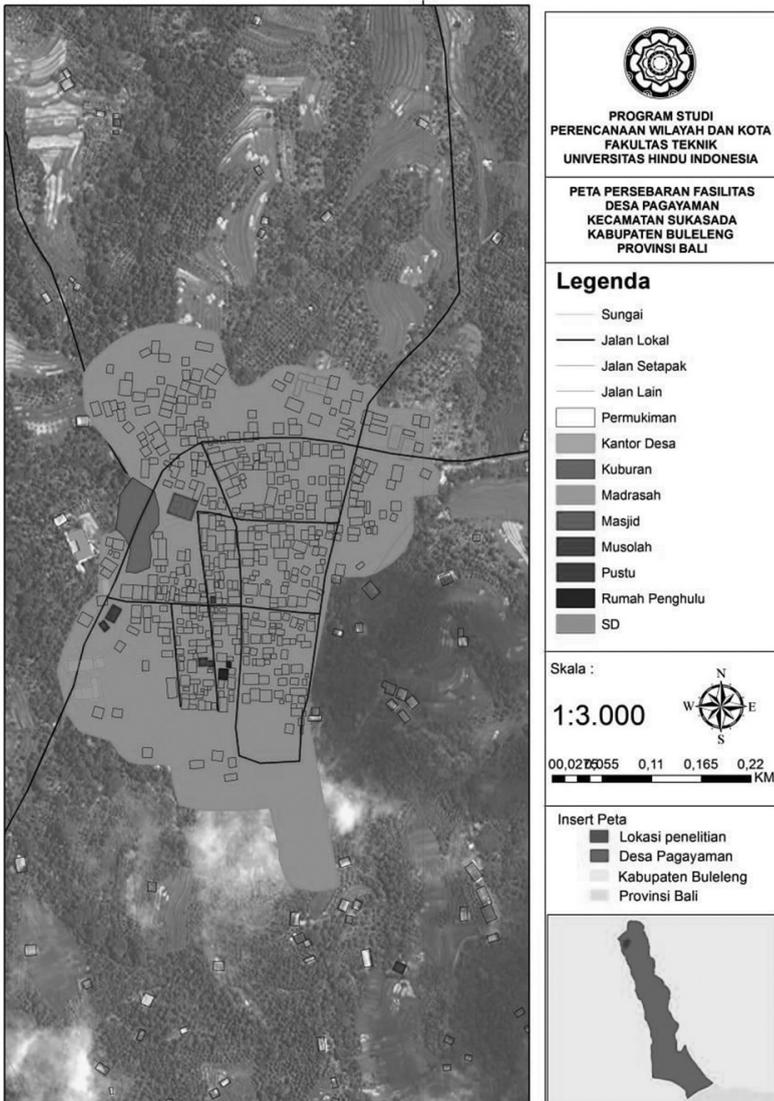
Foto 2. Gang-Gang Penghubung Yang Tercipta Karena Aturan Teritisan 75 Cm
(Foto: Penulis)



Foto 3. Rumah-Rumah Tua di Pegayaman Dengan Halaman depannya Yang Luas
(Foto: Penulis)

Permukiman muslim di Desa Pegayaman berada di daerah sekitar masjid. Tapak permukiman cenderung meninggi ke arah selatan, kearah perkebunan milik masyarakat desa. Kehidupan beragama umat muslim di Desa Pegayaman sangat kuat. Keberadaan tempat ibadah seperti masjid dan mushola menjadi penting dalam masyarakat. Di pusat Desa Pegayaman terdapat beberapa mushola. Mushola lainnya tersebar di seluruh desa, bahkan hingga di permukiman

masyarakat di kebun-kebun Desa Pegayaman. Kalau ditotal jumlahnya sekitar 30 mushola. Selain mushola dan masjid juga terdapat sekolah *madrrasah*, pondok *pesantren* serta sekolah dasar. Bila diamati maka posisi masjid berada di daerah yang tinggi pada kawasan permukiman. Kuburan diletakkan berdekatan dengan masjid namun berada di daerah yang lebih rendah.



Gambar 1. Peta Pola Permukiman Desa Pegayaman



Foto 4. Letak Masjid dan Kuburan Islam yang berada di bawahnya
(Foto: Penulis)

Sebagai sebuah desa muslim dengan pendidikan dan pelaksanaan tradisi yang kuat, peran tokoh-tokoh Agama Islam seperti *penghulu* desa, guru *ngaji* menjadi penting dalam masyarakat. Kediaman mereka sering menjadi pusat kegiatan warga selain kediaman kepala desa, masjid, sekolah, *pesantren*, dan kantor desa. *Penghulu* disini adalah jabatan yang berlaku seumur hidup untuk orang yang mengurus kegiatan keagamaan untuk umat muslim di Desa Pegayaman. Oleh karena itu, kegiatan masyarakat banyak dilakukan di rumah Bapak *Penghulu* atau tokoh agama lainnya, maka rumah-rumah tinggal mereka biasanya memiliki halaman luas. Seperti rumah tinggal yang dimiliki Bapak *Penghulu* yang sering digunakan untuk kegiatan memasak sebagai persiapan acara untuk mushola yang ada di depan rumahnya, juga untuk kegiatan memasak hari raya keagamaan lainnya untuk tingkat desa.



Foto 5. Penggunaan Halaman Samping Rumah Bapak Penghulu untuk Pengunjang Kegiatan Keagamaan (Foto: Penulis).

3. Hilangnya Ruang Budaya

Awalnya pola hunian di Desa Pegayaman memiliki ciri khas dengan adanya ruang terbuka yang cukup besar pada bagian depan halaman atau samping halaman rumah (Foto 3). Ruang terbuka tersebut mencapai 50-60% dari keseluruhan luas lahan. Dikarenakan mayoritas masyarakat di Pegayaman merupakan petani cengkeh, halaman yang luas juga digunakan untuk menjemur hasil cengkeh mereka. Ruang terbuka tersebut juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan upacara keagamaan atau juga tradisi-tradisi pada masyarakat. Seperti pada saat upacara pernikahan, pemilik hajatan mengundang kesenian *hadrah* dan *burdah* untuk meramaikan acara. Acara kesenian digelar di halaman rumah. Tetangga sekitarnya pun turut membantu memasak di rumah pemilik hajatan.

Di bulan *ramadhan* disaat menunggu *bedug magrib*, biasanya ramai masyarakat melakukan permainan tradisional di halaman rumah mereka seperti bermain *gasing* atau disebut *megangsing*. Permainan ini memerlukan halaman yang alami alias tidak ada perkerasan dan cukup luas. Selain itu jenis permainan lain yang sering dilakukan adalah *pencak belebet* (permainan bela diri menggunakan senjata rotan). Anak-anak perempuan bermain *ceg-ceg pyak*, karet gelang, juga *dawang-dawang* (engrang) yang terbuat dari bambu yang dimainkan baik putra maupun putri.



Foto 6. Tradisi Main Gangsing di Pegayaman Saat Menunggu Bedug Magrib
Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=QoUXW00vOHI>

Pertambahan penduduk di Desa Pegayaman menuntut kebutuhan lahan untuk permukiman. Masyarakat Pegayaman senang hidup berkumpul. Walaupun pilihannya harus hidup berdesak-desakan di pusat desa. Lahan pekarangan yang awalnya merupakan tempat untuk orang tua dan anak-anaknya, ketika sang anak juga membentuk keluarga baru, mereka juga membangun tempat tinggal di lahan yang sama. Pembangunan tersebut membuat halaman rumah menjadi sesak. Jarak antar bangunan yang mepet tidak memberikan ruang lagi untuk melakukan tradisi-tradisi yang mereka miliki di halaman rumah. Sudah tidak ada ruang lagi. Bangunan terbangun hingga tidak ada jarak lagi dengan jalan. Hanya menyisakan jarak untuk drainase saja. Perubahan ini membawa konsekuensi ruang terbuka yang dulunya digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan dan tradisi hilang tergantikan menjadi ruang terbangun untuk tempat tinggal dan usaha. Jumlah anak yang lebih dari satu menuntut kebutuhan akan rumah tinggal sehingga halaman depan yang kosong digunakan sebagai rumah tinggal baru. Rumah asli pun kemudian menjadi tidak terlihat karena posisinya di belakang.

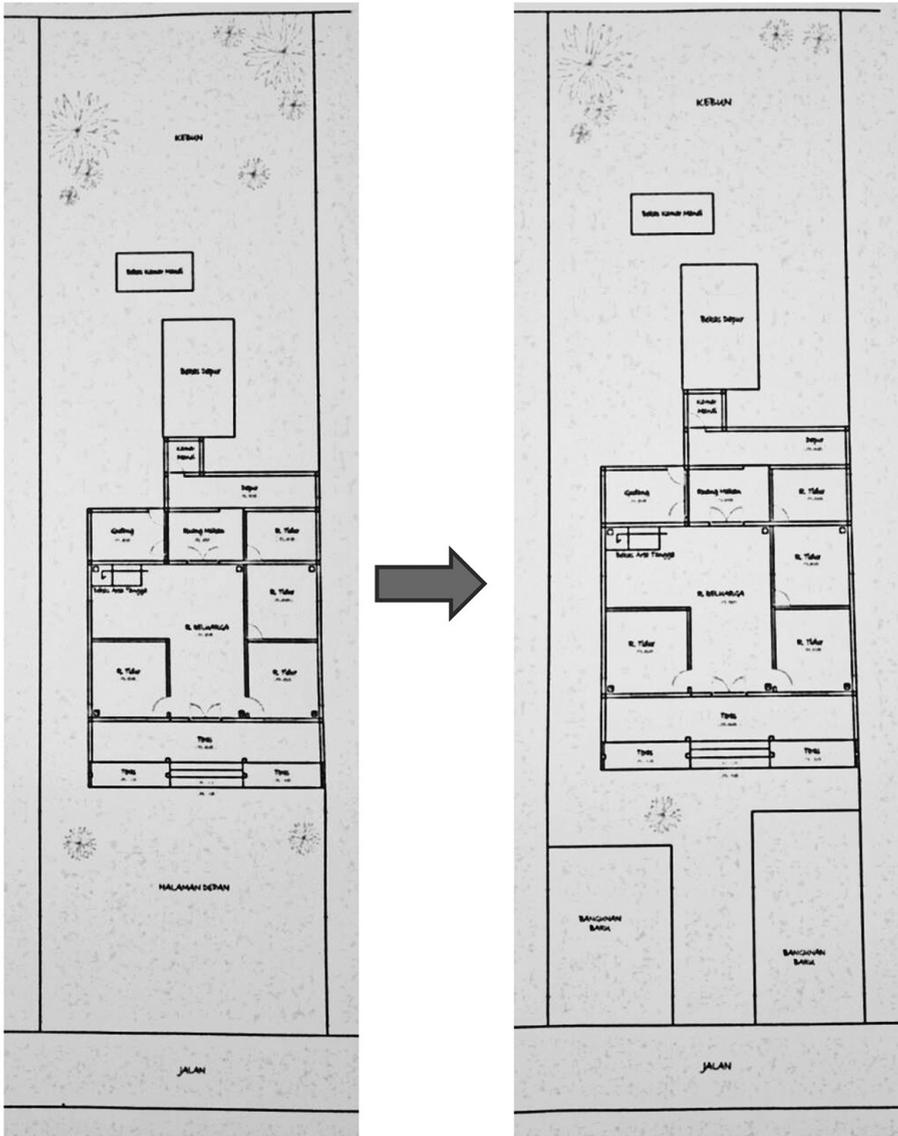


Foto 7. Tidak Ada Lagi Ruang (Foto: Penulis)

Hal ini yang juga terjadi pada rumah keluarga Bapak Ibrohim, mantan Kepala Desa Pegayaman. Keluarga beliau menempati rumah yang sudah berumur ratusan tahun. Bentuk rumah seperti yang dimiliki keluarga Bapak Ibrohim ini sudah tidak ditemui lagi di Pegayaman. Sudah banyak yang berubah bentuk dengan melakukan penutupan pada area teras atau pun dibongkar tergantikan dengan yang baru. Rumah ini juga sudah memiliki perubahan pada interior bangunannya dengan penambahan sekat-sekat ruangan menjadi kamar tidur pada ruang tengah yang dulunya adalah ruangan yang lapang untuk kenyamanan penghuni rumah. Demikian juga dengan posisi dapur dan kamar mandi juga telah mengalami perubahan. Tangga dalam ruangan yang dulunya menuju loteng juga telah hilang. Hanya tampilan tampak depannya masih sangat terjaga. Halaman depannya yang sangat luas kini menjadi sempit dengan kehadiran bangunan baru milik kerabat keluarga tersebut, sehingga bangunan tua tak terlihat dari jalan utama.



Foto 8. Suasana Rumah Tua Milik Kelaurga Bapak Ibrohim
(Foto: Penulis)



Gambar 2. Perubahan Pada Rumah Tinggal Keluarga Bapak Ibrohim Setelah Adanya Penambahan Bangunan di Halaman Depannya



Foto 9. Rumah Asli yang Akhirnya berada di Bagian belakang Bangunan Baru
(Foto: Penulis)

Hilangnya ruang budaya di pekarangan rumah tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, dimana ruang terbuka yang baru sebagai pengganti?. Pada akhirnya ruang jalanlah kemudian yang menjadi ruang budaya. Jalan yang semula telah memiliki peran sebagai ruang budaya di Pegayaman karena menjadi ruang bagi pawai tradisi di lingkungan desa pada saat *ramadhan* dan *Maulud Nabi* mendapatkan peran tambahan pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan pribadi masyarakat. Namun yang belum tergantikan adalah ruang tradisi untuk permainan tradisional. Di pusat desa sudah sulit dilakukan karena minimnya lahan. Tradisi tersebut biasanya dilakukan di rumah-rumah penduduk yang tidak berada di pusat desa lagi. Perlahan anak-anak di Desa Pegayaman tidak lagi mengenal tradisi permainan tradisional desanya. Ruang budaya pada skala mikro pun perlahan mulai hilang perannya di Desa Pegayaman.



Foto 10. Ruang Jalan yang Menjadi Ruang Budaya Penting di Desa Pegayaman
(Foto: Penulis)

4. Penutup

Ruang-ruang budaya di Desa Pegayaman terbentuk dari skala mikro hingga skala makro. Dengan bertambahnya jumlah penduduk membuat pekarangan yang dulunya memiliki halaman luas yang memiliki peran sebagai ruang budaya menjadi hilang. Peran ruang budaya yang hilang tersebut tergantikan oleh ruang budaya pada ruang jalan. Ruang jalan di Pegayaman pun menjadi ruang yang penting karena mendapat tambahan fungsi selain sebagai jalur lintasan pawai pada acara *ramadhan* dan *Maulud Nabi*. Kekhasan lainnya adalah ruang budaya di Desa Pegayaman yang tercipta di rumah para tokoh-tokoh Agama Islam seperti rumah *penghulu*, rumah guru *ngaji* dan juga rumah kepala desa yang berperan dalam melestarikan tradisi masyarakat Desa Pegayaman. Keberadaan rumah tua milik keluarga Ibrohim berumur ratusan tahun yang masih dipertahankan menjadi sarana pembelajaran yang baik mengenai perubahan pola ruang budaya skala mikro di Desa Pegayaman.

Daftar Pustaka

- Antariksa. 2011. *Struktur Ruang Budaya dalam Permukiman*.
([https://www.academia.edu/7762481/Struktur Ruang Budaya Dalam Permukiman](https://www.academia.edu/7762481/Struktur_Ruang_Budaya_Dalam_Permukiman) diunduh tanggal 17 Agustus 2018)
- Nugraha, Dwi dkk. 2015. *Tugas Mata Kuliah Asas Keruangan Budaya I: Desa Pegayaman*. Denpasar: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hindu Indonesia.
- Sasongko, Ibnu. 2005. Pembentukan Struktur Ruang Permukiman Berbasis Budaya. Studi Kasus : Desa Payung – Lombok Tengah. *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 33, No. 1, Juli 2005: 1 - 8

Strategi Penanganan Permukiman Kumuh dan Lingkungan Perumahan di Kota Denpasar



Ida Bagus Wirahaji dan I Putu Laintarawan

1. Latar Belakang

Pembangunan kota di Indonesia umumnya berkembang secara *laissez-faire*, tanpa dilandasi perencanaan menyeluruh dan terpadu. Kota-kota di Indonesia tidak dipersiapkan dan tidak direncanakan untuk dapat menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu relatif pendek. Pemusatan dan pesatnya pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah perkotaan menyebabkan lingkungan perkotaan mengalami tekanan yang semakin besar untuk mendukung kebutuhan penduduk, dimana kebutuhan penduduk semestinya dapat diimbangi dengan pembangunan kota (Hadi, 2011).

Tingginya pertumbuhan penduduk di perkotaan, baik akibat angka kelahiran maupun urbanisasi dan migrasi yang semakin meningkat berimplikasi terhadap pemanfaatan sumber daya kota yang terbatas (*limited urban resources*). Ketidak seimbangan antara infrastruktur publik yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkan, menyebabkan terjadinya ketimpangan pelayanan kota (Hendratno, 2009). Termasuk ketimpangan pelayanan kota di sektor permukiman, yang mana ketimpangan ini juga disebabkan oleh pembangunan infrastruktur kota yang tidak terlepas dari masalah prioritas pembiayaan pembangunan (Lim, 1980).

Sementara, dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh ketidak seimbangan peluang untuk mencari nafkah di perdesaan dan di perkotaan. Hal ini memunculkan adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat perdesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan kemampuan para pendatang sangat marginal (Lantang dkk, 2013). Kepadatan penduduk yang tidak terkendali menyebabkan lahan permukiman semakin sempit dan kebutuhan penduduk terhadap permukiman semakin besar. Akibatnya, nilai lahan diperkotaan pun menjadi semakin mahal. Kelompok masyarakat miskin pun semakin terpinggirkan. Sebagai upaya untuk bertahan hidup, mereka mendirikan kawasan permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Mereka dalam keadaan terpaksa dan tidak punya pilihan mendirikan rumah di kawasan yang bukan peruntukannya. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Perumahan dan permukiman merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat adil dan makmur. Perumahan dan permukiman merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan (Hariyanto, 2010).

Sebagaimana halnya kota-kota di Indonesia, Kota Denpasar sebagai kota berkembang secara alami. Denpasar mengalami tekanan akibat jumlah penduduk yang meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Denpasar, bukan hanya disebabkan oleh kelahiran dan urbanisasi. Bali dengan daya tarik kepariwisataannya telah mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk dari luar masuk ke Bali, termasuk ke Kota Denpasar. Jumlah penduduk yang tinggi ini menuntut penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai. Menurut BPS Kota Denpasar 2018, jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 914.300 jiwa dengan luas wilayah 127,78 km², dengan kepadatan penduduk 7.155 jiwa/km². Dalam kondisi seperti ini, Kota Denpasar sudah tidak ideal lagi dalam penyediaan perumahan (Antara Bali, 2016). Masalah lebih penting yang dihadapi Kota Denpasar adalah adanya permukiman kumuh dan lingkungan perumahan yang tidak mendukung keberadaannya.

Saat ini masih ada 36 titik permukiman kumuh dengan total sekitar 3.500 KK yang perlu penanganan di empat kecamatan di Kota Denpasar. Sesuai data 2018, kawasan kumuh sudah mencapai 82,66 ha (Nusa Bali, 2019). Dari empat kecamatan itu, Dinas Permukiman Kota Denpasar menyebut beberapa contoh wilayah kumuh di Denpasar, yaitu kecamatan Denpasar Timur 9 kawasan,

Denpasar Barat 9 kawasan, Denpasar Selatan 8 kawasan, dan Denpasar Utara 10 kawasan. Kawasan kumuh tersebut antara lain kawasan yang ada di Jalan Resimuka yaitu Desa Tegal Kertha, Denpasar Barat, Dusun Semila Jati, Mertayasa, Margajati, dan Dusun Kertasari, kawasan Jalan Gunung Himalaya Desa Pemecutan Kaja, Denpasar Utara, dan lain-lain (Bali Express, 2019).

2. Permukiman Kumuh

Menurut UU No. 1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Menurut Prabawa dan Marwanto (2013), permukiman kumuh secara sosiologis adalah suatu permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian, baik secara teknis maupun non teknis. Suatu permukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejaan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal. Khomarudin (1997), mendefinisikan permukiman kumuh sebagai suatu lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha) dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, jumlah rumah sangat padat dan ukurannya dibawah standar, sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan. Salah satu penyebab terjadinya kekumuhan suatu kawasan permukiman karena kondisi sosial ekonomi yang rendah dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Menurut Srinivas (2003), timbulnya permukiman kumuh disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu faktor budaya, agama, tempat kerja, tempat lahir, lama tinggal, investasi rumah, dan jenis bangunan rumah. Faktor eksternal, yaitu kepemilikan tanah dan kebijakan pemerintah. Menurut Lantang dkk (2013), permukiman kumuh dapat terjadi karena penghasilan masyarakat yang tidak tetap dan usaha non formal milik masyarakat. Hal inilah menjadi salah satu sebab kekumuhan permukiman termasuk juga masalah status kependudukan dari masyarakat. Masyarakat pendatang biasanya tidak begitu peduli dengan masalah kebersihan lingkungan karena mereka tidak merasa ikut memiliki lingkungan tersebut. Lamanya tinggal di suatu permukiman juga mempengaruhi kepedulian pendatang terhadap lingkungan. Semakin lama mereka tinggal semakin peduli dengan kebersihan lingkungan.

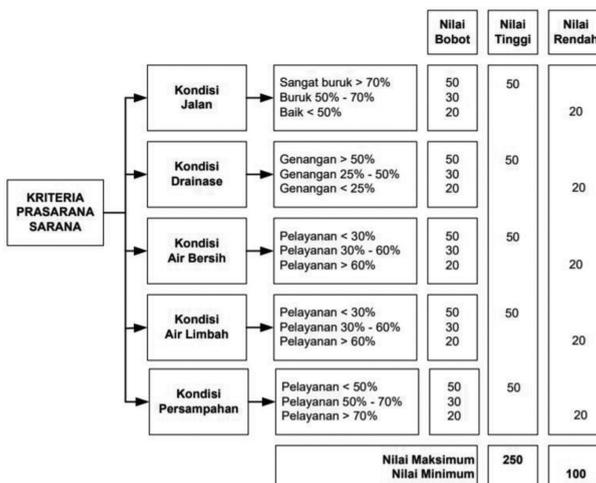
Tabel 1 menunjukkan identifikasi faktor-faktor kekumuhan berdasarkan indikator kumuh yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengembangan Permukiman, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Tabel 1. Identifikasi Faktor-faktor Kekumuhan Berdasarkan Indikator Kumuh

Aspek	Kriteria
Kondisi Bangunan Hunian	Keteraturan bangunan hunian
	Kepadatan bangunan hunian
	Kelayakan bangunan hunian
Kondisi aksesibilitas (Jalan Lingkungan)	Jangkauan jaringan jalan
	Kualitas jaringan jalan
Kondisi drainase	Kejadian genangan
Kondisi pelayanan air minum/Baku	Kualitas sumber air minum
	Kecukupan pelayanan air minum
Kondisi pengelolaan air limbah	Prasarana sanitasi lingkungan
Kondisi pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan lingkungan

Sumber: Dirjen Pengembangan Permukiman (2014)

Di samping itu Dirjen Ciptakarya Kementerian PU juga mengeluarkan Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan. Untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompokkan ke dalam kriteria: vitalitas non ekonomi; vitalitas ekonomi kawasan; status kepemilikan tanah; keadaan prasarana dan sarana; komitmen pemerintah kabupaten/kota; dan prioritas penanganan. Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria di atas. Gambar 1 memperlihatkan pembobotan kriteria prasarana dan sarana. Gambar 2 memperlihatkan prioritas penanganan.



Gambar 1 Pembobotan kriteria Prasarana dan Sarana
 Sumber: Dirjen Ciptakarya Kementerian PU (2014)

		Bobot	Klasifikasi (Menit)	Nilai Klasifikasi	Nilai Bobot	Nilai Tinggi	Nilai Rendah
KRITERIA PRIORITAS PENANGANAN	Dekat ke Kawasan Pusat Kota Metropolitan	3	Waktu tempuh < 30' Waktu tempuh 30' - 60' Waktu tempuh > 60'	50 30 20	150 90 60	150	60
	Dekat ke Kawasan Pusat Pertumbuhan Kota Metropolitan	3	Waktu tempuh < 30' Waktu tempuh 30' - 60' Waktu tempuh > 60'	50 30 20	150 90 60	150	60
	Dekat ke Kawasan Lain (Perbatasan) Kota Metropolitan	2	Waktu tempuh < 30' Waktu tempuh 30' - 60' Waktu tempuh > 60'	50 30 20	100 60 40	100	40
	Dekat ke Ibukota Kota/Kabupaten Bersangkutan	2	Waktu tempuh < 30' Waktu tempuh 30' - 60' Waktu tempuh > 60'	50 30 20	100 60 40	100	40
Nilai Maksimum Nilai Minimum						500	200

Gambar 2 Pembobotan Prioritas Penanganan
 Sumber: Dirjen Ciptakarya Kementerian PU (2014)

3. Permukiman dan Regulasinya

Permukiman merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu: alam, masyarakat, manusia, lindungan dan jaringan. Bagian permukiman yang disebut wadah tersebut merupakan paduan 3 (tiga) unsur alam (tanah, air, dan udara), lindungan (*shell*) dan jaringan (*networks*). Sedangkan, isinya adalah manusia dan masyarakat (Doxiadis *dalam* Nasution, 2012)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, menyebutkan perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam Pasal 1 angka (5) disebutkan, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang bagian kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah NO. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana dan Sehat, antara lain menyebutkan penilaian kualitas lingkungan buatan memiliki dua elemen, yaitu penilaian terhadap *shell* (fisik hunian) dan *network* (sarana dan prasarana lingkungan). Penilaian terhadap hunian permukiman dapat didekati dengan indikator pencahayaan, penghawaan, dan suhu udara. Pencahayaan dimaksud adalah seberapa jauh sinar matahari dapat menerangi seluruh ruangan. Penghawaan dimaksud adalah seberapa jauh aliran pergantian udara secara terus menerus melalui ventilasi. Suhu udara dan kelembaban dimaksud adalah seberapa jauh penghuni merasa nyaman selama beraktivitas tidak merasa pengap. Sementara pada elemen *network* dalam permukiman, kualitas *network* dapat dilihat pada beberapa tipe sarana dan prasarana lingkungan.

Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 tahun 2000, tanggal 21 Pebruari 2000, disebutkan bahwa penataan perumahan dan pemukiman bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia; (2) dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; (3) mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; (4) memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan (5) menunjang pembanguna di bidang ekonomi sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar NO. 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, Pasal 44 ayat (4) disebutkan: (1) revitalisasi (peremajaan) kawasan perumahan kumuh (*slums*) dan kawasan-kawasan dengan lingkungan yang tidak teratur di seluruh wilayah kota; (2) penertiban lingkungan perumahan liar (*squatter*) di seluruh wilayah kota; (3) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan jalan kendaraan roda empat; (4) integrasi kawasan perumahan milik pemerintah dengan lingkungan sekitarnya di seluruh wilayah kota; dan (5) perlindungan kawasan perumahan dan permukiman mencakup pengaturan lingkungan perumahan atau bangunan khusus yang mempunyai nilai historis dan nilai budaya pada kawasan *heritage* dan pusat-pusat permukiman tradisional.

4. Pendekatan Ekologi dan Teknis

Dalam menangani permukiman kumuh dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan secara ekologi dan pendekatan secara teknis. Pendekatan

ekologi menekankan pada hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitannya dengan lingkungan abiotik, biotik, maupun sosial, ekonomi dan kulturalnya.

Dalam hal ini, rumah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Keseluruhan bagian rumah, mulai dari proses pembuatan, penggunaan, sampai pembongkarannya akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistemnya. Perumahan dan permukiman yang ramah lingkungan atau berwawasan lingkungan adalah suatu lingkungan dan permukiman yang dibangun dengan mempertimbangkan dan memadukan ekosistem. Artinya, bagaimana bangunan tersebut dirancang untuk sedikit mungkin menimbulkan polusi dan hemat dalam penggunaan energi serta penggunaan air.

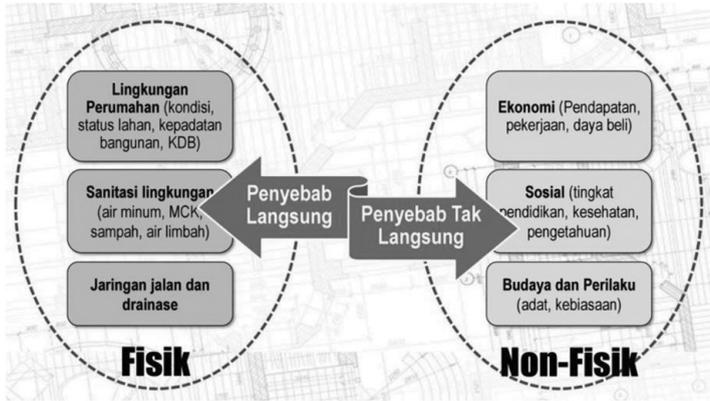
Rumah tidak dipandang sendiri-sendiri, karena rumah terkait dan harus peduli dengan lingkungan sosialnya. Maka perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial lingkungannya. Perencanaan perumahan harus dipandang sebagai unit yang menjadi satu kesatuan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga harus terdapat ruang-ruang sosial (ruang bersama) untuk masyarakat berinteraksi satu sama lain. Unit-unit rumah adalah pengorganisasian kebutuhan akan privasi dan kebutuhan untuk berinteraksi sosial (Syarief, 2000).

Pendekatan teknis menekankan pada kepuasan penghuni rumah. Perumahan yang berorientasi terhadap kepuasan penghuni harus memenuhi syarat-syarat: (1) struktur dan konstruksi rumah cukup kuat dan aman; (2) material bangunan yang menjamin terciptanya kenyamanan dan kesehatan di dalam rumah; (3) prasarana/infrastruktur yang memenuhi standar kenyamanan, kesehatan dan keamanan lingkungan (Budiaharjo, 1998).

Beberapa kriteria permukiman atau kawasan perumahan yang layak adalah sebagai berikut: (1) adanya jaminan perlindungan hukum; (2) ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infrastruktur; (3) keterjangkauan pada tingkat tertentu dimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar lainnya tidak terganggu; (4) layak huni, dapat menyediakan ruang yang cukup dan dapat melindungi bagi penghuninya; (5) aksesibilitas, tempat tinggal harus dapat diakses oleh semua orang yang berhak atasnya; (6) lokasi, tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka akses fasilitas-fasilitas umum; (7) kelayakan budaya, cara rumah didirikan, bahan baku yang digunakan, dan kebijakan-kebijakan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat tinggal (Syarief, 2000).

5. Penanganan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh disebabkan oleh adanya penyebab langsung dan penyebab tak langsung. Gambar 3 memperlihatkan faktor-faktor penyebab langsung dan tidak langsung.



Gambar 3 Penyebab Langsung dan Tak Langsung Permukiman Kumuh
Sumber: Soeranto, 2016

Gambar 4 memperlihatkan faktor penyebab perumahan dan permukiman kumuh beserta dampak yang ditimbulkannya.



Gambar 4 Penyebab dan Dampak Perumahan dan Permukiman Kumuh
Sumber: Idrus, 2012

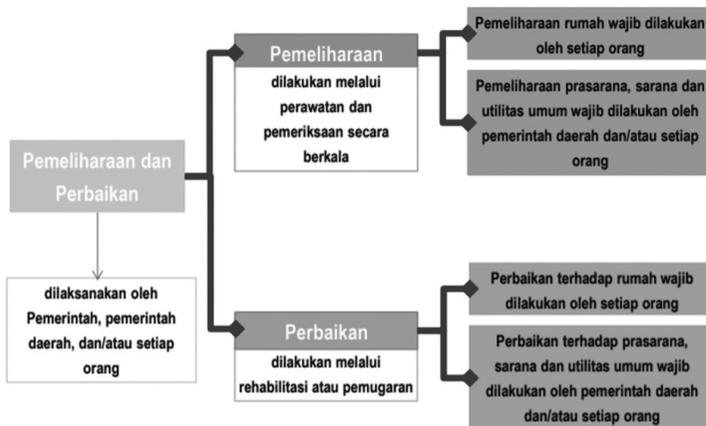
Dinas Perkim Kota Denpasar terus menerus mengupayakan pengurangan permukiman kumuh. Tata cara penanganan permukiman kumuh dilakukan mengikuti dengan Gambar 5.



Gambar 5 Pola-pola penanganan Permukiman Kumuh.

Sumber: Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016.

Sementara pemeliharaan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh dan perbaikan untuk menangani permukiman kumuh dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang, seperti diperlihatkan pada Gambar 6.



Gambar 6 Pemeliharaan dan Perbaikan Permukiman Kumuh

Sumber: Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016

Bali dengan industri pariwisata yang menjanjikan mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk dari luar Bali, termasuk migrasi ke wilayah Kota Denpasar. Penduduk pendatang tersebut kebanyakan berasal dari Jawa Timur. Pada masa lalu, kehadiran penduduk pendatang belum menjadi masalah. Namun, belakangan ini serbuan penduduk pendatang dengan beragam latar belakang, etnis, profesi, dan tujuan telah menjadi permasalahan tersendiri yang kompleks bagi Bali, khususnya Kota Denpasar. Berbagai kependudukan dengan dampak ikutannya seperti kepadatan penduduk yang terus meningkat, pengangguran, kriminalitas, prostitusi, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya telah mengganggu kenyamanan dan ketertiban Kota Denpasar. Mayoritas penduduk pendatang tinggal di titik-titik permukiman kumuh. Pemerintah Kota dapat menerapkan kebijakan menerima penduduk pendatang, misalnya menetapkan persyaratan yang tegas, bagi penduduk pendatang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap di Kota Denpasar tidak diperbolehkan menjadi penduduk Kota Denpasar. Bila penduduk pendatang yang jumlahnya lebih dari 20%, maka Pemerintah Kota Denpasar berhak melakukan seleksi. Misalnya, yang diterima profesional, ASN, manager dan sebagainya (Tribun Bali, 2019).

Pendapatan per kapita yang rendah menyebabkan penduduk memilih rumah seadanya dan enggan memperbaiki rumah tempat tinggalnya. Pada dasarnya pendapatan per kapita yang rendah ini dapat ditanggulangi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin. Pemerintah dapat mendorong peningkatan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada; meningkatkan kemampuan bidang teknologi, sehingga mampu secara mandiri mengolah sumber daya alam yang terkandung dalam bumi nusantara; memperbanyak hasil produksi seperti: produksi pertanian, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan sektor jasa (pelayanan).

Terbatasnya lapangan kerja membuat pendapatan per kapita rendah. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja melalui program strategis, diantaranya: (1) mendorong pembangunan infrastruktur melalui penyediaan anggaran APBN; (2) menumbuhkan investasi dengan memperbaiki iklim investasi lewat penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana investasi; (3) mendorong pendidikan vokasional mengingat investor membutuhkan tenaga terampil yang siap kerja; (4) mengalokasikan dana desa yang akan dipakai untuk program pemberdayaan masyarakat dan untuk pembangunan sarana/prasarana di pedesaan.

Model penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan

mempertimbangkan kondisi: status tanah, kepadatan bangunan, tingkat kekumuhan, dan kesesuaian dengan RTRW. Model penanganannya adalah: (1) peremajaan kota; dan (2) program peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Program peremajaan kota merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan penataan yang mendasar dan menyeluruh terhadap kawasan hunian yang tidak layak huni, baik pada kawasan kumuh di atas tanah legal maupun kawasan kumuh di atas tanah tidak legal. Pada kawasan kumuh di atas tanah legal dapat diterapkan model penanganan, antara lain: (1) Model *Land Sharing*, yaitu penataan ulang lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat yang cukup tinggi, dimana masyarakat mendapatkan kembali lahannya dengan luasan yang sama, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum (jalan, saluran, dan lain sebagainya); (2) Model *Land Consolidation*, yaitu model yang menerapkan penataan ulang yang selama ini telah dihuni.

Pada kawasan kumuh di atas tanah tidak legal dapat diterapkan model, antara lain: (1) *resettlement*/pemindahan penduduk pada suatu kawasan yang khusus disediakan. Pemindahan ini apabila permukiman berada di kawasan fungsional yang direvitalisasi; (2) konsolidasi lahan, apabila kawasan tersebut akan dilakukan refungsional kawasan dengan catatan sebagian lahan disediakan bagi lahan hunian, untuk menampung penduduk yang kehidupannya tergantung di kawasan tersebut.

Program peningkatan kualitas lingkungan permukiman sesungguhnya dilakukan tidak saja di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang menjadi bagian kota, tetapi juga perlu di kawasan-kawasan permukiman kumuh yang ada di sekitar kota karena kawasan tersebut memiliki kaitan langsung dengan bagian-bagian kota. Langkah-langkah strategis dilakukan untuk penataan lingkungan permukiman kumuh Kota Denpasar, antara lain: (1) mengaktifkan penertiban administrasi kependudukan, bekerja sama dengan perangkat desa seperti *kelian banjar*, kepala lingkungan, *bendesa adat*, dan sebagainya. Dalam hal ini *awig-awig* yang dihasilkan melalui *perarem* di desa setempat menjadi ujung tombak dalam penertiban penduduk pendatang; (2) penataan kembali lingkungan dengan penyediaan kamar mandi dan jamban umum, program sanitasi dan pengelolaan sampah swadaya masyarakat; (3) peningkatan perilaku hidup sehat; (4) sosialisasi kebijakan pemerintah kota terkait program penataan kembali permukiman kumuh dengan melibatkan kelompok masyarakat di permukiman kumuh; dan (5) diperlukan studi lanjutan untuk menggali informasi/pengetahuan yang lebih luas terkait dengan penataan kembali lingkungan permukiman kumuh.

Seperti disebutkan pada poin (4), penduduk yang tinggal di permukiman

kumuh harus ikut dilibatkan dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Denpasar. Melalui kontribusi masukan dari penduduk maka dapat ditentukan instrumen secara tepat dan kebijakan yang paling akurat yang dibutuhkan dalam mengatasi permukiman kumuh. Dalam hal ini tetap harus ada intervensi dari pemerintah. Program yang diberlakukan kepada masyarakat harus dievaluasi, sudah tepat sasaran atau harus ada perbaikan. Permukiman kumuh tidak dapat diatasi dengan pembangunan fisik semata-mata tetapi yang lebih penting mengubah pola pikir, perilaku dan budaya dari masyarakat di kawasan kumuh. Jadi masyarakat juga harus menjaga lingkungannya sendiri agar tetap bersih, rapi, teratur dan indah, sehingga akan tercipta lingkungan yang nyaman, tertib, dan asri.

6. Penutup

Permukiman kumuh meskipun tidak dikehendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya ada dan tidak dapat dihindari dalam perkembangan Kota Denpasar. Hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah titik-titik permukiman kumuh antara lain:

1. Tumbuhnya permukiman kumuh adalah akibat dari ledakan penduduk. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara penambahan penduduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan permukiman-permukiman baru, sehingga penduduk akan mencari alternatif tinggal di permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota.
2. Mengendalikan ledakan penduduk yang bermukim di wilayah Kota Denpasar, terutama yang disebabkan oleh migrasi penduduk yang tidak terkendali dari luar Bali ke Denpasar. Penduduk pendatang yang sudah melebihi dari 20% penduduk Kota agar dilakukan seleksi.
3. Pemerintah selain memberikan rumah susun juga harus memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum punya pekerjaan dan masyarakat harus selalu menjaga lingkungannya agar tetap indah, bersih, dan teratur.
4. Penduduk yang tinggal di permukiman kumuh harus ikut dilibatkan dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Denpasar. Keluhan dan pendapat mereka perlu didengar, karena merekalah yang merasakan, mengalami dan mengetahui secara benar apa yang terjadi di kawasan permukiman itu.

Daftar Pustaka

- Antara Bali. 2016. *Kota Denpasar Hadapi Masalah Perumahan Penduduk*. <https://bali.antaranews.com/berita/90563/kota-denpasar-hadapi-masalah-perumahan-penduduk>. [2 Juni 2019].
- Bali Express. 2019. *Denpasar Tata Kawasan Kumuh di Jalan Resimuka*. <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/08/28/93845/denpasar-tata-kawasan-kumuh-di-jalan-gunung-resimuka>. [4 Juni 2019].
- Budiharjo, E. 1998. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Denpasar. 2007. *Perencanaan Program Penanganan Lingkungan Kumuh*. Denpasar.
- Direktorat Pengembangan Permukiman. 2014. *Draft Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh*. Jakarta: Dirjen Cipta Karya Kemeterian PU.
- Hadi, Djajusman. 2011. Integritas Pertimbangan Lingkungan dalam Membangun Kembali Malang Raya Menuju Kota Pariwisata. *Jurnal FIS* edisi Agustus 2011. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hariyanto, A. 2010. Strategi Penanganan Kawasan Kumuh sebagai Upaya Menciptkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat (Studi Kasus: Kota Pangkalpinang). *Jurnal PWK Unisba*, Vol. 7, No. 2, Hal. 11-37.
- Hendratno, E.T. 2009. Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial, dan Budaya. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No, 3 Oktober 2009). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Idrus, A. 2012. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian Hingga 2011. *Makalah Pengembangan Permukiman*, Selasa, 18 September 2012. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 tentang *Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat*.
- Khomarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: PT Rakasindo.
- Lantang, M., Mononimbar, W., Sangkertadi, dan Suryono. 2013. Analisis Faktor Kekumuhan Pemukiman di Kelurahan Calaca Kota Manado. *Jurnal Sabua*, Vo. 5, No. 1, Mei 2013, Hal. 28-34.
- Lim, W.S.W. 1980. *An Alternative Urban Strategy*, Select Books PTE, LTD., Singapore.

- Nasution, A.Z. 2012. *Teori Permukiman*. <https://bangazul.com/teori-permukiman/>. [4 Juni 2019].
- Nusa Bali. 2019. *Permukiman Kumuh di Denpasar Menurun*. <https://www.nusabali.com/berita/49870/pemukiman-kumuh-di-denpasar-menurun>. [4 Juni 2019]
- Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang *Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- Prabawa, AANP dan Marwanto. 2013. *Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam Mengatasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kota Denpasar*. Denpasar: FH Unud.
- Soeranto, D.A. 2016. *Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan*. Makalah Penyusunan RP2KPKP. Yogyakarta: Kementerian PUPR.
- Srinivas, H. 2003. *Defining Squatter Settlement*. <http://www.gdrc.org/uem/define-squatter>. [4 Juni 2019]
- Syarief, Z. 2000. *Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah*. Medan: USU Press.
- Tribun Bali. 2019. *Demografi Paralel dengan Adat dan Budaya, FKUB Usulkan Pemandang Lebih dari 20 Persen agar Diseleksi*. [5 Juni 2019].

Eksistensi Penerapan “Telajakan” di Desa Pakraman Cengkilung, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara



Ida Ayu Putu Sri Mahapatni

1. Pendahuluan

Kota Denpasar adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat pariwisata. Dampak dari semua itu, arus urbanisasi semakin meningkat, jumlah penduduk semakin padat. Kota Denpasar menjadi sangat padat, kemacetan dimana-mana, dan lingkungan perkotaan semakin semrawut. Selain itu, polusi udara di Bali, khususnya di Denpasar masuk dalam tahap mengkhawatirkan (Balipost.com, 2019), dan bahkan *Greenpeace* Indonesia melansir bahwa Denpasar termasuk 10 kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Denpasar Barat, Denpasar Timur, Denpasar Selatan, dan Denpasar Utara. Masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa desa dinas dan *desa pakraman*. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*, mendefinisikan bahwa *desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum *adat* di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Aktivitas budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali terpusat pada *desa adat* (*desa pakraman*) dengan konsep *Tri Hita Karana* yaitu tiga hubungan

harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*) (Windia, 2010). Penerapan *telajakan* merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. *Krama* (masyarakat) Bali yang memegang filosofi *Tri Hita Karana* pada hakikatnya selalu menjaga keseimbangan alam/*palemahan*. Segenap *krama* Bali menjadi bijak dalam menata ruang fisik lingkungan hunian kehidupannya. *Telajakan* menjadi contoh bagaimana *krama* Bali menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai kawasan ekologis pada area semi publik. Oleh karena itu, *telajakan* merupakan salah satu upaya untuk mengatasi polusi udara di Kota Denpasar (Balipost.com, 2019). Hanya saja, seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan ekonomi semakin meningkat, maka keberadaan *telajakan* semakin mengikis. Kebanyakan *telajakan* sudah beralih fungsi menjadi warung, bengkel, *counter* HP, tempat *laundry* dan sebagainya di sepanjang jalan di Kota Denpasar.

Namun, salah satu *desa pakraman* di Peguyangan Kangin Denpasar Utara yaitu Desa Pakraman Cengkilung, permukimannya yang secara visual masih tertata indah dan asri tersaji di sepanjang jalan permukiman penduduk. Desa Pakraman Cengkilung hanya didukung Banjar Cengkilung satu-satunya. Desa Pakraman Cengkilung ini tetap kukuh mempertahankan *adat* serta tradisi yang diperkuat oleh tersuratnya peraturan-peraturan secara adat (*awig-awig* dalam bentuk tulisan latin/dwi aksara). Tumbuhnya beberapa *sekaa* seperti *Sekaa Gong*, *Sekaa Angklung*, *Sekaa Kidung* dan *Sekaa Teruna Teruni*, merupakan indikator berkembangnya aktivitas sosial kemasyarakatan secara baik. Keunikan yang lain, di era pemanasan global, *desa pakraman* ini menerapkan *telajakan* di sepanjang jalan permukiman penduduk. Penerapan *telajakan* yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Pakraman Cengkilung menjadikan permukiman tersebut bersih, indah dan rapi. Berkat kebersihan lingkungan, Desa Pakraman Cengkilung sering mendapatkan juara kebersihan lingkungan di tingkat kota. Hal ini merupakan gambaran sederhana keterlibatan masyarakat *desa pakraman* dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Konsepsi yang bisa diterapkan dalam penataan taman *telajakan* tidak terlepas dari konsepsi nilai-nilai budaya Bali yaitu mendukung fungsi tempat taman *telajakan* itu berada, memanfaatkan unsur-unsur alam dalam perwujudannya, mengungkapkan keselarasan terhadap alam dan lingkungannya didasarkan atas tata nilai *utama*, *madya*, *nista*, serta memiliki keselarasan terhadap status sosial dan kemampuan ekonomi penghuni. (Kaler dalam Sarwadana, 2016). Berdasarkan konsepsi nilai budaya Bali yang bisa diterapkan

dalam penerapan *telajakan*, maka Desa Pakraman Cengkilung merupakan salah satu *desa pakraman* yang masih mempunyai *telajakan* dengan beraneka ragam tanaman. Dalam artikel ini, penulis akan menelusuri eksistensi penerapan *telajakan* di sepanjang jalan permukiman Desa Pakraman Cengkilung Peguyangan Kangin Denpasar Utara.

2. Pembahasan

2.1. Kondisi Umum Desa Pakraman Cengkilung

Sebelum ada permukiman, Desa Pakraman Cengkilung merupakan hutan balantara. Sampai saat ini di areal *banjar* masih ditemui pohon-pohon besar. Selain terdapat pohon-pohon besar, *banjar* yang secara kedinasan masuk wilayah Desa Peguyangan Kangin, juga diapit oleh *tukad* (sungai). Desa Pakraman Cengkilung terletak di Desa Peguyangan Kangin Denpasar Utara.

Desa Peguyangan Kangin dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama A.A. Made Sukarata. Dalam menyampaikan program Pemerintah Kota Denpasar, kepala desa dibantu oleh kepala dusun yang bertanggung jawab untuk masing-masing *desa pakraman*. Sekretariat Desa Pakraman Cengkilung beralamat di Jalan Cekomaria, Kecamatan Denpasar Utara. Kepala dusun untuk Desa Pakraman Cengkilung adalah penduduk asli dari Desa Cengkilung. Kepala dusun inilah yang bertugas untuk menyampaikan program pemerintah kota ke *banjar adat*. Desa Pakraman Cengkilung terdiri dari Banjar Adat Cengkilung satu-satunya yang dipimpin oleh dua *kelian banjar* sekaligus merangkap sebagai sekretaris dan bendahara. *Kelian adat* dibantu oleh dua *kesinoman/juru arah* yang menyampaikan informasi ke masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti kerja bakti, gotong royong dalam melakukan proses upacara *yadnya* dan sebagainya. Aktivitas sosial ekonomi Desa Pakraman Cengkilung ditunjang oleh keberadaan LPD Denpasar Pakraman Cengkilung dengan mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani.

Konsep kehidupan masyarakat Desa Pakraman Cengkilung seperti umumnya masyarakat di Bali dikenal dengan konsep *Tri Hita Karana*. Sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*:

1. *Parahyangan*: Desa Pakraman Cengkilung memiliki *Pura Kahyangan Tiga* yaitu *Pura Dalem Pura Desa*, *Pura Puseh*. Selain *Pura Kahyangan Tiga*, juga terdapat *Pura Klan/Warga/Soroh*, diantaranya *Pura Bantas*, *Pura Bukit Sari* serta *Pura Subak*. Dan pura lainnya seperti *Pura Lambig*, *Pura Taman*, *Pura Beji*, *Pura Demung*.
2. *Pawongan*: fasilitas yang disediakan untuk berinteraksi sosial adalah balai

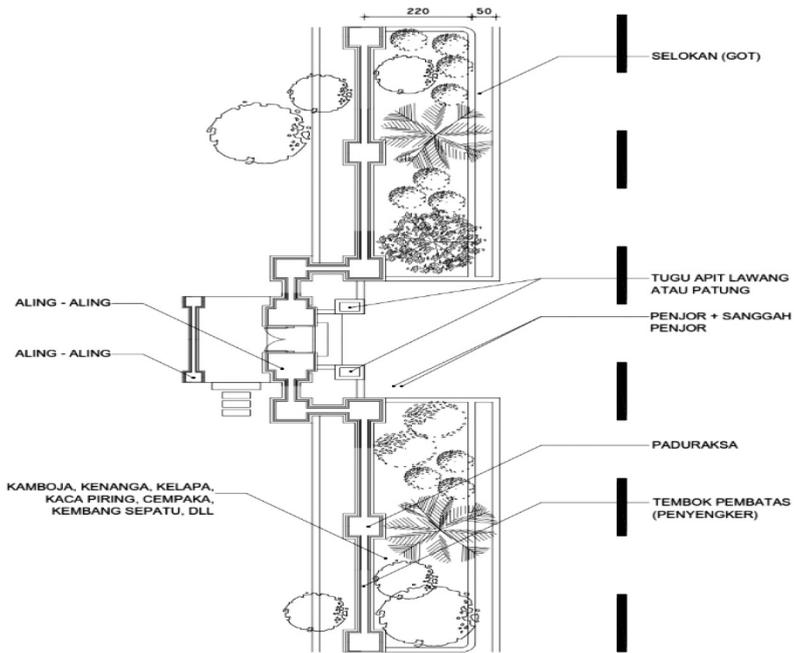
banjar. *Krama* desa melakukan rapat rutin setiap satu bulan sekali. Aktivitas kearifan lokal seperti *menyama braya*, gotong royong pada waktu ada upacara *yadnya*. Desa Pakraman mempunyai banyak *sekaa-sekaa* seperti *sekaa gong*, *sekaa angklung*, *sekaa kidung*, *sekaa teruna-teruni* bahkan ada *sekaa tani* atau kelompok tani. Pelestarian *sekaa-sekaa* dan *menyama braya* merupakan indikator terjalannya harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia.

3. *Palemahan*: terdapatnya taman *telajakan* di sepanjang jalan dan taman-taman yang dimiliki oleh masyarakat di masing-masing rumah. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sehingga lingkungan menjadi indah, bersih dan asri merupakan wujud nyata dari masyarakat menerapkan hubungan yang harmonis dengan lingkungannya.

2.2 *Telajakan sebagai Kearifan Lokal*

Telajakan adalah sepeanggal atau sebagian jalan raya atau jalan kampung yang ada di depan atau di samping pekarangan rumah, termasuk jalannya sendiri, got beserta senderan dan lain-lainnya (Kaler,1982). Ada beberapa jenis *telajakan* yaitu *telajakan* pura, *telajakan merajan*, *telajakan* kantor, *telajakan* sekolah, *telajakan* jalan (media jalan), *telajakan telabah* (saluran air), *telajakan* desa, *telajakan subak*, *telajakan puri* dan sebagainya. Sedangkan dalam artikel ini yang dibahas adalah *telajakan* yang terdapat pada sisi kiri kanan jalan. Secara umum *telajakan* memberikan unsur keindahan dan keasrian, karena *telajakan* terdiri dari tanaman-tanaman yang indah dan asri. Keberadaan *telajakan* telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 tahun 1999 tentang RTRW Kota Denpasar, diatur untuk lebar area dari 0,5 meter hingga 2,0 meter. Sedangkan menurut Arsitektur Tradisional Bali lebar area dari 1 meter hingga 2,2 meter (Gambar 1). Menurut Pandy (2009), manfaat penataan taman *telajakan* adalah sebagai berikut:

1. Memperlancar dan mengamankan arus sirkulasi
2. Menciptakan ketenangan, kenikmatan atau kenyamanan dan kesehatan penghuninya
3. Meningkatkan keindahan lingkungan
4. Menyediakan kebutuhan hidup
5. Memperlebar jarak pandang, mengurangi kebisingan, polusi, mengurangi panas dan meyegarkan udara.



Gambar 1. Tata Letak *Telajakan* menurut Arsitektur Tradisional Bali.

Sumber: Dwijendra dalam Dewi, 2018.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007). Konsep kearifan lokal dalam pembangunan di Bali (Dwijendra, 2018) diantaranya:

1. Konsep kosmologi: *Tri Hita Karana*, *Hulu Teben* dan *Tri Mandala*.

Tri Hita Karana adalah tiga hubungan antara manusia dengan Tuhan/*Parahyangan*, antara manusia dengan manusia/*Pawongan*, antara manusia dengan lingkungan/*Palemahan*. *Hulu Teben*: *Hulu* artinya arah yang utama, sedangkan *Teben* artinya hilir atau arah berlawanan dengan *hulu*. *Tri Mandala*: *Utama Mandala*, bagian yang paling sakral terletak paling *hulu* menggunakan ukuran *Asta Bumi*; *Madya Mandala*, bagian tengah menggunakan ukuran *Asta Bumi* yang sama dengan *Utama Mandala*; *Nista Mandala*, bagian *teben* boleh menggunakan ukuran yang tidak sama dengan

Nista Mandala hanya saja lebar halaman tetap harus sama.

2. Konsep Kebijakan: *Catur Dresta*, *Awig-awig* dan *Pararem*
Catur Dresta terdiri dari: *Purwa Dresta*, sering juga disebut *Kuna Dresta* adalah suatu pandangan lama yang sejak dahulu dan terus dijadikan sebagai pedoman dari generasi pelaksanaan nyepi dengan catur bratanya; *Loka Dresta*, suatu pandangan lokal yang hanya berlaku pada suatu daerah. Contohnya, tradisi tidak membakar mayat di daerah/wilayah Trunyan; *Desa Dresta*, tidak jauh berbeda dengan *loka dresta*, dimana suatu pandangan yang mentradisi dan hanya berlaku di suatu desa tertentu saja. Misalnya, tradisi *Ngusaba* umumnya dilakukan di desa-desa Bali Timur, sedangkan di Bali Barat tidak begitu lumrah; *Sastra Dresta*, merupakan suatu pandangan yang dasar pijakannya adalah sastra atau pustaka-pustaka agama yang mengacu pada kitab suci Weda. *Awig-awig* merupakan hukum *adat* yang disusun dan harus ditaati oleh *krama* (masyarakat adat/pakraman) di Bali untuk mencapai *Tri Sukerta*. *Tri Sukerta* antara lain *sukerta* tata *parahyangan*, *sukerta* tata *pawongan* dan *sukerta* tata *palemahan*. *Pararem* merupakan sebuah cerminan dimana hukum adat itu bersifat dinamis. *Pararem* merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah *paruman/rapat adat*. Hasil keputusan inilah kemudian yang dikenal dengan *pararem*.
3. Konsep Geografis: *Desa Kala Patra* dan *Desa Pakraman*
Desa Kala Patra dapat diartikan sebagai keluwesan atau penyesuaian diri sesuai dengan tempat dan waktu saat kita berada. Dalam artian umat Hindu hendaknya bertanya dan berkata pada diri sendiri “dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi yang bagaimanapun”, hendaknya seseorang berpikir, berkata dan berbuat/bertindak sesuai lingkungan tempat berada yang bersifat umum dan universal.
4. Konsep *Asta Kosala Kosali*: orientasi, tata letak, ornamen, bahan, struktur konstruksi, bentuk warna dan lain-lain.
5. Konsep membangun: *menyama braya*, *salunglung sebayan taka*, *saling asah-asih lan asuh*, *tatwam asi*, gotong royong dan lain-lain.

Konsep tradisional Bali yang berdasarkan kebenaran, disebabkan bahwa manusia harus selaras dengan alam, dimana terdapat lima unsur yang disebut ‘*Panca Mahabhuta*’ yang ada dalam taman yang berkonsep tradisional Bali yaitu:

1. *Pertiwi* (zat padat): batu-batuan, tanaman atau benda padat lainnya.
2. *Apah* (zat cair): kolam dengan air mancurnya.
3. *Teja* (sinar): suasana yang ditimbulkan oleh permainan warna gelap, terang

dan bayang-bayang.

4. *Bayu* (udara): tiupan angin yang sepoi-sepoi basah dan kesejukan.
5. *Akasa* (*ether*): latar belakang angkasa luar dengan cakrawala sebagai batas pandangan.

Dengan melihat pada konsepsi yang berakar pada agama Hindu, maka karakter pertamanan di Bali adalah sebagai berikut: (Pandy, 2009)

1. Pertamanan di Bali hendaknya dapat membahasakan Agama Hindu yang berisikan nilai kebenaran Tuhan, sehingga hakikat alam dalam ciptaan Tuhan akan dapat terpancar dalam satu susunan pertamanan.
2. Memberi inspirasi hakekat hidup dan kehidupan.
3. Penataan diatur dengan etika dan tata susila yang mempunyai karakter melindungi, mengayomi, mendampingi manusia secara harmonis dalam kegairahan hidup.
4. Karakter taman yang dapat menyelaraskan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan hubungan dengan Tuhan.

Menjaga keberadaan *telajakan* baik dari segi tatanan maupun fungsinya, dapat dikatakan sebagai sebuah kearifan lokal yang bertujuan menjaga eksistensi budaya di suatu daerah (Paturusi dalam Dewi, 2018). Dalam arsitektur tradisional, *telajakan* merupakan bagian dari *palemahan* (hubungan harmonis manusia dengan lingkungannya) dan dalam unit hunian berada di area *nista* (*profane*). *Telajakan* sebagai warisan leluhur Bali merupakan taman depan rumah-rumah Bali yang sarat dengan makna estetika, keamanan, makna sosial dan spiritual (Dwijendra, 2013). Dengan menerapkan *telajakan*, secara implisit juga menerapkan konsep kearifan lokal di Bali diantaranya *Tri Hita Karana* yaitu *palemahan* dan dalam unit hunian yaitu *nista*. *Telajakan* di Desa Pakraman Cengkilung yang merupakan warisan leluhur dari turun temurun sudah diterapkan, sehingga *telajakan* merupakan kearifan lokal yang harus tetap dilestarikan untuk mencegah hilangnya lahan hijau.

2.3. Kondisi Telajakan di Desa Pakraman Cengkilung

Telajakan di sepanjang jalan permukiman Desa Pakraman Cengkilung terlihat begitu asri dan indah (Foto 1 dan Foto 2). *Telajakan* yang ada di Desa Pakraman Cengkilung yang terletak di wilayah timur sampai barat ujung pertigaan jalan adalah jenis tanaman, bagian-bagian *telajakan* dan kondisi tamannya yang berbeda dengan *telajakan* yang terletak di wilayah selatan sampai ke utara batas wilayah desa.

Kondisi *telajakan* yang terletak dari arah timur ke barat terdapat beraneka tanaman yang bisa kita lihat di sepanjang jalan ada tanaman hias, tanaman komoditi dan juga tanaman untuk *upakara*. Manfaat tanaman sebagai bahan untuk *upakara*, keindahan, komoditi, pelindung, obat dan mencegah polusi. Jenis tanaman yang ditanam ada yang sejenis pohon, semak dan herba. Sejenis pohon terdapat pohon jepun Bali, pohon pudak, pohon cempaka, pohon palem, pohon pucuk, pohon soka. Sejenis semak adalah puring, liligundi, lidah mertua, jempiring, kembang sepatu, widuri. Sejenis herba adalah bakung, pisang hias, kladi-kladian, ketela hias. Khusus untuk pohon pudak dan pohon jepun Bali, masyarakat desa menanam untuk dijual ke *villa-villa*, hotel-hotel dan restoran-restoran. Kepala dusun menyatakan bahwa semenjak mendapatkan juara kebersihan lingkungan berturut-turut di tingkat kota, dari Dinas Pertanian Kota Denpasar menyumbangkan beberapa bibit pohon dan masyarakat menyambut dengan antusias sehingga tanaman-tanaman menjadi tumbuh dengan subur dan tanaman yang ada dipromosikan ke hotel-hotel, *villa-villa* dan restoran-restoran.

Sedangkan selokan yang digunakan pada taman *telajakan* adalah selokan alami. Seperti kita ketahui jenis selokan yaitu selokan alami dan selokan buatan. Selokan yang ada di desa adalah kebanyakan menggunakan selokan alami walaupun terlihat juga beberapa warga yang menggunakan selokan buatan. Selokan yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat pemasangan batu kali, beton dan lain-lain. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen. Selokan alami dibiarkan ditumbuhi oleh rumput-rumput (Foto 3).



Foto 1. Telajakan dari Arah Timur ke Arah Barat (Foto: Penulis)



Foto 2. Telajakan dari Arah Selatan ke Arah Utara (Foto: Penulis)



Foto 3. Selokan Alami (Foto: Penulis)

Hasil wawancara dengan salah satu warga mengatakan bahwa selokan alami memberikan kesan yang asri, alami dan menyatu dengan taman *telajakan*. *Telajakan* yang ada di desa tersebut mempunyai karakter yang khas dengan menerapkan selokan alami. Dengan keberadaan selokan alami, masyarakat desa yakin sirkulasi airnya bagus dan terbukti setiap musim hujan Desa Pakraman Cengkilung tidak ada genangan air di seputaran selokan. Kepedulian atau terlalu senangnya mereka menanam jenis tanaman sampai di bahu jalan terlihat juga ditanam tanaman hias, sehingga menambah keasrian desa tersebut. Di wilayah ini juga terdapat sungai-sungai kecil dengan airnya yang mengalir deras, sehingga tidak kekurangan air untuk menyiram tanamannya. Pemandangan yang berbeda dengan kondisi tanaman *telajakan* dari arah selatan ke arah utara yang tidak seragam dan tidak tertata rapi dan kelihatan tidak terawat. Berdasarkan informasi dari warga setempat, wilayahnya kesulitan air sehingga tanaman yang ditanam banyak yang tidak tumbuh dengan subur.

2.4 Perkembangan dan Perubahan Fungsi Telajakan

Seiring perjalanan waktu dan laju perkembangan teknologi yang ada, sulit dihindari terjadinya perubahan-perubahan. Berdasarkan informan dari masyarakat desa, adanya rasa kekhawatiran masyarakat desa terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti faktor pertambahan penduduk baik dari penduduk asli dengan bertambahnya anggota keluarga, maupun penduduk pendatang, mulai menjamurnya pengembang-pengembang membuat permukiman baru di wilayah Desa Pakraman Cengkilung. Faktor ekonomi keluarga yang semakin sulit menyebabkan adanya niat untuk menyewakan atau merubah halaman depan rumah atau *telajakan* untuk disewakan atau dijadikan warung. Kemajuan perkembangan teknologi seperti media sosial yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di masyarakat desa, membuat semakin tidak peduli terhadap lingkungan. Perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya mulai berkembang dan dibangunnya tempat usaha-usaha (Foto 4).



Foto 4: Perubahan *Telajakan* (Foto: Penulis)

Pemandangan seperti ini tidak bisa dihindari oleh masyarakat desa, perubahan lingkungan permukiman diakibatkan oleh faktor ekonomi dan tidak adanya *awig-awig* yang melarang membangun tempat usaha di sepanjang jalan. Perubahan ini merupakan ancaman bagi Desa Pakraman Cengkilung untuk mempertahankan permukimannya yang dikenal indah dan asri. Tidak adanya *awig-awig* untuk mengharuskan adanya *telajakan* bagi masyarakat desa juga merupakan ancaman keberadaan *telajakan*. Dampak dari perubahan tersebut, permukiman Desa Pakraman Cengkilung yang semula terlihat bersih, indah dan asri, akan kelihatan kumuh dengan mengikisnya keberadaan *telajakan*. Perubahan-perubahan yang sudah terlihat adalah ada beberapa yang beralih fungsi lahan menjadi warung, bengkel dan sebagainya. Perkembangan yang

terjadi begitu pesat disebabkan karena kondisi lingkungan di Desa Pakraman Cengkilung yang strategis, maka banyak masyarakat *urban* mencari tempat permukiman di Desa Pakraman Cengkilung. *Desa Pakraman* yang merupakan desa paling tinggi letak geografisnya sehingga tidak pernah terjadi banjir, harga lahan masih terjangkau dikalangan ekonomi menengah ke bawah, lingkungan desanya yang asri bebas polusi, tersedianya fasilitas-fasilitas di lingkungan Banjar Cengkilung seperti Sekolah Dasar No 7 Peguyangan dan supermarket. Jarak yang tidak jauh dari permukiman menuju pusat kota, menuju perkantoran-perkantoran, sekolah-sekolah dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, menuju pasar-pasar tradisional dan menuju pusat-pusat pembelanjaan.

2.5 Upaya Pelestarian Keberadaan Telajakan

Kekhawatiran terhadap bertambahnya penduduk yang telah disampaikan oleh informan berdasarkan wawancara tanggal 26 Mei 2019, merupakan hal yang wajar sebagai penduduk asli yang ingin mempertahankan atau melestarikan kearifan lokal yang ada di desanya. Lahan-lahan pertanian sudah beralih fungsi menjadi perumahan. Untuk mempertahankan tradisi yang ada, perangkat *desa pakraman* membentuk pola komunikasi serta interaksi antara krama desa untuk menyamakan persepsi dalam meneruskan kearifan lokal yang berkelanjutan untuk generasi yang mendatang, seperti tata nilai, keyakinan, gagasan dan tradisi adat yang merupakan warisan leluhur dari turun temurun, seperti dengan tetap menganut sistem *menyama braya*, saling *asah asih lan asuh*, gotong royong, kerja bakti dan lain-lain.

Adanya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya termasuk perawatan tanaman *telajakan* maka Desa Pakraman Cengkilung terlihat indah, bersih dan rapi. Tidak terlihat adanya ongkongan sampah di desa tersebut, karena masyarakat desa sudah mempunyai kesadaran tentang sampah. Mereka memilah-milah sampah antara sampah organik dengan anorganik, Untuk organik yang berasal dari dedaunan langsung ditampung di belakang rumahnya yang dikenal dengan *teba*/ladang untuk didaur ulang menjadi pupuk, sedangkan yang anorganik dikumpulkan oleh masing-masing warga kemudian diangkut oleh truk pengangkut sampah dan *krama* desa juga rutin melakukan kerja bakti setiap minggu. Cara menyampaikan ke masyarakat/*krama* desa untuk melakukan kerja bakti adalah dengan cara membunyikan *kulkul* oleh *juru arah*. *Krama* desa melakukan kerja bakti di masing-masing wilayahnya yang masih kelihatan kotor, dari menyapu, memotong rumput serta memangkas dahan-dahan yang sudah kering atau yang sudah rimbun. Kebersihan lingkungan dan

tertatanya *telajakan* dikarenakan adanya rasa malu yang dirasakan oleh masing-masing *krama* desa terhadap tanaman *telajakannya* yang tidak terlihat rapi dan terawat. Indikator ini juga yang menyebabkan tanaman *telajakan* di masing-masing rumah menjadi selalu indah dan terawat. Setiap pagi warga desa menyapu kemudian menyiram tanamannya. Bahkan perumahan BTN di Desa Pakraman Cengkilung yang merupakan masyarakat *urban* dengan mayoritas beragama Hindu, lingkungannya tertata rapi, bahkan mereka juga mengikuti tradisi *desa pakraman* dalam penataan lingkungan dengan melakukan kerja bakti setiap hari minggu, sehingga lingkungan perumahan tetap bersih dan tertata rapi.

Lestarinya interaksi sosial di desa ini terbukti dengan terbentuknya *sekaa-sekaa* baik *sekaa gong*, *sekaa angklung*, *sekaa teruna teruni*, *sekaa mekidung* maupun *sekaa tani*/kelompok wanita tani. Khusus *sekaa tani*/kelompok wanita tani yang terbentuk sejak beberapa tahun yang lalu dikenal dengan Kelompok Wanita Tani Sumber Rejeki yang anggotanya ibu-ibu PKK. Adanya sumbangan bibit dari Dinas Pertanian Kota Denpasar, seperti cabai, tomat, terung dan sebagainya, kelompok tani ini membudidayakan bibit sampai sekarang. Lokasi dari pembibitan ini terletak di dekat pura yang masih merupakan tanah milik *desa pakraman*. Hasil panen digunakan untuk membeli bibit-bibit tanaman jenis lain untuk dibudidayakan kembali. Begitu juga keharmonisan interaksi *krama desa pakraman* dengan lingkungan selalu terjaga karena tingginya kesadaran masyarakat desa akan kebersihan lingkungan dan juga manfaatnya. Dengan adanya taman-taman di masing-masing rumah dan tanaman *telajakan* di sepanjang jalan merupakan cermin kepedulian masyarakat desa terhadap lingkungan. Adanya *Pura Kahyangan Tiga/Parahyangan*, interaksi sosial/*Pawongan* dan kepedulian terhadap lingkungan/*Palemahan* yang disebut *Tri Hita Karana*, maka penerapan konsep ini merupakan cara mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal di era globalisasi, baik oleh masyarakat Desa Pakraman Cengkilung khususnya maupun masyarakat Bali umumnya.

3. Penutup

Menelusuri tentang eksistensi penerapan *telajakan* di Desa Pakraman Cengkilung, Desa Peguyangan Kangin, Denpasar Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Telajakan* diterapkan oleh masing-masing warga, karena kesadaran sendiri dan beberapa warga yang sadar akan merasa malu kalau *telajakannya* kurang tertata dan terawat. Sebagian penerapan *telajakan* yang masih tertata rapi berada di wilayah Desa Pakraman Cengkilung dari arah timur

- sampai barat. Sedangkan *telajakan* yang ada di ujung barat dan arah selatan ke utara, sudah banyak mengalami perubahan-perubahan.
2. Tidak adanya *awig-awig* yang khusus mengatur tentang *telajakan*, sehingga adanya kekhawatiran dari masyarakat desa, terhadap keberadaan *telajakan* yang beralih fungsi lahan menjadi warung, bengkel dan tempat usaha lainnya.
 3. Mempertahankan kearifan lokal yang berkelanjutan untuk generasi mendatang di era globalisasi dengan selalu menerapkan konsep *Tri Hita Karana*.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2019. *Wujudkan Bali Bersih Lewat THK*. www.balipost.com.
- Dewi, Ni Putu Atik Pradnya. 2018. Eksistensi Telajakan Di Koridor Permukiman Desa Wisata Pinge, Kabupaten Tabanan. *Undagi Jurnal Arsitektur*, Volume 6, Nomor 1, Bulan Juni, Tahun 2018, p-ISSN 2338-0454 (print), e-ISSN 2581-2211 (online).
- Dwijendra, NK Acwin. 2013. Telajakan Ruang Terbuka Hijau Tradisional Bali. *Jurnal Ipteks New Media* Volume 4 Nomor 2.
- _____. 2018. Peran Arsitek Menjaga Kearifan Lokal dalam Arsitektur Bangunan di Era Disrupsi. *Kuliah Tamu PDIT UNUD*.
- Geertz. 2007. Local Wisdom in Education. *Journal of Education*.
- Sarwadana, Arthawa. 2016. *Pelestarian Telajakan Untuk Menjaga Keseimbangan Ekologi dan Menjaga Lingkungan yang Sehat di Sekitar Kota Denpasar*. Program Studi Arsitektur Pertamanan Fakultas Pertanian Universitas Udayana Denpasar.
- Pandy, A. 2009. Tinjauan tentang Taman Telajakan. *Majalah Bali Post* Edisi 18-24 Mei 2009.

Sanitasi Bersih, Hidup Lebih Sehat dan Berkualitas



I Made Gde Sudharsana

“Sanitasi yang buruk memicu menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan dan pelayanan sanitasi yang baik akan memberi dampak pada meningkatnya kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat akan dapat membangun generasi penerus bangsa yang kuat dan berkualitas”

1. Mengapa Sanitasi Penting

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan prasarana sanitasi. Menurut WHO, usaha sanitasi meliputi sanitasi air, sanitasi udara, pengelolaan limbah, infrastruktur dan kelembagaan, kesehatan pemukiman dan lingkungan serta kesehatan global. Sanitasi di Indonesia dikelompokkan menjadi komponen penanganan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan penanganan drainase lingkungan.

Sanitasi sangat berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat. Apabila sanitasi buruk, kesehatan masyarakat akan buruk pula. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh pelayanan dan ketersediaan infrastruktur sanitasi yang ada. Bila air limbah tidak tertangani dengan baik, katakanlah dalam rumah tangga penempatan tangki septik tidak sesuai dengan standar yang ada dengan jarak minimal 10 meter dari sumur, maka air sumur akan tercemar oleh bakteri colli dan

apabila dikonsumsi akan dapat menurunkan tingkat kesehatan keluarga tersebut. Contoh lain pelayanan persampahan yang kurang memenuhi prosedur dengan membuang sampah sembarangan akan mengundang serangga lalat dan binatang seperti tikus untuk mengorek-ngorek sampah yang mengakibatkan pencemaran. Dilain pihak tersumbatnya saluran drainase oleh sampah akan mengakibatkan banjir. Semua ini menjadi pemicu masalah kesehatan masyarakat.

Indonesia saat ini bergelut dengan permasalahan sanitasi yang sangat sulit, karena perhatian pembangunan lebih ditujukan pada pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan pembangunan sanitasi yang pendanaannya masih kurang 2% dari APBN maupun APBD. Ketika dicanangkan MDGs (*Millenium Development Goals*) tahun 2015, pelayanan sanitasi di Indonesia rata-rata baru mencapai angka 61,88%, walaupun terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2008 yaitu 52%, namun pelayanan sanitasi dapat dikatakan terlambat.



Foto 1. Masih ada masyarakat kita yang memanfaatkan air sungai.
Sumber: Google

Foto 2. Banjir akibat tersumbatnya drainase.
Sumber: Google



Foto 3. Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Suwung.
Sumber: Google

Keterlambatan ini dapat dilihat dari catatan Unicef tahun 2008 yang dirilis pada 2010/2011 bahwa pelayanan sanitasi di Indonesia baru mencapai 52%, dan berada pada nomor 8 dari 10 negara di Asean dibawah Laos dan Vietnam, diatas Timor Timur dan Kamboja (Tabel 1).

Tabel 1. Progres Pelayanan Sanitasi 2008

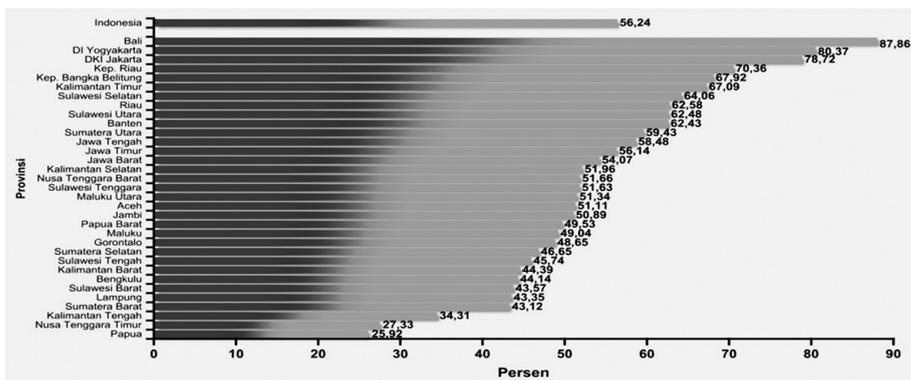
NO	NEGARA	% PENDUDUK MEMILIKI AKSES PADA SANITASI		PERKIRAAN PENCAPAIAN TARGET MDG 2015
		1990	2008	
1	SINGAPURA	99 %	100%	LEBIH CEPAT
2	MALAYSIA	84%	96%	LEBIH CEPAT
3	THAILAND	80%	96%	LEBIH CEPAT
4	MYANMAR	49%	81%	LEBIH CEPAT
5	FILIPINA	58%	67%	SESUAI RENCANA
6	VIET NAM	35%	75%	LEBIH CEPAT
7	LAOS	18%	53%	SESUAI RENCANA
8	INDONESIA	33%	52%	TERLAMBAT
9	TIMOR LESTE	32%	50%	SESUAI RENCANA
10	KAMBOJA	9%	29%	TERLAMBAT

Sumber: Paths to 2015 MDG priorities in Asia and The Pacific: Asia-Pacific MDG report 2010/11

Disamping itu bila disimak pernyataan Wakil Sekjen PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 25 Maret 2013 yang diberitakan oleh detik.com menempatkan Indonesia pada urutan ke 9 negara terburuk sanitasi di dunia, dengan urutan: 1. Burkina Faso; 2. Niger; 3. China; 4. Nepal; 5. Sudan; 6. Nigeria; 7. Ethiopia; 8. Pakistan; **9. Indonesia**; 10. India. Dimana semakin tinggi angka semakin buruk pelayanan sanitasi suatu negara. Melihat kondisi sanitasi di Indonesia yang buruk, sangat perlu dan penting ditangani guna dapat meningkatkan kesehatan.

2. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Indonesia
Sejak tahun 2010 pemerintah mencanangkan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman dengan maksud untuk mengejar ketertinggalan pelayanan

sanitasi dengan memperkuat komitmen melalui Target MDGs Indonesia tahun 2015, dimana target bidang sanitasi adalah 62,41% yang terdiri dari terlayannya 76,82% masyarakat perkotaan dan 55,50% masyarakat perdesaan. Namun progress pelaksanaan sampai tahun 2015 masih sedikit dibawah target yaitu 61,88%. Secara umum pelayanan sanitasi untuk Provinsi Bali tahun 2012 adalah 87,86% yang merupakan angka tertinggi di seluruh Indonesia (Gambar 1).



Gambar 1. Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia Sumber : BPS, 2013 Grafik Pelayanan Sanitasi Indonesia Tahun 2012

Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 56,24%. Provinsi dengan persentase tertinggi menurut akses terhadap sanitasi layak: Provinsi Bali sebesar 87,86% dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 80,37%. Persentase terendah terdapat di Provinsi Papua sebesar 25,92% dan Nusa Tenggara Timur sebesar 27,33%.

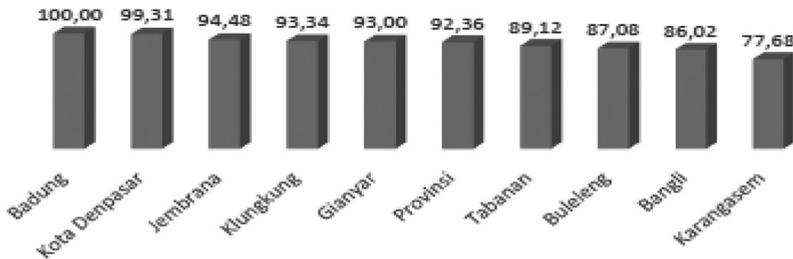
Tahap berikutnya pada RPJMN 2015-2019 pemerintah memacu akselerasi dengan target 100% yang dikenal dengan program *Universal Access* 100-0-100 yaitu pada tahun 2019 target pelayanan air bersih 100%, berkurangnya daerah kumuh sampai 0%, dan pelayanan sanitasi 100%. Pelayanan sanitasi 100% tahun 2019 dimaksud adalah pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) 85% dan pemenuhan kebutuhan dasar 15%, dengan kebutuhan dana Rp. 273 Triliun.

Harapan pelayanan sanitasi 100% ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang bertujuan mendorong berbagai sumber pendanaan pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun swasta dan masyarakat dalam percepatan pembangunan sanitasi permukiman. Secara umum infrastruktur sanitasi yang diperlukan dalam mendukung kesehatan masyarakat digambarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur air limbah diarahkan membangun sistem air limbah *on-site* dan *out-site* guna mengurangi pencemaran di kawasan permukiman perkotaan padat dan kumuh melalui Program Sanimas (sanitasi masyarakat) dengan membangun sistem air limbah komunal terpadu, dan sistem air limbah terpusat perpipaan dengan membangun instalasi pengolahan air limbah;
2. Pembangunan infrastruktur persampahan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan dicanangkan adanya pengurangan pembuangan sampah di TPA sampai 20% dan pengelolaan TPA dilakukan melalui *Sanitary Landfill* dan *Control Landfill*. Program pelayanan persampahan dengan pengurangan sampah melalui pola 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang dilakukan mulai dari rumah tangga atau di lingkungan dengan memanfaatkan bank sampah, instalasi pengolahan sampah terpadu (IPST) dengan pendaurulangan sampah menjadi pupuk, menjadi bahan bangunan, bahkan sampah dapat dimanfaatkan menjadi energi terbarukan (*renewable energy*);
3. Pembangunan infrastruktur drainase lingkungan yang terkait dengan sanitasi ditujukan untuk membangun infrastruktur drainase tersier didalam satu kesatuan sistem drainase yang terpadu. Tujuan utama pembangunan sistem drainase adalah untuk melancarkan aliran air dan mencegah terjadinya banjir.

3. Skenario Penanganan Sanitasi Provinsi Bali

Akses pelayanan sanitasi di Provinsi Bali dari tahun ke tahun meningkat, pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan dari 79,13%, meningkat menjadi 85,46% di tahun 2015, dan tahun 2017 meningkat menjadi 92,36%. Gambar 2 menunjukkan perbandingan cakupan pelayanan sanitasi layak per kabupaten/ kota.



Gambar 2. Grafik Pelayanan Sanitasi Provinsi Bali Tahun 2017
Sumber: Seksi Penyehatan Lingkungan Dikes Provinsi Bali Tahun 2017

Dari realisasi pelayanan sanitasi di Bali pada tahun 2017 sebesar 92,36%, untuk mencapai sasaran *universal access* 100% di tahun 2019, skenario yang direncanakan sebagai berikut:

- 1) Sisa pelayanan tahun 2015 sebesar 14,54%, Provinsi Bali merencanakan target penanganan sanitasi layak pada tahun 2019 adalah 95% dan 5% akses pelayanan sanitasi dasar (Tabel 2).

Tabel 2. Proyeksi Layanan Sanitasi Bali Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Akses Layak	Akses Dasar
1	Badung	100%	0%
2	Bangli	90%	10%
3	Buleleng	100%	0%
4	Denpasar	100%	0%
5	Gianyar	100%	0%
6	Jembrana	95%	5%
7	Klungkung	95%	5%
8	Karangasem	90%	10%
9	Tabanan	100%	0%

Kondisi penyusunan dokumen PPSP di Provinsi Bali sejak dicanangkannya program nasional sanitasi dimulai pada Tahun 2009 diikuti oleh Kota Denpasar yang saat itu dinamakan program ISSDP (*Indonesia Sanitation Sector Development Program*), kemudian pada Tahun 2010 berubah nama menjadi program PPSP. Perkembangan keikutsertaan Kabupaten/Kota dalam program PPSP seperti tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Peserta PPSP di Provinsi Bali

No	Dokumen Sanitasi	KABUPATEN/KOTA								
		Denpasar	Gianyar	Tabanan	Buleleng	Karasem	Badung	Klungkung	Jembrana	Bangli
1	BPS/SSK	2009	2011	2010	2010	2012	2012	2012	2013	2013
2	MPS	2010	2012	2011	2011	2013	2013	2013	2014	2014
3	SSK Update	2013	2015	2015	2015	2015	2018	2016	2016	2017
4	SSK Update Kedua	2018								

Keterangan

BPS : Buku Putih Sanitasi

SSK : Strategi Sanitasi Kota

MPS : Memorandum Program Sanitasi

SSK Update : SSK yang dimutakhirkan



Foto 4. IPAL DSDP Suwung
Sumber: Satker PSPLP Bali



Foto 5. Sanitary Landfill TPA
Sumber: Google



Foto 6. Drainase lingkungan
Sumber: Google

4. Apakah Kita Bisa Mewujudkan Impian Sanitasi Bersih

Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Memperhatikan tantangan dan permasalahan sanitasi yang dihadapi Indonesia, strategi pelayanan sanitasi, dan program pemerintah bersama masyarakat disusun sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sanitasi, melalui pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
2. Peningkatan kepedulian dan komitmen pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota akan pentingnya penyediaan dana infrastruktur sanitasi;
3. Peningkatan kelembagaan & kompetensi sumber daya manusia, suatu kelembagaan yang terdiri dari multi sektor terkait bertanggung jawab;
4. Peningkatan akses sanitasi layak, melalui pengembangan dan perluasan penyediaan infrastruktur sanitasi secara optimal guna peningkatan jumlah pelayanan sanitasi;

5. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan, melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat, termasuk pula dengan negara-negara donor guna meningkatkan pendanaan sanitasi;
6. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat, bersatu bekerja keras maka permasalahan sanitasi di Indonesia akan bisa ditangani dengan baik.

Daftar Bacaan:

- Anonim. 2018. *Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kota*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
- Anonim. 2013. *Grafik Pelayanan Sanitasi Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Anonim. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta: Bappenas.
- Anonim. 2018. *Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2018*. Denpasar: Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
- Anonim. 2015. *Paths to 2015 MDG Priorities in Asia and The Pacific: Asia-Pacific MDG Report 2010/11*

Konsep Multikultural pada Pola Permukiman di Kota Denpasar



I Nyoman Harry Juliarthana dan Komang Ayu Sari Galih

1. Pendahuluan

Perubahan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi perhatian utama di era globalisasi ini, tetapi peningkatan keragaman sosial adalah hal lain yang terjadi sebagai hasil dari migrasi skala besar, perbedaan tingkat pertumbuhan lintas kelompok sosial di daerah tujuan dan saling ketergantungan budaya lintas batas. Seiring dengan proses urbanisasi yang terus mendominasi pembangunan regional dan nasional, tren migrasi dan imigrasi mengubah komposisi sosiokultural daerah perkotaan dan memperkenalkan spektrum keanekaragaman budaya yang terus berkembang. Akibatnya, kota multikultural, sebagai realitas demografis perkotaan, merupakan fenomena yang semakin umum di seluruh dunia.

Kota telah menghubungkan fungsi ekonomi, politik, dan budaya, dimana keragaman kota harus menghadapi “masalah desain” yang terkait dalam beberapa dimensi. Saat kota dan masyarakat membutuhkan perhatian, penelitian dan kritik sosial telah meringkai tantangan dan peluang keragaman sosial dalam berbagai cara untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk didalamnya pengalaman urban, tempat berinteraksi

sehari-hari, kekuatan makro pembangunan bangsa, dan perdagangan global saling berinteraksi, dan dimana batas-batas sosial dikelola, toleransi beroperasi, serta loyalitas lintas sektoral digagalkan atau dimungkinkan.

Artikel ini mencoba menggali pemahaman terhadap konsep multikultural pada pola permukiman di kota Denpasar. Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali yang menjadi tempat tujuan utama masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satu dari tiga representasi Kota Denpasar berlandaskan multikultural. Untuk itu sangat memungkinkan konsep multikultural terjadi pada pola permukiman di Kota Denpasar.

2. Pembahasan

Multikultural berasal dari kata multi (plural) dan kultural (tentang budaya), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata multi berarti banyak (lebih dari satu/dua) dan kultural berarti sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan. Jadi, multikultural merupakan keadaan yang berhubungan dengan banyak kebudayaan atau keragaman kebudayaan. Multikultural (keragaman budaya) memiliki dimensi ganda. Sisi positif bisa mengukuhkan persatuan, sementara sisi negatifnya bisa menyebabkan perpecahan (*national geographic*). Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural telah membentuk suatu ideologi yang disebut multikulturalisme (Suparlan, 2002). Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kebudayaan yang berarti mencakup keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan yang terus berkembang di masyarakat (Irhandayaningsih, 2012). Suparlan (2002) menyatakan bahwa konsep multikulturalisme itu sendiri tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.

2.1 Pemahaman Urban Multiculturalism

Perubahan ekonomi meraih sebagian besar perhatian dunia, dimana peningkatan keragaman budaya merupakan produk sampingan dari migrasi berskala besar ke negara-negara maju dari negara miskin (Briggs, 2004). Konsep kota multikultural itu penting karena menandakan pemahaman kota tertentu yang mencakup perbedaan budaya (Qadeer). Banyak konseptualisasi kota tidak secara eksplisit mengenali perbedaan budaya. Dalam beberapa wacana budaya perkotaan, keragaman budaya dianggap sebagai kondisi sementara dari suatu

minoritas budaya yang berasimilasi pada mayoritas penduduk (Gale, 2002).

Penggunaan istilah kota multikultural membawa keragaman budaya ke permukaan sebagai kondisi permanen, dimana Tatjer (2003) menyatakan multikulturalisme adalah filosofi politik yang mengakui keragaman budaya dan etnis dalam masyarakat yang mendukung ekspresi dan pengakuan mereka sebagai elemen penyusun tatanan sosial. Ini mengasumsikan hak kelompok dalam menjalankan keagamaan dan perdata, serta persamaan hak bagi individu dan masyarakat. Istilah multikultural telah diterapkan secara luas dan oleh karena itu penting untuk memeriksa berbagai cara penggunaannya. Konsep kota multikultural sangat penting karena memberi sinyal pemahaman tertentu tentang kota yang mencakup perbedaan budaya.

Banyak ilmuwan menggambarkan beberapa tingkatan atau penggunaan konsep multikulturalisme. Penggunaan ini dapat langsung diterapkan pada berbagai tema penelitian kota multikultural seperti yang diilustrasikan Horneig dan Robert (2009) pada tabel 1.

Tabel 1. *Uses of the concept of multiculturalism as they apply to the multicultural cities*

<i>Uses of the concept multiculturalism</i>	<i>Application to the multicultural city</i>
<i>Demographic</i>	<i>Urban demographic; national, regional, and local residential settlement patterns</i>
<i>Social reality</i>	<i>Social inclusion or exclusion; social and economic integration or segregation (voluntary or involuntary); urban inter and interethnic relations</i>
<i>Normative</i>	<i>Urban normative discourse of the multicultural city, e.g., Sandercock's Cosmo polis</i>
<i>Political</i>	<i>Urban policy: e.g., land-use planning, urban infrastructure and services; ethnic minority participation in urban citizenship.</i>
<i>Critical discourse</i>	<i>Critique of urban ethnic and racial relations; urban social movements which challenge unequitable urban policies or management practice, e.g., housing, policing, immigrant support services, etc.</i>

Sumber: (Hoernig & Roberts, 2009)

Pertama, istilah multikulturalisme dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi demografis. Gambaran tentang karakteristik umum populasi masyarakat mencakup data statistik untuk menghitung dan menggambarkan badan 'budaya'. Penggunaan kedua mengacu pada realitas sosial multikulturalisme, deskripsi 'on-the-ground' dan tentang hubungan intra dan antar kelompok. Penggunaan ketiga mengacu pada ideologis atau normatif arah dari suatu konsep. Di sini, multikulturalisme adalah cara berpikir tentang bagaimana orang-orang dari berbagai budaya harus dapat berfungsi di masyarakat, dan bagaimana mereka harus berinteraksi satu sama lain. Keempat adalah penggunaan politik termasuk politik nasional, regional, dan lokal yang terlibat dalam debat semacam itu juga. Terakhir, penggunaan multikulturalisme bisa menjadi wacana kritis. Di sini multikulturalisme sebagai kritik atau debat dapat dilihat sebagai cara dimana masyarakat yang terpinggirkan dapat mengkritik dan menolak kekuatan atau struktur yang menindas di masyarakat. Dengan cara ini, transformatif multikulturalisme adalah gerakan yang menarik perbedaan budaya untuk mengacaukan *status quo* dan bekerja menuju hubungan antar budaya yang lebih adil.

Dimensi penting lainnya untuk konsep kota multikultural adalah evolusi gagasan terkait multikulturalisme. Gagasan-gagasan ini telah diuji, dinegosiasikan, diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program, dan diperdebatkan dengan berbagai cara dari waktu ke waktu dan dalam konteks nasional, regional, dan perkotaan yang berbeda. Sebagai contoh, di Kanada, salah satu dari sedikit negara yang telah menetapkan kebijakan federal resmi, undang-undang, dan program yang terkait dengan multikulturalisme, para cendekiawan telah mencatat perubahan besar dalam cara multikulturalisme telah ditafsirkan dan diimplementasikan selama 40 tahun terakhir dari keberadaannya. Sementara ada beberapa rendering kronologi Kanada, sebagian besar versi menceritakan cara kebijakan bergeser dari fokus yang agak dangkal pada hanya peristiwa budaya dan program (multikulturalisme lagu dan tarian), dengan sikap yang lebih kritis di mana kebijakan dan program dirancang untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pengucilan sosial, diskriminasi, dan kesetaraan. Debat diberbagai penerima imigran lainnya negara-negara seperti Australia, Inggris, dan negara-negara Eropa juga telah dinamis, ditandai oleh berbagai gelombang dukungan dan oposisi termasuk perdebatan sengit mengenai identitas nasional dan regional, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti kebebasan beragama (misalnya, 'foulard atau urusan jilbab' di Perancis), kebebasan berbicara, dan biaya serta manfaat migrasi.

Aspek multikulturalisme dapat dikategorikan oleh tiga masalah yang timbul dari keanekaragaman budaya, masing-masing dengan serangkaian implikasi yang sesuai dan dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. *Three readings of issues related to urban cultural diversity*

	<i>Issue</i>	<i>Group Claims</i>	<i>Urban Issues</i>
<i>Accommodation</i>	<i>Cultural Difference</i>	<i>Claims to cultural recognition</i>	<i>Architecture and land-use planning issues (housing, places of worship, retail); heritage and memorial sites; recreation and leisure facilities; cultural celebrations (festivals, parades); language rights; freedom of religion (dress, religious practice etc.)</i>
<i>Equity</i>	<i>Discrimination Marginalization</i>	<i>Claims to human rights/ equity</i>	<i>Equitable access to urban infrastructure, services, and programs; access to affordable housing; employment equity; participation in urban governance</i>
<i>Intersectionality</i>	<i>Social marginalization or exclusion due to the combination of more than one dimension of identity</i>	<i>Claims to equity, in recognition of the multiple or interacting barriers faced by individuals or groups</i>	<i>Problems experienced by specific groups, e.g., immigrant, single mothers or disabled people of an ethnic minority, usually in relation to other issues such as housing, employment, or support services</i>

Sumber: (Hoernig & Roberts, 2009)

Satu set masalah berkaitan dengan pengakuan perbedaan budaya; dicirikan oleh permintaan akan pengakuan budaya yang membutuhkan beberapa jenis akomodasi. Serangkaian masalah kedua berkaitan dengan diskriminasi dan rasisme di bawah pemerintahan yang ada di mana klaim dibuat untuk perlakuan yang adil dan persamaan hak asasi manusia. Serangkaian masalah ketiga terjadi di persimpangan etnis dengan satu atau lebih dimensi perbedaan lainnya. Dalam kasus ini, kombinasi dari dua karakteristik atau lebih yang mengakibatkan marginalisasi individu atau kelompok.

2.3 Proses Pembentukan Kota Denpasar

Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung dan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan Denpasar dijadikan pusat pemerintahan bagi Tingkat II Badung maupun Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Keadaan fisik Kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemikian maju serta pula kehidupan masyarakatnya telah banyak menunjukkan ciri-ciri dan sifat perkotaan. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat pariwisata. Melihat perkembangan Kota administratif Denpasar ini dari berbagai sektor sangat pesat, maka tidak mungkin hanya ditangani oleh pemerintah yang berstatus kota administratif. Oleh karena itu sudah waktunya dibentuk pemerintahan kota yang mempunyai wewenang otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah perkotaan sehingga permasalahan kota dapat ditangani lebih cepat dan tepat serta pelayanan pada masyarakat perkotaan semakin cepat.

Seperti halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar merupakan ibu kota provinsi mengalami pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta lajunya pembangunan disegala bidang terus meningkat, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Demikian pula dengan Kota Denpasar yang merupakan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan sekaligus juga merupakan ibu kota Provinsi Daerah Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan demikian pesatnya. Pertumbuhan penduduknya rata-rata 4,05% per tahun dan dibarengi pula lajunya pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor, sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Kota Denpasar yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang harus diselesaikan dan diatasi oleh pemerintah kota administratif dalam memenuhi kebutuhan maupun tuntutan masyarakat perkotaan yang demikian terus meningkat. Berdasarkan kondisi objektif dan berbagai pertimbangan antara Tingkat I dan Tingkat II telah dicapai kesepakatan untuk meningkatkan status kota administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Pebruari 1992 sehingga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan juga bagi Kota Denpasar.

Bagi Provinsi Daerah Tingkat I Bali adalah merupakan pengembangan

yang dulunya 8 Daerah Tingkat II sekarang menjadi 9 Daerah Tingkat II. Sedangkan bagi Kabupaten Badung kehilangan sebagian wilayah serta potensi yang terkandung didalamnya. Bagi Kota Denpasar merupakan babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

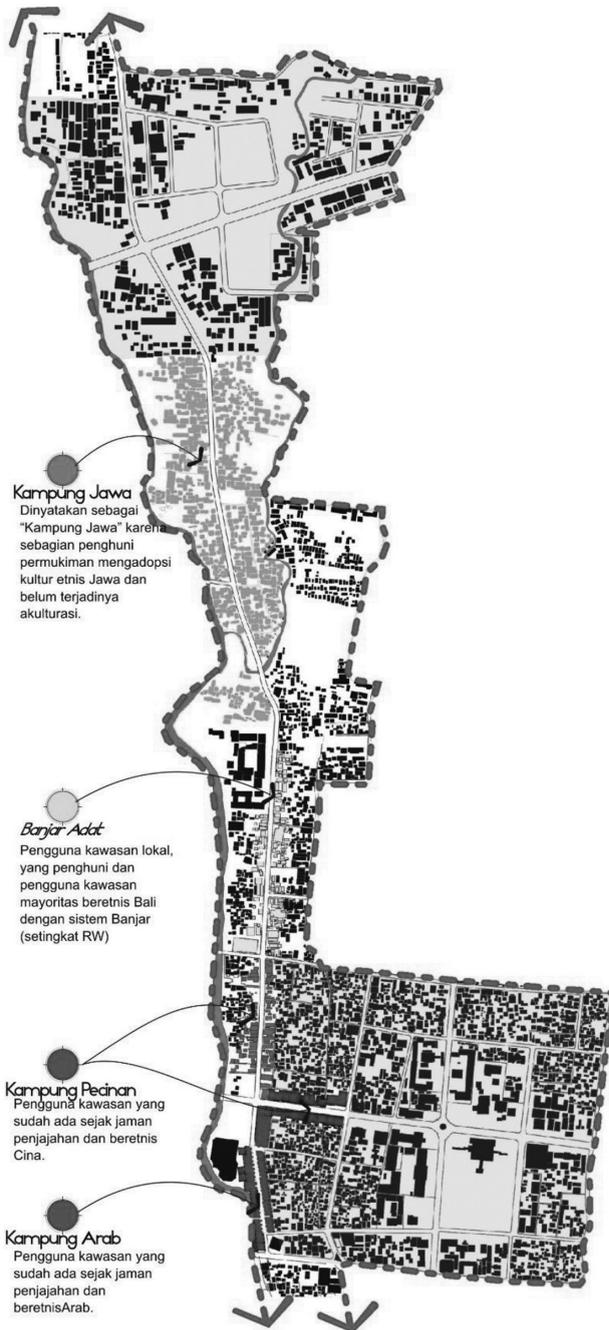
2.4 Konsep Multikultural pada Pola Permukiman di Kota Denpasar

Hubungan antara populasi multi-etnis dengan struktur dan fungsi perkotaan telah lama menjadi perhatian para ilmuwan perkotaan. Karya yang lebih baru mengenai perbedaan sosial di kota telah menyoroti cara-cara di mana proses ekonomi dan sosial budaya perkotaan berkontribusi terhadap konstruksi sosial identitas etnis dan rasial, serta cara-cara kompleks dan dinamis di mana identitas sosial menyatu dalam bentuk bangunan.

Salah satu cara untuk menyelidiki keragaman budaya adalah dengan meneliti cara-cara di mana kelompok-kelompok yang berbeda didistribusikan melintasi lanskap perkotaan, biasanya menanyakan korelasi lokasi mereka dengan variabel lain seperti pendidikan atau tanggal kedatangan. Ada beberapa skala di mana penyelidikan ini terjadi, diantaranya:

1. Pendekatan pertama adalah mempelajari pola pemukiman di seluruh sistem perkotaan.
2. Pendekatan kedua adalah memeriksa pola pemukiman intra-perkotaan.
3. Pendekatan ketiga adalah meneliti kejadian negosiasi antar-etnis di lapangan atau di tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, taman dan jalan atau mengacu pada kejadian tertentu seperti konflik atau situasi pengambilan keputusan.

Di Kota Denpasar, salah satu pendekatan yang sesuai untuk mengetahui tingkat multikultural di kota tersebut dengan pendekatan pertama yaitu pola pemukimannya. Kota Denpasar memiliki kekayaan, keragaman dan kejeniusan pusaka alam, budaya dan saujana. Pusaka budaya yang meliputi: kesenian, sastra, tradisi, religi sampai pusaka budaya multi kultur (desa Bali, kota tua Gajah Mada, kampung Jawa, kampung Cina, kampung Arab, kampung Bugis) berkembang penuh toleransi dan harmoni di Kota Denpasar. Pola permukiman ragam budaya digambarkan pada gambar 2.



Gambar 2. Konsep Multikultural Pola Permukiman di Kota Denpasar.
Sumber: Dokumentasi dan olah data 2017

3. Penutup

Kota Denpasar memiliki salah satu komponen dari konsep multikultural. Komponen tersebut menggunakan pola permukiman sebagai pendekatan yang sesuai. Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Kota Denpasar memiliki potensi konsep multikultural pada pola permukimannya. Saran kedepan, diharapkan adanya studi lanjutan yang lebih mendalam terhadap konsep multikultural dengan menyertakan komponen dan pendekatan lainnya pada konsep multikultural. Kedua, adanya penelitian empiris dan mendalam terkait seluruh komponen konsep multikultural yaitu demografi, realitas sosial, *normatif, political, dan critical discourse* di Kota Denpasar.

Daftar Pustaka

- Briggs, X. d. S. (2004). Civilization in color: The multicultural city in three millennia. *City and Community* 3, 311--342.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. 2016. *Denpasar dalam angka 2016*. Denpasar: Badan Pusat Statistik.
- Gale, Richard. 2002. The Multicultural City and the Politics of Religious Architecture: Urban Planning, Mosques and Meaning-making in Birmingham, UK. *Built Environment*. 30(1), -
- Hoernig, H. and Roberts, M. W. 2009. *Multicultural City*. Canada:Elsevier Ltd
- Irhandayaningsih, A. 2012. Kajian Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia. *HUMANIKA*. 15 (9), 1-8
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Suparlan, Parsudi. 2002, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural, *Makalah Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika", Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002*
- Tatjer, Laura C. 2003. *Multiculturalism in the city: managing diversity*. Ersa Congress. Barcelona, Spain

Perumahan Tradisional Bali dan Indeks Kualitas Kenyamanan Hidup Rumah Terhadap Penghuninya



Cokorda Putra dan A.A.A Made Cahaya Wardani

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan satu kawasan yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh pelancong dari berbagai belahan dunia karena keunikan budaya serta keramahan penduduknya. Kepulauan Nusantara merupakan satu gugusan kepulauan yang saling mendukung serta tidak bisa dipisahkan satu sama lain sehingga disebut *zamrud khatulistiwa*. Salah satu pulau yang sangat terkenal di Indonesia yakni Pulau Bali. Pulau Bali merupakan satu pulau kecil yang merupakan bagian dari Indonesia dan merupakan satu provinsi dengan adat budaya Bali yang adiluhung yang tentunya sangat didukung oleh penduduknya yang dominan beragama Hindu (Dwijendra, 2008)

Budaya Bali yang sangat unik ini mengalami proses yang sangat panjang dengan berbagai untai sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari. Kedatangan Maharsi Markandeya di abad ke IX dengan menanam logam *pancadatu* sehingga ada Pura Besukihan. Pertemuan sembilan aliran di Pura Samuhan Tiga yang dipimpin Mpu Kuturan sehingga lahir *desa pakraman* dan terakhir kedatangan Dang Hyang Dwijendra yang melengkapi Pura dengan *padmasana* dan pembuatan pura dipinggir pantai membuat benteng pertahanan Bali semakin kuat. Bali juga memiliki sistem sosial serta pranata sosial yang

sangat khas dan pengaturan tingkah laku penduduk yang selalu berdasarkan falsafah Hindu.

Keunikan budaya Bali inilah yang sangat mendukung terciptanya satu kawasan tujuan wisata dunia yang sangat berkelas dan tidak ada bandingannya di kawasan lain. Budaya tersebut mencakup seni tari, seni tabuh, seni ukir, seni lukis, seni pewayangan serta seni bangunan/arsitektur tradisional Bali yang kesemuanya tersebut selalu berlandaskan agama Hindu. Berbicara masalah bangunan tradisional Bali yang dalam pelaksanaan pembangunannya selalu memakai petunjuk *lontar* yang mengatur tata letak serta bahan apa saja yang baik dipakai untuk pembangunan bangunan yang dimaksud. *Lontar* tersebut adalah *Asta Kosala Asta Kosali, Bomantaka* serta *Asta Bhumi*.

Petunjuk dari *lontar* tersebut selalu dipakai pedoman oleh ahli bangunan tradisional Bali yang disebut dengan *undagi* inilah menyebabkan bangunan tradisional Bali sangat hidup dan mempunyai jiwa (*metaksu*). Prosesi pembuatan bangunan Tradisional Bali baik itu perumahan, bangunan suci ataupun fasilitas sosial tidak terlepas dari sendi-sendi agama, adat istiadat, kepercayaan dan sistem religi disertai dengan proses upacara mulai dari awal hingga akhir pembangunannya. Bahkan ketika akan ditempati secara permanen lebih-lebih itu bangunan suci dipastikan dilalui dengan proses sakralisasi sehingga bangunan tersebut sangat disucikan oleh penggunanya. Proses inilah yang membuat bangunan tradisional Bali sangat menarik perhatian orang luar Bali menjadikan satu objek baik itu sebagai tujuan pariwisata ataupun sebagai objek penelitian yang sangat menarik dikaji makna filosofis serta makna dan fungsinya.

Rumah tinggal tradisional Bali menjadi salah satu ikon pariwisata Bali yang selalu menjadi objek kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Alasan lainnya karena di Bali juga memiliki sistem sosial serta pranata kemasyarakatan yang sangat khas dan unik. Rumah tinggal tradisional Bali merupakan satu perwujudan dari pengaturan tingkah laku yang selalu berpedoman pada agama Hindu dan adat budaya lokal sebelum masuknya Hindu di Bali. Perumahan tradisional Bali memiliki karakter yang sangat kuat karena dipengaruhi dan dijiwai oleh Agama Hindu serta pengaruh ragam hias luar yang tentunya sudah disesuaikan alam Bali sendiri. Perumahan tradisional Bali merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dipisahkan satu sama lain yang dilandasi norma dan perilaku pranata kemasyarakatan yang berlaku. Perumahan tradisional Bali mempunyai peruntukan yang sangat khas yang disamping dimanfaatkan sebagai rumah tinggal juga mempunyai fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan dalam hubungannya dengan aktivitas sosial religious (Parwata,

2011).

Tri Hita Karana sebagai landasan filosofis pembangunan dan pemanfaatan ruang di Provinsi Bali seperti termuat dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Propinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 memberi isyarat kepada seluruh komponen masyarakat Bali untuk menggunakan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai pedoman dalam setiap aktivitas kehidupannya. Pemanfaatan Ruang dalam pelestarian lingkungan fisik dan budaya yang merupakan modal dasar dalam pengembangan dan pengimplementasian nilai *Tri Hita Karana*. Pembangunan yang terjadi dewasa ini kurang memperhatikan pelestarian kekayaan sosial dan budaya sebagai bagian integral dari seluruh program pembangunan dan pemanfaatan ruang. Padahal konsep pembangunan yang berorientasi pada budaya tradisional Bali harus memberikan ruang yang proporsional pada tiga unsur mendasar yakni *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* sebagai pengejawantahan konsep *Tri Hita Karana*.

Setiap bangunan akan memberikan kualitas hidup (*Quality of Life*) yang berbeda. *Quality of Life* (QoL) adalah kualitas hidup yang merupakan salah satu standar kenyamanan penghuni rumah yang berhubungan dengan penilaian kenyamanan lingkungan (Al horr, *et al*, 2016). Setiap manusia akan berusaha untuk membuat suasana lingkungan rumah yang terasa nyaman. Dalam ASHRAE *guidelines* dinyatakan bahwa orang menghabiskan 80 – 90% waktunya didalam ruangan dan penelitian menyatakan indikasi kenyamanan dan kesehatan penghuni rumah berhubungan dengan karakteristik bangunan yang dihuninya. Regulasi dan aturan bangunan serta bangunan hijau menekankan pada kenyamanan tanpa memperhatikan dimensi psikologi, kultur dan budaya penghuninya (ASHRAE, 2010). Tekanan Lingkungan mempunyai dimensi objektif dan subjektif yang berhubungan dengan kondisi hidup seseorang baik internal dan eksternal dengan persepsi yang berbeda dan berhubungan dengan status lingkungan yang diterima oleh penghuni dan pengunjung rumah. Demikian juga bangunan tradisional Bali dapat diketahui QoLnya terhadap penghuni dan pengunjung bangunan tersebut disamping yang telah tertuang dalam konsep bangunan Bali yaitu konsep *Tri Hita Karana*.

2. Permukiman

Pengertian permukiman sering disamakan dengan makna perumahan dan atau sebaliknya. Permukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta

prasarana dan sarana lingkungannya. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu *houses* dan *land settlement*. Sedangkan permukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan hanya bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*) tetapi juga psikis psikologi penghuni permukiman tersebut.

Dengan demikian perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi. Dimana permukiman adalah susunan dan penyebaran bangunan (termasuk antara lain rumah-rumah, gedung-gedung, kantor, pasar dan sebagainya). Memperhatikan bangunan-bangunan, jalan-jalan dan pekarangan-pekarangan yang menjadi salah satu sumber penghidupan penduduk. Munculnya permukiman padat pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor konsentrasi penduduk dan faktor kebutuhan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi. Faktor konsentrasi penduduk adalah kepadatan penduduk dalam satuan jiwa per km² di wilayah/desa tersebut. Faktor penyebab kedua adalah faktor fasilitas sosial ekonomi yang mendorong perubahan penggunaan lahan pertanian, antara lain mencakup segi-segi kebutuhan (Yunus dan Hadi, 2005) sebagai berikut:

1. Faktor aksesibilitas, terkait dengan kemudahan jangkauan suatu tempat.
2. Perluasan dan penambahan panjang jalan untuk fasilitas sarana transportasi.
3. Fasilitas penunjang kehidupan, yaitu jumlah pertokoan, warung makan, tempat *laundry*, tempat fotokopi, dan sebagainya.
4. Ketersediaan layanan umum.
5. Fasilitas kesehatan seperti klinik atau tempat-tempat pengobatan.
6. Prakarsa pengembang.
7. Peraturan mengenai tata guna lahan.
8. Karakteristik lahan.
9. Karakteristik pemilik lahan.

2.1 Konsep Keharmonisan Perumahan dan Lingkungan di Bali

Konsepsi keharmonisan dengan lingkungan dapat dijabarkan sebagai berikut: mengutamakan pemanfaatan potensi sumber daya alam setempat, sumber daya manusia setempat, dan mengutamakan penerapan arsitektur setempat. Pihak luar sering kali kurang berhasil dalam melihat keserasian karena perbedaan sudut pandang. Hal ini dikarenakan pihak luar lebih memandangi kenyamanan fisik yang justru tidak dipentingkan dalam arsitektur tradisional. Tujuan dari

pada keberadaan perumahan tradisional Bali menganut konsep *Tri Hita Karana* yang diharapkan untuk menjaga:

1. Keharmonisan hubungan antar manusia dengan Tuhan
2. Keharmonisan hubungan antar manusia dengan Alam
3. Keharmonisan hubungan antar manusia dengan manusia

Tri Hita Karana ini memberikan turunan tata letak konsep ruang *Tri Angga* yang berarti tiga dan *Angga* berarti badan, yang lebih menekankan tiga nilai fisik yaitu *Utamaning Angga*, *Madyaning Angga* dan *Nistaning Angga*. Kearifan lokal masyarakat Bali terdapat pada konsep *Tri Mandala* yang merupakan pembagian wilayah ruang dalam upaya menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam dan manusia. Arsitektur tradisional Bali terstruktur dalam pembagian wilayah yang mengacu pada sumbu arah mata angin seperti arah *kaja kangin* yaitu arah gunung yang berada pada arah timur laut merupakan wilayah *utama madya* pada posisi tengah dan *nista* pada arah *kelod kauh* atau arah tenggara.

Menurut Adhika *dalam* (Dwijendra, 2003), jika kedua sistem tata nilai dijadikan satu maka akan terbentuk pola ruang menjadi sembilan segmen, yang dinyatakan dalam *nawa sanga*. Secara umum bangunan tradisional Bali terdiri dari konsep ruang *Sanga Mandala* adalah konsep ruang yang dibagi menjadi sembilan bagian area (*pah pinara sanga sesa 1, 2, 3, dst.*), artinya ruang dibagi sembilan dan disisakan satu, dua, atau tiga bagian, dan seterusnya pada bagian luar sebelah kiri. Bagian ini dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu: *Nista*, *Madya* dan *Utama*.

- a. *Utama* merupakan area ruang tempat suci (*sanggah/merajan*) yang terletak di bagian *hulu kaja kangin*.
- b. *Madya* merupakan area ruang untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti untuk melakukan upacara *adat* dan keagamaan. Kelompok ruang *madya* yang merupakan ruang bagian tengah, meliputi bangunan tempat suci *penunggun karang*, *natah* (halaman), *jineng* (lumbung) dan bangunan *angkul-angkul* (pintu keluar-masuk halaman).
- c. *Nista* merupakan area tiga kelompok ruang yang berada di sebelah kiri, meliputi bangunan kandang dan *angkul-angkul*, serta sebagian *bale dauh* dan *paon*.

Selain itu, untuk mewujudkan lingkungan perumahan yang harmonis, pembangunan perumahan harus memperhatikan aspek-aspek rumah tradisional Bali sebagai berikut:

1. Aspek sosial, yang menyangkut aspek sosial sistem kemasyarakatan yang dikenal dengan *desa/banjar* yang memiliki ciri-ciri legitimasi dan atribut

desa adat.

2. Aspek simbolik, berkenaan dengan orientasi kosmologis antara lain orientasi arah sakral dan *Sanga Mandala* atau *Tri Mandala*.
3. Aspek morfologis, yang secara morfologis kegiatan-kegiatan dalam perumahan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu inti, terbangun dan pinggiran.
4. Aspek fungsional, berkaitan dengan orientasi kosmologis yang tercermin pada tata letak ruang sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

2.2 Konsep Perumahan Modern

Undang-Undang no 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman pasal 1, menyebutkan bahwa rumah adalah tempat tinggal atau hunian dan sarana bagi pembinaan keluarga. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan ataupun pedesaan.

Asas penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri dan kelestarian lingkungan hidup. Fungsi Rumah menurut Turner 1972 adalah:

1. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga yang diwujudkan dalam kualitas hunian atau perlindungan yang diberikan rumah. Kebutuhan tempat tinggal dimaksudkan agar penghuni mempunyai tempat tinggal atau berteduh secukupnya untuk melindungi keluarga dari iklim setempat.
2. Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
3. Rumah sebagai penunjang rasa aman dalam arti terjaminnya kehidupan keluarga di masa depan.

Dalam hal jaminan keamanan lingkungan, serta jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan. Kebutuhan rumah menurut Teori Maslow 1954, *Hierarchy of Need*, kebutuhan akan rumah dapat didekati berdasarkan teori kebutuhan :

1. *Physiological Needs* (kebutuhan akan makan dan minum), merupakan kebutuhan biologis yang hampir sama untuk setiap orang yang juga merupakan kebutuhan terpenting selain rumah, sandang dan pangan juga termasuk dalam tahap ini.
2. *Safety* atau *Security Needs* (kebutuhan akan keamanan), merupakan tempat

- berlindung bagi penghuni dari gangguan manusia dan lingkungan yang tidak diinginkan.
3. *Social or Affiliation Needs* (kebutuhan berinteraksi), sebagai tempat untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman.
 4. *Self Actualization Needs* (kebutuhan akan ekspresi diri), rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal tetapi menjadi tempat untuk mengaktualisasikan diri.

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pemukiman

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan pemukiman tergantung dari perkembangan suatu wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan permukiman dilihat dari 9 (sembilan) aspek yaitu:

1. Aspek Geografi, letak suatu permukiman sangat menentukan perkembangan permukiman suatu kawasan. Permukiman yang letaknya terpencil dan sulit dijangkau akan lambat untuk mengalami perkembangan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi permukiman karena mempengaruhi kenyamanan penghuninya.
2. Faktor Kependudukan.
3. Faktor Kelembagaan.
4. Faktor Swadaya dan Peran serta masyarakat.
5. Sosial dan Budaya.
6. Ekonomi dan Keterjangkauan Daya Beli
7. Sarana dan Prasarana.
8. Pertanian.
9. Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara umum, konsepsi rumah sederhana sehat dapat dijelaskan dalam konteks tipologi rumah sederhana dan konsepsi rumah inti tumbuh. Rumah sederhana adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Luas kapling ideal, dalam arti memenuhi kebutuhan luas lahan untuk bangunan sederhana sehat baik sebelum maupun setelah dikembangkan. Secara garis besar perhitungan luas bangunan tempat tinggal dan luas kapling ideal yang memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan kenyamanan bangunan. Dalam konteks konsepsi rumah inti tumbuh, rancangan rumah inti tumbuh memenuhi tuntutan kebutuhan dasar penghuni yakni para penghuni rumah tersebut bisa nyaman, aman dan sehat selama bertempat tinggal dirumah tersebut (Tabel 1).

Tabel 1. Kebutuhan Luas Minimum Bangunan dan Lahan untuk Rumah

Standar per jiwa	Luas (M ²) untuk 3 jiwa				Luas (m ²) untuk 4 jiwa			
	Unit Rumah	Lahan (L)			Unit Rumah	Lahan (L)		
		Min.	Efektif	Ideal		Min.	Efektif	Ideal
Ambang batas 7,2	21,6	60,0	72-90	200	60,0	72-92	200	
Indonesia 9,0	27	60,0	72-90	200	60,0	72-90	200	
Internasional 12,0	36	60,0	—		60,0	---	---	

Sumber : PUPR dalam Suryo (2017)

3. Quality of Life (QoL)

Keseimbangan antara bangunan hijau dan kenyamanan penghuni menjadi penting dan perlu ditingkatkan serta dikontrol dan dimonitor untuk memastikan bahwa bangunan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Al Nasa'a, 2015; Azhar et al., 2011). *Quality of Life* (QoL) juga merupakan faktor yang berkontribusi seimbang yang berhubungan dengan aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Raynsford (2000) menjelaskan minimum polusi, efisiensi buangan dan penggunaan sumber daya alami. Keterbatasan lingkungan mempengaruhi pertumbuhan suatu kota yang perhubungan dengan kongesti, kepadatan, kualitas lingkungan, manajemen sampah, fasilitas kesehatan, kriminal dan faktor individual lainnya.

Para peneliti menyetujui bahwa untuk menentukan QoL diperlukan indikator yang berhubungan dengan indikator objektif dan subjektif. Beberapa peneliti mengidentifikasi parameter yang diidentifikasi dalam konteks *urban and regional* yang perlu dianalisis (Tabel 2) (Lambiri, et al, 2007).

Tabel 2. Parameter *Quality of Life* dalam konteks *Urban and Regional*

No	Indikator	Penjelasan
1	Kenyamanan penghuni dan pengunjung	Memberikan rasa nyaman dan relaksasi
2	Material	Keberlanjutan penampakan estetis dari infrastruktur
3	Status dan apresiasi	Suatu bangunan dapat diapresiasi dan dihormati
4	Karakteristik sestetik	Dapat meikmati keindahan alami dan keindahan budaya suatu bangunan

5	Keamanan	<i>Atended and cared for by others</i>
6	<i>Income and buying capacity</i>	Mempunyai kemampuan membeli untuk memenuhi kebutuhan
7	Keluarga dan <i>relationship</i>	Mempunyai kehidupan keluarga yang stabil dan hubungan keluarga yang baik
8	Kesehatan	Mempunyai akses terhadap kesehatan yang baik
9	Kehidupan sosial	Mempunyai kesembatan yang sama terhadap semua orang
10	Waktu <i>leisure</i>	Mempunyai waktu yang cukup untuk bepergian dan dapat memanfaatkannya dengan baik
11	<i>Change, variation</i>	Mempunyai dan mengalami hidup yang bervariasi
12	<i>Freedom</i>	Mempunyai kebebasan dalam mengontrol kehidupan sendiri
13	<i>Privacy</i>	Mempunyai kesempatan untuk menjadi diri sendiri melakukan keinginan sendiri
14	Kualitas Lingkungan	Mempunyai akses terhadap udara, air dan tanah yang bersih serta meningkatkan kualitas lingkungan
15	Identitas dan <i>self respect</i>	Mempunyai respek sendiri dan mampu mengembangkan identitas sendiri
16	Hubungan Sosial	Mempunyai hubungan social yang baik dengan teman, kolega dan tetangga, Serta mampu membangun dan membuat kontak sosial
17	Spiritualitas dan agama	Mampu meningkatkan spiritualitas dengan atau agama sendiri
18	Pendidikan	Mempunyai kesempatan untuk memperoleh Pendidikan dan mengembangkan pengetahuan umum
19	Keamanan	Merasa aman didalam rumah dan diluar rumah. Terlindungi dari kriminalitas
20	<i>Natural dan biodiversity</i>	Dapat meningkatki laskap alam, taman dan hutan, Serta menjaga kelestarian pohon, binatang dan menjamin keberlangsungan biodiversity
21	<i>Chalenge</i> dan kesenangan	Mempunyai kesembatan alam pengalaman dan hal yang menyenangkan
22	Pekerjaan	Mampu memperoleh dan menyenangi pekerjaan yang memungkinkan.

Sumber: Judith and Linda (2006)

Parameter QoL termasuk kondisi *urban space*, komunitas *urban*, proses konstruksi, urbanisasi dan pertumbuhan migrasi, *urban lifestyle*, fasilitas komunikasi, jaringan transportasi, minimalisasi sampah dan *recycle*, faktor kimia dan faktor lainnya. Fitur lingkungan *outdoor* pada bangunan *urban* dan bentuk morfologinya akan memberikan pengaruh terhadap penghuni dan pengunjung bangunan tersebut. Kualitas hidup (QoL) dipengaruhi oleh berbagai faktor dan karakteristik yang multi dimensional seperti tekanan lingkungan, manajemen air, total manajemen sampah, polusi suara dan tingkat polusi air, dan lain-lain.

Tekanan lingkungan mempunyai dimensi subjektif seperti infrastruktur, *bulding material*, *urban traffic*. Aktivitas konstruksi meliputi penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, penghancuran, konsumsi energi, sumber daya alam peningkatan gas rumah kaca, yang dapat mengubah total nilai QoL.

4. Penutup

Dalam konteks desain bangunan tradisional Bali yang terkait dengan kebutuhan penghuni bangunan, kenyamanan dan keberlangsungan penghuni pada bangunan tradisional Bali perlu dilakukan investigasi terhadap indikator QoL indeks dengan berbagai parameter yang berhubungan dengan lingkungan. Pada hakikatnya bangunan tradisional Bali sudah menggunakan konsep keseimbangan alam yaitu konsep *Tri Hita Karana*. Namun dalam konteks QoL, sebaiknya juga dilakukan studi untuk mengetahui QoL indeks dari bangunan tradisional Bali, karena indikator dan parameter konsep *Tri Hita Karana* didalam penerapannya pada bangunan tradisional bali dan dikaitkan dengan kenyamanan, keamanan penghuni masih sangat abstrak atau belum terukur secara pasti.

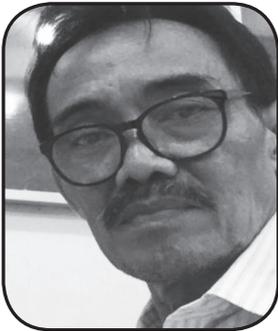
Daftar Pustaka

- Al horr, Y., Arif, M., dan Katafygiotou, M. 2016. Impact of Indoor Environmental Quality on Occupant Well-Being and Comfort: A Review Of The Literature. *International Journal of Sustainable Built Environment*.
- ASHRAE. 2010. *Guideline 10P, Interactions Affecting the Achievement of Acceptable Indoor Environments*. ASHRAE Second Public Review. .
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin, 2008, *Arsitektur Tradisional Bali Berdasarkan Asta Kosala-Kosali*. Denpasar: Udayana University Press.
- _____. 2003. "Perumahan dan Permukiman Tradisional Bali." *Jurnal Pemukiman Natah*.
- Lambiri, D. , B., dan Royuela, V. 2007. *Quality of Life in the Economic and Urban Economic Literature*. Social Indicators Research.

- Parwata, I.W. 2011. Rumah Tinggal Bali dari Aspek Budaya dan Antropometri. *Mudra, Jurnal Seni dan Budaya* 26.
- PUPR. 1992. Undang-Undang In No 4, edited by PUPR. Jakarta.
- Suryo, S.M. 2017. Analisa Kebutuhan Luas Minimal pada Rumah Sederhana Tapak di Indonesia. *Jurnal Pemukiman* 12.
- Yunus dan Hadi, S. 2005. *Megapolitan Konsep, Problematika dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



TENTANG PENULIS



Ir. I Gusti Putu Anindya Putra, MSP, lahir di Kota Blitar, Jawa Timur pada tanggal 13 April 1955. Sesudah menamatkan pendidikan Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana Bali (1985), penulis kemudian melanjutkan studi S2 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang lulus pada tahun 1991. Mengawali karier pada Kanwil PU Provinsi Bali pada Unit Perencanaan (*Unit Planning*), kemudian dipinjam pada Dinas Tata

Kota Kotamadya Denpasar, kemudian mengabdikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar, kembali ditugaskan sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Pemerintah Kota Denpasar, terakhir menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Selain aktif dalam karier birokrasi, penulis juga aktif dalam organisasi profesional, seperti menjadi anggota *Bali Human Ecology Study Group* (Bali HESG) sejak tahun 2000, Bidang Komunikasi & Pelestarian Arsitektur dan anggota Profesional Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Cabang Bali (2003-2007), Wakil Ketua dan anggota Profesional Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Cabang Bali (2000-2006), Bidang Komunikasi dan Anggota Ikatan Alumni ITB Cabang Bali (2002-2005), Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Cabang Bali (2003-2007), Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2016 sampai sekarang, dan menjabat sebagai Kepala Badan Kreatif Denpasar sejak Desember tahun 2016. Penulis merupakan inisiator pembentukan dan dosen

pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia (Unhi) sejak tahun 2010 sampai sekarang, serta menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan Perkotaan dan Wilayah (PSP2W) Unhi sejak tahun 2015. Email: igpanindya@gmail.com



I Komang Gede Santhyasa, ST., MT., menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Arsitektur dibidang Perancangan Kota di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2002 dan S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Brawijaya (UB) tahun 2007. Selain tercatat sebagai dosen juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia (sejak Pebruari 2018), yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (2010 – 2018). Terlibat aktif dalam konsorsium Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) sebagai Koordinator Wilayah Bali – Lombok. Penulis juga aktif sebagai peneliti pada Pusat Studi Pembangunan Perkotaan dan Wilayah (PSP2W) Universitas Hindu Indonesia. Fokus penelitiannya mencakup perencanaan spasial, *human settlement*, perencanaan dan pengembangan pariwisata. Saat ini, sebagai kandidat Doktor dibidang perencanaan pariwisata pada Program Studi Doktor (S3) Pariwisata Universitas Udayana. Email: santhyasa@unhi.ac.id



I Putu Gede Suyoga, ST., M.Si, kelahiran 6 April 1971 di Padangtegal, Ubud, Gianyar, adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Disain Bali, Denpasar dan dosen tidak tetap di Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Teknik Arsitektur, Universitas Udayana (tamat 1998). Pendidikan Strata Dua (S2) di Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan, Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar (tamat



2014). Kini sedang melanjutkan studi di Program Studi Doktor Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Denpasar. Ia adalah penulis artikel aktif yang telah diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional. Kolomnis Wartamkosala pada Majalah Wartam (PHDI Pusat). Karyanya dalam bentuk buku berjudul: Kebijakan Orang Bali: Bicara Melalui Tindakan, Ulasan *Dharma Talk* I Made Gunarta (2014); Arsitektur *Bade*: Transformasi Konsep menuju Bentuk (2014). *Petulangan*, Jelajah Sosio Kultural (2018). Beberapa tulisan juga tergabung dengan penulis lain dalam buku bunga rampai. Pernah mendapat penghargaan HBRC Awards 2017, sebagai penulis buku budaya Hindu terbaik dari *Hindu Books and Readers Community*. Saat ini beralamat di Jl. Sugriwa 50. Lingk./Br. Padangtegal Klod, Ubud, Gianyar, Bali. Email: pgsuyoga@gmail.com.



Wahyudi Arimbawa, ST., M.Ars, lahir di Dompu, 11 April 1983. Menamatkan pendidikan Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Nasional Malang pada tahun 2007. Melanjutkan pendidikan pada Program Magister Arsitektur dengan konsentrasi Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Desa-Kota di Universitas Udayana. Saat ini aktif sebagai dosen tetap pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Hindu

Indonesia. Menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Pembangunan Perkotaan dan Wilayah (PSP2W) Universitas Hindu Indonesia. Penulis juga tercatat sebagai Ahli Madya Perencanaan Wilayah dan Kota pada Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Provinsi Bali. Aktif sebagai praktisi tata ruang di Bali. Berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai konsultan pemerintah, khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan, Masterplan Kawasan dan RTBL. Saat ini aktif melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan naskah akademis dan kajian-kajian perkotaan. Email: yudiarimbawa@gmail.com



Made Novia Indriani, ST, MT, lahir di Denpasar pada tanggal 16 November 1977, menyelesaikan Magister Teknik Sipil (Manajemen Proyek Konstruksi) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Tahun 2003, dan kini sedang menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Teknik Universitas Udayana Bali sejak Tahun 2017. Selain sebagai Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia, juga sebagai peneliti, pemakalah dalam seminar nasional dan internasional serta penulis beberapa buku antara lain, buku *“Metode-metode Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan”* yang merupakan luaran hasil dari hibah penulisan buku ajar dari Ristekdikti tahun 2018, serta menulis sebuah narasi tentang Restorasi Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Pura dalam buku “Bali Dalam Narasi” dan terakhir, buku yang diterbitkan oleh Unhi Press dengan judul “Eksistensi Kearifan Lokal Hindu Bali Di Era Globalisasi”. Email: madenovia@gmail.com



I Nyoman Suta Widnyana, ST, MT, lahir di Denpasar pada tanggal 26 Oktober 1978, menyelesaikan Program Magister Teknik Sipil konsentrasi Struktur di Universitas Udayana (Unud) Bali Tahun 2008 dan kini sedang menempuh studi Program Doktor Ilmu Teknik di universitas yang sama yaitu di Universitas Udayana (Unud) Bali sejak Tahun 2018. Selain sebagai Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia, penulis juga aktif sebagai peneliti. Penulis mempunyai pengalaman mengajar Mata Kuliah Struktur Beton Bertulang, Struktur Kayu, Pemrograman Komputer, serta mata kuliah yang berkaitan dengan bidang Teknik Sipil. Email: gussuta@yahoo.co.id



Ni G.A. Diah Ambarwati Kardinal, ST,MT

menamatkan sarjana pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana (2003) dan Magister Rancang Kota pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB (2009). Tahun 2012 menjadi dosen tetap di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hindu Indonesia. Sejak Februari 2018 menjabat sebagai Ketua Program Studi Perencanaan



Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hindu Indonesia. Selain sibuk mengajar, penulis juga aktif sebagai peneliti. Fokus penelitiannya dibidang pelestarian budaya yang berkaitan dengan keruangan. Terlibat aktif dalam pengembangan peta Jelajah Pusaka Denpasar, Sanur dan Nyuh Kuning bersama *i-discover* Hongkong, Eco Sanur dan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Saat ini masih menjadi Pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Daerah Bali 2017-2020 Bidang Pengkajian, Pelestarian & Green Desain. Email: diahkardinalpwkunhi@gmail.com



Ida Bagus Wirahaji, ST, S.Ag., M.Si., MT, lahir di

Denpasar tanggal 10 Januari 1966. Alamat Jl. Imam Bonjol No. 107 Denpasar. Tamat S1 Jurusan Teknik Sipil Universitas Udayana (1995). Tamat S1 Jurusan Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia (2003), tamat S2 Magister Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia (2007), dan tamat S2 Magister Teknik Sipil Universitas Udayana (2013). Tahun 1993 bekerja pada konsultan supervisi pada Pengawasan Proyek Jalan

Terminal Cargo Tahap V Denpasar, tahun 1995-1997 bekerja pada kontraktor PT Tunas Jaya Sanur, dan tahun 1997-2017 bekerja pada konsultan supervisi pada pengawasan proyek-proyek jalan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional di Bali. Tahun 1995 menjadi tenaga pengajar pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia sampai sekarang, sebagai pengampu mata kuliah: Perencanaan Geometrik Jalan, Konstruksi Perkerasan Jalan, Sistem Transportasi, Rekayasa Lalu Lintas, dan Manajemen Lalu Lintas. Tahun 2008-

2012 menulis artikel tentang jalan pada Majalah Sabda dan Jurnal Widya Teknik Universitas Hindu Indonesia, tahun 2013 menulis artikel jalan pada Jurnal Teknik Sipil Universitas Udayana. Tahun 2014 – 2019 menulis artikel tentang transportasi pada Jurnal Widya Teknik Universitas Hindu Indonesia. Email: ib.wirahaji@gmail.com



I Putu Laintarawan, ST, MT, lahir di Nusa Penida, 29 Juli 1977. Pada tahun 1996 studi S1 di Program Studi Teknik Sipil Universitas Udayana dan pada tahun 2003 melanjutkan studi S2 Magister Teknik Sipil Universitas Udayana. Setelah selesai studi, dilanjutkan bekerja sebagai profesional sebagai konstruktor untuk beberapa proyek pemerintah maupun swasta. Tahun 2007, penulis diterima sebagai dosen tetap di Universitas Hindu Indonesia pada Program Studi Teknik Sipil sampai sekarang. Tahun 2012-2018 sebagai Kepala Laboratorium Teknik Sipil, dan tahun 2018-sekarang sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia. Email: ltrwnn@gmail.com



Ida Ayu Putu Sri Mahapatni, ST, MT, lahir di Wanasari Tabanan, 19 Oktober 1969. Penulis adalah alumni S1 Teknik Sipil Universitas Warmadewa dan S2 Magister Teknik Sipil Universitas Udayana. Ia yang aktif sebagai pengajar pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia, memiliki Jabatan Akademik Lektor Gol. III/d. Selain aktif mengajar, aktif juga pada dunia profesional sebagai direktur perusahaan kontraktor dan sebagai asesor kemampuan badan usaha jasa konstruksi di LPJK Bali. Email: dayumaha71@yahoo.com



Ir. Made Gde Sudharsana, Dipl.UM., IAI, lahir di Denpasar, 12 Oktober 1955, dosen tidak tetap pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia. Pendidikan Sarjana Teknik Arsitektur dari Fakultas Teknik Universitas Udayana (1984), melanjutkan Pasca Sarjana dibidang *Urban Management* pada Oxford Brookes University United Kingdom (2001). Mengikuti berbagai kursus dan studi perkotaan, perumahan dan permukiman di Rotterdam Belanda (1994), Kuala Lumpur Malaysia (1995), Singapura (1995) Ho Chi Minh City Vietnam (2001), serta kursus penanganan bencana gempa di Victoria University Wellington New Zealand – New South Wales University Sydney Australia (1997). Karir sebagai Pegawai Negeri Sipil dari tahun 1984 pada Kanwil/Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali sampai pensiun tahun 2011. Setelah pensiun menjadi Koordinator Fasilitator Sanitasi Provinsi Bali dan pemerhati masalah infrastruktur pekerjaan umum serta menjadi Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Bali Periode 2016-2020.



I Nyoman Harry Juliarthana, ST, MSc. Kelahiran Klungkung 18 Juli 1984 yang mempunyai latar belakang pendidikan S1 Teknik Arsitektur dan S2 Rancang Kota (*Urban Design*) dari Universitas Gajah Mada (UGM). Saat ini melakukan kegiatan akademik maupun profesional dengan konsentrasi arsitektur, lanskap, perkotaan hingga wilayah. Pembangunan kekotaan di pulau Bali menjadi ketertarikannya saat ini. Email: harryjuliarthana@gmail.com





Komang Ayu Sari Galih, ST, MM., adalah alumni S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (UGM) dan S2 Magister Manajemen Universitas Udayana (Unud). Ia saat ini sebagai dosen tidak tetap pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia. Perempuan kelahiran Surakarta ini, senang bermain dan menemukan hal baru. Mimpi yang ingin dicapai, berkeliling mengenal berbagai macam perdesaan. Email: komanggalih@gmail.com



Cokorda Putra, ST., M.Si., lahir di Gianyar pada tanggal 2 Maret 1968. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di Gianyar dan Menengah di Singaraja. Pendidikan S1 bidang Arsitektur diselesaikan di Universitas Dwijendra Denpasar pada tahun 1996. Mengenyam Pendidikan Kesehatan di Universitas Hindu Indonesia pada tahun 2006 dan di Karya Sari Bogor pada tahun 2007. Pendidikan S2 Ilmu Agama dan Kebudayaan diselesaikan pada tahun 2015.



Mempunyai pengalaman kerja dibidang Konstruksi pada proyek - proyek Villa di Ubud, sempat sebagai konsultan pada Proyek Pura Tri Hita Karana Berlin Jerman di tahun 2012. Mengikuti *Short Course* Kesehatan Lingkungan tahun 2010 di DSVV Santikunj Haridwar India tahun 2010. Menjadi dosen di Universitas Hindu Indonesia pada tahun 2010 serta aktif mengikuti kegiatan seni dan budaya. Saat ini sedang mengikuti Pendidikan S3 pada Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia. Email: cokguang@gmail.com

A.A.Ayu Made Cahaya Wardani, ST,MT, lahir di Badung pada tanggal 17 Oktober 1974. Pendidikan sampai SMA dilakukan di Denpasar dan pada tahun 1992 melanjutkan studi pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Udayana yang diselesaikan pada tahun 1999. Setelah menyelesaikan studi bekerja pada bidang usaha konstruksi sambil melanjutkan kuliah S2 pada tahun 2000 dan menyelesaikan studi pada tahun 2002 di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS). Pada tahun 2005 diterima sebagai dosen PNS dpk dan hingga sekarang penulis sedang menempuh Pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Teknik Universitas Udayana. Email: agungmadecahaya@yahoo.com

